



**KELAS 7**

# **PANCASILA**

**Nilai, Norma, dan Implementasi Pancasila:**

**Buku Pegangan Pancasila untuk Siswa Kelas 7**

## Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas terbitnya e-book Pancasila ini yang merupakan bagian dari upaya menghadirkan pembelajaran yang lebih mudah diakses oleh seluruh pelajar Indonesia. Pendidikan Pancasila adalah mata pelajaran yang mempelajari nilai-nilai luhur Pancasila, identitas nasional, serta prinsip bernegara, yang bertujuan membentuk generasi yang berkarakter, cinta tanah air, dan berperan aktif dalam menjaga persatuan.

E-book ini disusun berdasarkan Capaian Pembelajaran Pancasila Fase E (sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 008/H/KR/2022 Tentang Capaian Pembelajaran Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah Pada Kurikulum Merdeka). Konten e-book ini dirancang agar peserta didik dapat memahami materi Pancasila secara komprehensif, mengasah keterampilan berpikir kritis, serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selain materi utama, e-book ini juga dilengkapi dengan latihan soal, pembahasan, serta tautan ke sumber belajar tambahan seperti video pembelajaran interaktif.

E-book ini merupakan bagian dari platform [Fitri](#), sebuah platform pembelajaran digital yang menyediakan akses gratis ke berbagai materi belajar, termasuk e-book, latihan soal, dan video pembelajaran interaktif untuk seluruh anak Indonesia. Fitri hadir sebagai wujud kontribusi nyata dalam mendukung pemerataan akses pendidikan berkualitas di Indonesia. Dengan semangat gotong royong dan inklusi, Fitri berkomitmen untuk membantu seluruh siswa, di mana pun berada, agar dapat belajar secara mandiri, efektif, dan menyenangkan. Hal ini selaras dengan tujuan besar pendidikan Indonesia, yaitu mewujudkan generasi yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan zaman.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung tersedianya e-book ini. Semoga kehadiran e-book Pancasila ini dapat memberikan manfaat nyata dalam proses belajar peserta didik dan turut berkontribusi dalam meningkatkan literasi bangsa.

Jakarta, Juni 2025  
Tim Fitri

## Daftar Isi

<b>BAB 1: LAHIRNYA PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA .....</b>	<b>5</b>
1. Lahirnya Gagasan Pancasila dalam Sidang BPUPK .....	7
2. Perumusan Nilai-Nilai Pancasila oleh Panitia Sembilan.....	15
3. Proklamasi Kemerdekaan dan Pengesahan Pancasila sebagai Dasar Negara .....	18
<b>Rangkuman.....</b>	<b>24</b>
<b>Latihan Soal .....</b>	<b>25</b>
<b>Referensi.....</b>	<b>27</b>
<b>BAB 2: IMPLEMENTASI NILAI PANCASILA DALAM KEHIDUPAN .....</b>	<b>28</b>
1. Definisi dan Karakteristik Nilai-Nilai Pancasila .....	30
2. Makna yang Terkandung pada Sila-Sila Pancasila.....	39
3. Aplikasi Pancasila dalam Kehidupan Sehari-hari.....	49
<b>Rangkuman.....</b>	<b>53</b>
<b>Latihan Soal .....</b>	<b>54</b>
<b>Referensi.....</b>	<b>56</b>
<b>BAB 3: KEPATUHAN TERHADAP NORMA YANG BERLAKU .....</b>	<b>57</b>
1. Manusia sebagai Makhluk Tuhan, Individu, dan Sosial .....	59
2. Konsep Nilai dan Norma.....	64
3. Jenis-Jenis Norma.....	68
4. Berperilaku Sesuai Norma .....	76
<b>Rangkuman.....</b>	<b>86</b>
<b>Latihan Soal .....</b>	<b>87</b>
<b>Referensi.....</b>	<b>89</b>
<b>BAB 4: KEBERAGAMAN INDONESIA DALAM KERANGKA BHINNEKA TUNGGAL IKA .....</b>	<b>90</b>
1. Arti Persatuan dalam Keberagaman .....	92
2. Persatuan dalam Keberagaman Suku, Agama, Ras, dan Golongan di Masyarakat ....	99
3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perubahan Sosial dan Keberagaman .....	106
4. Tantangan Menghadapi Perubahan Sosial Budaya di Berbagai Level.....	110
5. Keberagaman dalam Perspektif Bhinneka Tunggal Ika .....	115
<b>Rangkuman.....</b>	<b>120</b>
<b>Latihan Soal .....</b>	<b>121</b>
<b>Referensi.....</b>	<b>123</b>

<b>BAB 5: RUANG GEOGRAFIS NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA .....</b>	<b>124</b>
1. Pengertian Negara dan Unsur-Unsur Penyusunnya.....	126
2. Konsep Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.....	132
3. Indonesia sebagai Negara Kesatuan.....	140
4. Upaya Mempertahankan Keutuhan Wilayah Negara .....	149
<b>Rangkuman.....</b>	<b>159</b>
<b>Latihan Soal .....</b>	<b>160</b>
<b>Referensi.....</b>	<b>162</b>



## BAB 1

# LAHIRNYA PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA

### Karakter Pelajar Pancasila

**Mandiri:** Menyusun garis waktu dan ringkasan proses kelahiran hingga penetapan Pancasila dari sumber tepercaya dengan bahasa sendiri.

**Beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia:** Menghargai nilai religius dalam perumusan Pancasila serta menjaga etika dan kesantunan saat berdiskusi.

**Bergotong royong:** Berkolaborasi mencari informasi berbagi peran dan menyepakati simpulan kelompok tentang proses lahirnya Pancasila.

**Kata Kunci:** Pancasila, Dasar Negara, Panitia Sembilan, Piagam Jakarta, Proklamasi Kemerdekaan, PPKI, Perumusan Pancasila, Kronologi, Tokoh Perumus.

### Tujuan Pembelajaran: Menelusuri Sejarah dan Proses Pancasila

#### 1. Memahami Sejarah Lahirnya Pancasila

- ▷ Menyampaikan latar belakang kelahiran Pancasila sebagai dasar negara
- ▷ Mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong munculnya Pancasila pada masa perjuangan kemerdekaan

#### 2. Mendeskripsikan Lahirnya Pancasila dalam Sidang BPUPK

- ▷ Menjelaskan proses pembahasan Pancasila dalam Sidang BPUPK
- ▷ Menguraikan keputusan-keputusan penting dalam sidang tersebut yang mengarah pada perumusan dasar negara.

### **3. Menganalisis Proses Perumusan Pancasila oleh Panitia Sembilan**

- ▷ Menggali keputusan Panitia Sembilan dalam merumuskan Pancasila
- ▷ Menghubungkan hasil perumusan tersebut dengan piagam Jakarta sebagai langkah awal Pancasila

### **4. Menganalisis Peristiwa Proklamasi dan Penetapan Pancasila Sebagai Dasar Negara**

- ▷ Menyusun kronologi peristiwa Proklamasi Kemerdekaan yang berhubungan dengan Pancasila
- ▷ Menyebutkan proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara dalam sidang PPKI



**F I T R I**



## 1. Lahirnya Gagasan Pancasila dalam Sidang BPUPK



Burung Garuda – Shutterstock.com/2440562027

Setiap kali mengikuti upacara bendera di sekolah atau memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia, kita tidak pernah luput dari membacakan teks Pancasila dengan penuh khidmat. Lima sila dalam Pancasila bukan hanya menjadi hafalan rutin, tetapi juga merupakan dasar ideologis dan moral bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, pernahkah kita bertanya, bagaimana Pancasila bisa lahir? Dari mana asal gagasan lima sila ini? Siapa yang merumuskannya, dan mengapa Pancasila dianggap sebagai dasar yang paling tepat untuk negara Indonesia yang majemuk?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu menyusuri kembali sejarah panjang bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebenarnya telah tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia jauh sebelum kemerdekaan. Nilai seperti gotong royong, toleransi antarumat beragama, rasa keadilan, dan semangat persatuan merupakan bagian dari kearifan lokal yang telah mengakar kuat dalam tradisi dan budaya berbagai suku bangsa di Nusantara.

Dengan kata lain, Pancasila bukanlah hasil dari adopsi ideologi asing, melainkan cerminan dari karakter bangsa Indonesia itu sendiri. Dalam bahasa Sanskerta, kata panca berarti lima, dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila secara harfiah berarti lima prinsip utama yang menjadi pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai ini tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan melalui proses panjang yang melibatkan perjuangan fisik dan pemikiran konseptual.

Setelah berabad-abad mengalami penjajahan oleh bangsa asing pertama oleh Portugis, kemudian Belanda, dan akhirnya Jepang, bangsa Indonesia memasuki masa yang menentukan pada awal 1940-an. Pendudukan Jepang atas Hindia Belanda sejak tahun 1942 awalnya disambut baik oleh sebagian rakyat Indonesia. Harapan akan kemerdekaan mulai tumbuh seiring janji-janji Jepang yang berusaha merebut simpati rakyat. Jepang mempropagandakan diri sebagai "saudara tua bangsa Asia" dan menjanjikan pembebasan dari penjajahan Barat.

Namun kenyataannya, Jepang menerapkan sistem eksploitasi yang bahkan lebih keras. Rakyat dipaksa menjadi tenaga kerja paksa (romusha), hasil bumi dikeruk untuk kepentingan perang, dan pendidikan hanya ditujukan untuk mendukung kepentingan militer Jepang. Lambat laun, rakyat menyadari bahwa mereka sedang menghadapi bentuk penjajahan baru. Muncullah berbagai bentuk perlawanan, baik yang bersifat terbuka maupun gerakan bawah tanah.

Di sisi lain, kekalahan Jepang di medan perang, terutama setelah serangan mendadak ke Pearl Harbour pada Desember 1941 dan tekanan bertubi-tubi dari Sekutu, memaksa Jepang untuk mulai menyusun

strategi diplomasi. Salah satu strateginya adalah menjanjikan kemerdekaan kepada bangsa-bangsa yang mereka jajah, termasuk Indonesia.

Situasi ini membuka ruang baru bagi para tokoh bangsa untuk mulai mempersiapkan struktur negara Indonesia merdeka. Dalam suasana yang penuh ketegangan namun juga harapan, Jepang membentuk badan resmi yang bertugas untuk merancang langkah-langkah kemerdekaan Indonesia.

## Proses Pembentukan BPUPK

Pada tahun-tahun akhir Perang Dunia II, situasi global mengalami perubahan besar. Jepang, yang sebelumnya berjaya di berbagai front pertempuran, mulai terdesak oleh kekuatan Sekutu. Dalam kondisi tertekan inilah, pemerintah Jepang mencoba merebut hati bangsa Indonesia dengan menawarkan janji kemerdekaan. Pada tanggal 7 September 1944, melalui Perdana Menteri Jepang Kuniaki Koiso, disampaikan bahwa Hindia Belanda (Indonesia) akan diizinkan untuk merdeka di masa depan. Janji ini bukan sekadar pernyataan politis, tetapi menjadi dasar dibentuknya lembaga yang disebut Dokuritsu Junbi Chōsakai, atau dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPK).

Pengumuman resmi tentang pembentukan BPUPK disampaikan oleh Panglima Angkatan Darat Jepang ke-16, Letnan Jenderal Kumakichi Harada, pada 1 Maret 1945. Lembaga ini menjadi sarana formal pertama yang memberikan kesempatan kepada para tokoh bangsa untuk membahas tata kelola Indonesia pascakemerdekaan, termasuk menentukan dasar negara, sistem pemerintahan, dan arah pembangunan bangsa yang merdeka dan berdaulat.

### a. Tugas dan Fungsi Utama BPUPK

Tujuan utama dibentuknya BPUPK adalah untuk menyelidiki dan merumuskan hal-hal penting yang berkaitan dengan pembentukan negara Indonesia yang merdeka. Di antaranya meliputi:

- ▷ Menyusun dasar negara
- ▷ Menentukan bentuk pemerintahan
- ▷ Membahas konstitusi atau Undang-Undang Dasar
- ▷ Menelaah nilai-nilai kebangsaan dan keadilan sosial

Meski badan ini dibentuk oleh Jepang, para tokoh Indonesia melihatnya sebagai peluang emas untuk memperjuangkan kemerdekaan dari dalam sistem yang ada. Karena itu, meskipun dibayang-bayangi kepentingan politik Jepang, BPUPK menjadi sarana strategis yang sangat penting bagi bangsa Indonesia.

### b. Struktur dan Keanggotaan BPUPK

Struktur organisasi BPUPK diumumkan secara resmi melalui Maklumat Gunseikan Nomor 23 pada 29 April 1945, dan kemudian diberitakan oleh koran Asia Raya. Dalam maklumat tersebut dinyatakan bahwa BPUPK memiliki seorang ketua dan dua wakil ketua, satu dari pihak Jepang dan satu dari pihak Indonesia. Ketua BPUPK adalah dr. K. R. T. Radjiman Wedyodiningrat, sementara wakil ketua dari Jepang adalah Ichibangase Yoshio dan dari Indonesia adalah R. P. Soeroso.



## Jejak Pancasila

### Pancasila dalam Pembelajaran Online

Kini, banyak platform *e-learning* di Indonesia yang mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam materi pembelajaran, mengajarkan generasi muda pentingnya kerjasama dan persatuan, bahkan melalui game edukasi!



Permainan Monopoli Berbasis Android Bertema Pancasila – [pgsd.binus.ac.id](http://pgsd.binus.ac.id)

BPUPK awalnya beranggotakan 60 orang tokoh Indonesia, ditambah 7 tokubetsu lin (anggota istimewa) dari pihak Jepang. Pada sidang kedua, jumlah anggota ditambah 6 orang, sehingga total keseluruhan anggota Indonesia menjadi 68 orang. Komposisi anggotanya sangat beragam, mencerminkan pluralitas masyarakat Indonesia. Berikut klasifikasi anggota BPUPK menurut bidangnya:

- ▷ Ulama: Mewakili pemikiran keagamaan Islam.
- ▷ Birokrat fungsional: Seperti dokter, hakim, dan ahli keuangan.
- ▷ Birokrat pemerintahan: Termasuk kepala jawatan.
- ▷ Golongan swasta dan independen: Wartawan, pengusaha, advokat.
- ▷ Tokoh pergerakan nasional: Pemimpin organisasi rakyat dan partai politik.

Jepang membagi BPUPK dalam lima kategori utama berdasarkan latar belakang sosial-budaya dan peran politik anggotanya, yakni: golongan pergerakan, golongan Islam, golongan birokrat, golongan kerajaan, serta golongan peranakan (seperti Tionghoa, Arab, dan Eropa). BPUPK juga melibatkan perempuan, seperti Ny. Maria Oelfa Santoso dan Ny. R. S. S. Soenario Mangoenpoespito, yang menunjukkan inklusivitas gender di tengah proses kemerdekaan.



*Ny. Maria Oelfa Santoso - commons.wikimedia.org*

### c. Tempat dan Waktu Sidang

Sidang resmi pertama BPUPK diselenggarakan pada 28 Mei – 1 Juni 1945, bertempat di Gedung Cuo Sangi In di Jalan Pejambon, Jakarta yang kini dikenal sebagai Gedung Pancasila. Di tempat inilah kelak nama Pancasila pertama kali dikemukakan oleh Ir. Soekarno.

Upacara peresmian BPUPK sendiri dilakukan pada 28 Mei 1945, sebagai penanda dimulainya sidang yang akan menentukan arah masa depan bangsa. Di hari pelantikan tersebut, ketua BPUPK, dr. Radjiman, menyampaikan pidato penting yang mengajak seluruh anggota untuk menyingkirkan kepentingan pribadi dan bersatu demi membentuk negara yang merdeka dan berdaulat atas kekuatan sendiri. Ia juga menekankan pentingnya nilai gotong royong sebagai ciri khas bangsa Indonesia yang harus terus dijaga. Berikut nama-nama yang menjadi anggota BPUPK dan berperan besar dalam sidang-sidangnya antara lain:

### Tabel Daftar Anggota BPUPK

1.	Abikoeso Tjokrosoejoso	31.	H. Agoes Salim
2.	K. H. Sanoesi	32.	Dr. Samsi
3.	K. H. Abdoel Halim	33.	Mr. R. M. Sartono
4.	Prof. Dr. R. Asikin Widjajakoesoema	34.	Mr. R. Samsuudin
5.	M. Aris	35.	Mr. R. Sastramoeljono
6.	Abdul Kadir	36.	Mr. R. M. Singgih
7.	Dr. R. Boentaran Martoatmodjo	37.	Ir. Soekarno
8.	B. P. H. Bintoro	38.	R. Soedirman
9.	Ki Hadjar Dewantara	39.	R. Soekardjo Wirjopranoto
10.	A. M. Dasaad	40.	Dr. Soekiman
11.	Prof. Dr. P. A. H. Djojoadingrat	41.	A. A. Soebardjo
12.	Drs. Mohammad Hatta	42.	Mr. Prof. Dr. Soepomo
13.	Ki Bagoes Hadikoesoemo	43.	Ir. R. M. P. Soearachman Tjokroadisoerjo
14.	Mr. R. Hindromartono	44.	M. Soetardjo Kartohadikoesoemo
15.	Mr. Muh. Yamin	45.	Mr. T. A. Soerjo
16.	R. A. A. Soemitro Kolopaking Poerbonegoro	46.	Mr. Soesanto
17.	Mr. Dr. R. Koesoema Atmadja	47.	Mr. Soewandi
18.	Mr. J. Latuharhary	48.	Drs. K. R. M. A. Sosrodiningrat
19.	R. Margono Djojohadikoesoemo	49.	K. H. R. A. Wachid Hasjim
20.	Mr. A. A. Maramis	50.	K. H. T. M. H. Woerjaningrat
21.	K. H. Masjkoer	51.	R. A. A. Wiranatakoesoema
22.	K. H. M. Mansoer	52.	Mr. K. R. T. M. Wongsonegoro
23.	Moenandar	53.	Ny. Mr. Maria Oelfa Santoso
24.	A. K. Moezakkir	54.	Ny. R. S. S. Soenario Mangoenpoespito
25.	R. Oto Iskandar Di Nata	55.	Oei Tjong Hauw
26.	Parada Harahap	56.	Liem Koen Hian
27.	B. P. H. Poeroebojo	57.	Tan Eng Hoa
28.	Abdoelrahim Pratjakranegara	58.	Mr. P. F. Dahler
29.	R. Roeslan Wongsokoesoemo	59.	A. R. Baswedan
30.	Prof. Ir. R. Rooseno	60.	Mr. A. R. Baswedan

Anggota Tokubetsu Lin (Anggota Istimewa dari Jepang)

Sebanyak 7 anggota istimewa (tokubetsu lin) ditunjuk dari pihak Jepang (Latif, 2015):

- 1) Tokonomi Tokuzi
- 2) Miyano Syoozoo
- 3) Itagaki Masamitu
- 4) Matuura Mitokiyo
- 5) Tanaka Minoru
- 6) Masuda Toyohiko
- 7) Ide Teitiroo

Anggota Tambahan (Affandi, 2020)

Dalam sidang kedua BPUPK, ditambahkan enam anggota baru:

- 1) K. H. Abdoel Fatah Hasan
- 2) R. Asikin Natanegara
- 3) B. K. P. A. Soerjohamidjojo
- 4) Ir. Pangeran M. Noor
- 5) Mr. M. Besar
- 6) Abdoel Kaffar



*Muhammad Yamin - tempo.com*

Mereka datang dari berbagai daerah, suku, dan latar belakang sosial yang mencerminkan miniatur bangsa Indonesia yang penuh keberagaman. Dengan landasan yang kuat ini, BPUPK bukan hanya simbol diplomasi politik Jepang, tetapi menjadi awal nyata dari desain negara Indonesia modern. Dalam sidang-sidangnya, para tokoh bangsa membahas dasar negara dengan penuh semangat kebangsaan dan cita-cita luhur.

Saat pelantikan anggota BPUPK, dr. Radjiman menyampaikan ajakan kepada seluruh anggota untuk mempersatukan kekuatan dan niat demi terbentuknya negara Indonesia yang merdeka secepat mungkin. Ia juga menekankan pentingnya menyingkirkan egoisme pribadi dan menanamkan semangat gotong royong sebagai dasar sosial bangsa.

Dalam sidang pertamanya, Mr. Muhammad Yamin menyuarkan pentingnya kemanusiaan dan internasionalisme sebagai salah satu dasar negara. Gagasan ini menjadi awal pemikiran sistematis tentang dasar ideologi Indonesia, yang kelak terformulasi dengan lebih komprehensif oleh Soekarno dalam pidatonya tanggal 1 Juni 1945.

## Munculnya Ide Dasar Negara Pancasila dalam Forum Sidang BPUPK



Sidang BPUPKI - commons.wikimedia.org

Sidang BPUPK berlangsung pada 28 Mei hingga 1 Juni 1945, yang menjadi salah satu peristiwa paling penting dalam sejarah pembentukan negara Indonesia. Sidang ini dibagi dalam beberapa sesi, yang berlangsung dengan intensif selama lima hari. Pada hari pertama, BPUPK dimulai dengan upacara pembukaan yang diikuti oleh diskusi mengenai berbagai isu dasar negara yang akan dibentuk.

Dalam buku Uraian Pancasila yang ditulis oleh Mohammad Hatta, disebutkan bahwa dalam pidato pembukaan sidang, dr. Radjiman Wedyodiningrat mengajukan sebuah pertanyaan yang sangat penting: "Apa dasar negara yang akan dibentuk oleh bangsa Indonesia?" Pertanyaan ini menjadi titik awal dari diskusi panjang mengenai bagaimana bentuk negara yang paling sesuai dengan semangat kemerdekaan dan identitas bangsa Indonesia.

### a. Peran Tokoh-Tokoh dalam Sidang BPUPK

Beberapa tokoh yang hadir dalam sidang tersebut mengemukakan pandangannya mengenai dasar negara, yang mencerminkan keragaman pandangan politik dan sosial yang ada di Indonesia pada masa itu. Misalnya, Mr. Muhammad Yamin mengusulkan dasar negara yang mencakup unsur nasionalisme, sedangkan Prof. Dr. Soepomo lebih mengutamakan prinsip kekeluargaan dan kerjasama sebagai dasar pengorganisasian negara Indonesia.

Berdasarkan pandangan-pandangan yang dikemukakan, beberapa prinsip dasar yang muncul adalah nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial. Nilai-nilai ini menjadi bahan dasar dari konsep negara yang dibicarakan dalam sidang tersebut. Namun, meskipun prinsip-prinsip tersebut mulai terlihat, pada saat itu belum ada kesepakatan mengenai urutan sila atau cara menyusunnya secara sistematis.

### b. Pidato Soekarno pada 1 Juni 1945

Puncak dari sidang BPUPK adalah pidato yang disampaikan oleh Ir. Soekarno pada 1 Juni 1945, yang kemudian dikenal sebagai "Hari Lahirnya Pancasila". Dalam pidato tersebut, Soekarno mengemukakan lima prinsip dasar yang seharusnya menjadi dasar negara Indonesia, yang kelak dikenal dengan nama Pancasila. Konsep dasar negara yang dicetuskan oleh Soekarno ini merupakan hasil pemikiran dan perenungan panjang mengenai keadaan sosial-politik Indonesia yang sangat majemuk. Lima sila yang diusulkan Soekarno dalam pidato tersebut adalah:

- 1) Ketuhanan yang Maha Esa (Menekankan bahwa negara Indonesia akan mengakui adanya Tuhan dan menjamin kebebasan beragama bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa diskriminasi).
- 2) Kemanusiaan yang Adil dan Beradab (Menegaskan pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat).
- 3) Persatuan Indonesia (Mewajibkan seluruh rakyat Indonesia untuk bersatu, meskipun memiliki perbedaan suku, agama, dan budaya).
- 4) Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan (Menyatakan bahwa sistem pemerintahan Indonesia akan berlandaskan pada demokrasi, dengan musyawarah untuk mufakat sebagai prinsip utama dalam pengambilan keputusan).
- 5) Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia (Menuntut pemerataan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa ada yang tertinggal).

Usulan ini mendapatkan tanggapan positif dari anggota BPUPK lainnya, meskipun ada beberapa perdebatan mengenai penggunaan istilah-istilah tertentu, seperti Ketuhanan dalam sila pertama. Beberapa tokoh menginginkan istilah yang lebih spesifik untuk menggambarkan hubungan negara dengan agama mayoritas, yaitu Islam. Namun, Soekarno dengan tegas menjelaskan bahwa "Ketuhanan yang Maha Esa" adalah istilah yang dapat mawadahi semua agama yang ada di Indonesia, sehingga prinsip ini lebih inklusif dan mencerminkan keberagaman agama di Indonesia.

### c. Penetapan Pancasila Sebagai Dasar Negara

Setelah melalui proses perdebatan dan penyesuaian, akhirnya pada 22 Juni 1945, BPUPK menyepakati untuk menerima Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang akan dituangkan dalam Piagam Jakarta. Piagam ini memuat konsep-konsep dasar yang disusun dalam sidang tersebut dan menjadi dasar bagi perumusan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Pancasila kemudian diakui sebagai ideologi yang mengikat seluruh rakyat Indonesia untuk membangun negara yang berdiri kokoh di atas prinsip-prinsip kemanusiaan, persatuan, keadilan sosial, dan kedaulatan rakyat.

Dengan demikian, Pancasila yang lahir dalam sidang BPUPK bukan hanya sekadar sebuah gagasan yang bersifat teoritis, melainkan merupakan hasil dari pemikiran kolektif yang mendalam mengenai karakter bangsa Indonesia yang sangat majemuk. Pancasila menjadi simbol persatuan dan identitas bangsa Indonesia, yang mampu mengakomodasi seluruh perbedaan yang ada dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

#### Contoh Soal

Pada sidang pertama BPUPK yang dimulai pada 28 Mei 1945, siapa yang pertama kali mengemukakan gagasan tentang Pancasila sebagai dasar negara Indonesia?

- A. Drs. Mohammad Hatta
- B. Mr. Muhammad Yamin
- C. Prof. Dr. Soepomo
- D. Ir. Soekarno
- E. Ki Hadjar Dewantara

Jawaban: D. Ir. Soekarno

Pembahasan: Pada sidang pertama BPUPK yang berlangsung pada 28 Mei 1945, Ir. Soekarno yang pertama kali mengemukakan gagasan mengenai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Dalam pidatonya pada 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan lima sila yang menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia, yang kelak dikenal dengan nama Pancasila.

## Kegiatan Kelompok 1

**Judul : Menelusuri Gagasan Dasar Negara pada Sidang BPUPK**

**Tujuan : Memahami dan membandingkan gagasan-gagasan tentang dasar negara yang disampaikan para tokoh pada sidang BPUPK serta mengaitkannya dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.**

Ketua BPUPK, dr. Radjiman Wedyodiningrat, meminta para anggota menyampaikan pandangan mereka tentang dasar negara Indonesia. Tokoh-tokoh seperti Soekarno, Mohammad Yamin, dan Soepomo mengemukakan gagasan yang beragam, namun di dalamnya tampak nilai-nilai yang kemudian kita kenal sebagai Pancasila. Untuk memahaminya dengan cara yang sesuai untuk siswa kelas VII, lakukan kegiatan berikut secara berkelompok (4–5 orang).

1. Carilah sedikitnya empat sumber terpercaya tentang tiga tokoh beserta inti gagasan mereka pada sidang BPUPK. Sumber dapat berupa buku pelajaran, artikel lembaga resmi, atau video edukasi. Tulis data sumbernya (judul, penulis, tahun).
2. Buat ringkasan 3–5 kalimat untuk setiap tokoh, lalu susun peta konsep kecil yang menunjukkan persamaan dan perbedaan gagasan mereka.
3. Identifikasikan nilai-nilai Pancasila yang tampak pada tiap gagasan dan jelaskan alasannya secara singkat dan logis.
4. Ubah hasil analisis menjadi produk kreatif: satu infografik/poster digital atau video/podcast 2–3 menit. Gunakan bahasa sendiri dan sertakan satu kutipan singkat dari sumber.
5. Presentasikan karya kelompok selama 3–5 menit di kelas untuk mendapat masukan dari guru dan teman. Setelah itu, tulis refleksi individu (5–7 kalimat) tentang nilai Pancasila yang paling ingin kamu terapkan di sekolah atau di rumah.





## 2. Perumusan Nilai-Nilai Pancasila oleh Panitia Sembilan



*Panitia Sembilan – Kompas.com*

Sidang BPUPK yang berlangsung pada 28 Mei hingga 1 Juni 1945 telah menghasilkan banyak pandangan dan usulan mengenai dasar negara Indonesia. Namun, keputusan yang lebih mendalam mengenai rumusan dasar negara yang tepat baru dapat dilaksanakan setelah masa reses. Sidang BPUPK pertama kemudian dilanjutkan dengan masa reses selama satu bulan, yang kemudian mengarah pada pembentukan Panitia Sembilan.

### **Pembentukan Panitia Sembilan**

Pada 22 Juni 1945, setelah sidang pertama, dibentuklah Panitia Sembilan yang bertugas untuk merumuskan dan menyusun nilai-nilai dasar negara yang akan menjadi landasan bagi berdirinya negara Indonesia merdeka. Panitia sembilan ini terdiri dari:

- 1) Ir. Soekarno (ketua)
- 2) Mohammad Hatta (wakil ketua)
- 3) Achmad Soebardjo (anggota)
- 4) Muhammad Yamin (anggota)
- 5) K.H. Wahid Hasyim (anggota)
- 6) Abdoel Kahar Moezakir (anggota)
- 7) Abikoeso Tjokrosoejoso (anggota)
- 8) H. Agoes Salim (anggota)
- 9) Mr. A. A. Maramis (anggota)

Panitia Sembilan bekerja untuk merumuskan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam dasar negara Indonesia. Mereka melakukan pertemuan untuk merumuskan nilai-nilai Pancasila yang tidak hanya mencerminkan semangat kemerdekaan, tetapi juga mampu menyatukan seluruh golongan dalam masyarakat Indonesia yang beragam. Salah satu tugas utama Panitia Sembilan adalah menampung usulan, saran, dan konsep dari anggota BPUPK dan masyarakat luas mengenai bentuk dasar negara yang akan diterapkan.

## Rancangan Piagam Jakarta

Selama masa pertemuan Panitia Sembilan, mereka berhasil menyusun konsep yang disebut Piagam Jakarta, yang dianggap sebagai cikal bakal dari rumusan Pancasila. Piagam Jakarta ini memuat beberapa hal penting yang kemudian akan diterima sebagai dasar negara Indonesia, salah satunya adalah penegasan mengenai hubungan negara dengan agama, khususnya dalam konteks Islam.

Namun, setelah melalui diskusi yang lebih mendalam, Piagam Jakarta mengalami perubahan. Salah satu perubahan yang paling penting adalah penghapusan "kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" yang tercantum dalam sila pertama. Perubahan ini dilakukan untuk memastikan bahwa Pancasila bersifat inklusif dan tidak mengasingkan kelompok agama minoritas lainnya, serta memberi kebebasan beragama bagi seluruh rakyat Indonesia.

## Penerimaan Piagam Jakarta

Piagam Jakarta pada dasarnya merupakan rumusan dasar negara yang menggabungkan semangat kemerdekaan, nasionalisme, dan penghormatan terhadap keberagaman. Rumusan Piagam Jakarta yang disepakati pada 22 Juni 1945 memuat lima sila yang mengandung unsur-unsur dasar negara Indonesia yang merdeka. Meskipun ada perubahan dalam Piagam Jakarta, lima nilai yang terkandung tetap menjadi pedoman utama yang menjadi dasar negara Indonesia.

Bunyi Piagam Jakarta sebagai berikut:

### Piagam Jakarta

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, dan dengan didorong oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan bangsa yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan diri kemerdekaannya.

Piagam Jakarta ini menjadi simbol penting dalam proses pembentukan Indonesia sebagai negara merdeka yang berdasar pada prinsip-prinsip kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial.

## Penyusunan Pancasila dalam Piagam Jakarta

Setelah melakukan pembahasan, Panitia Sembilan berhasil merumuskan sila-sila dalam Piagam Jakarta yang menjadi cikal bakal Pancasila sebagai dasar negara. Lima sila yang tercantum dalam Piagam Jakarta, antara lain:

- 1) Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya
- 2) Kemanusiaan yang adil dan beradab
- 3) Persatuan Indonesia

- 4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
- 5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Namun, dalam proses perumusan lebih lanjut oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), perubahan dilakukan pada sila pertama, di mana istilah "kewajiban menjalankan syariat Islam" dihapuskan agar lebih bersifat inklusif dan mencakup semua agama di Indonesia. Setelah perubahan ini, rumusan Pancasila yang lebih dikenal kini terdiri dari lima sila tanpa pembatasan agama.



## Jejak Pancasila



*Penerapan Jiwa Pancasila di Era Digital –  
Canva.com*

### ▷ Pancasila di TikTok!

Generasi muda kini menggunakan platform seperti TikTok untuk menyebarkan nilai-nilai Pancasila, dengan membuat video kreatif tentang kerakyatan dan persatuan, mengajarkan nilai-nilai tersebut kepada audiens yang lebih luas.

### ▷ Pancasila sebagai Alat Kolaborasi di Startup

Banyak startup Indonesia yang menerapkan prinsip "gotong royong" (sila ke-4) dalam budaya kerja mereka, menggunakan nilai ini untuk mendorong kolaborasi dan kerja tim yang solid dalam membangun inovasi.

## Contoh Soal

Apa yang menjadi perubahan signifikan dalam Piagam Jakarta yang disusun oleh Panitia Sembilan?

- A. Penggunaan kata "Islam" dalam sila pertama
- B. Penggantian "Ketuhanan" menjadi "Keberagaman Agama"
- C. Penghapusan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya
- D. Penambahan sila tentang ekonomi
- E. Penyusunan sistem pemerintahan Indonesia

Jawaban: C. Penghapusan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya

Pembahasan: Salah satu perubahan signifikan dalam Piagam Jakarta adalah penghapusan kalimat "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" yang terdapat dalam sila pertama. Perubahan ini dilakukan agar Pancasila lebih inklusif dan dapat diterima oleh semua golongan agama di Indonesia, tanpa mengutamakan satu agama tertentu.

### 3. Proklamasi Kemerdekaan dan Pengesahan Pancasila sebagai Dasar Negara



*Pembacaan Teks Proklamasi – Detik.com*

Setelah melalui berbagai tahap perumusan dan pembahasan dalam Sidang BPUPK dan Panitia Sembilan, akhirnya Indonesia siap untuk meraih kemerdekaannya. Momen yang paling penting dalam sejarah bangsa Indonesia terjadi pada 17 Agustus 1945, saat Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Ir. Soekarno dan Mohammad Hatta. Proklamasi ini menandai berakhirnya penjajahan dan awal berdirinya negara Indonesia yang merdeka.

#### **Pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)**

Setelah melalui rangkaian sidang yang dilaksanakan oleh Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK), muncul kebutuhan untuk melanjutkan tugas persiapan kemerdekaan Indonesia. BPUPK, yang sudah menyelesaikan tugas perumusan dasar negara dan undang-undang dasar, dibubarkan pada 7 Agustus 1945 dan digantikan dengan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Pembentukan PPKI diumumkan secara resmi oleh pemerintah Jepang pada tanggal yang sama, yakni 7 Agustus 1945.

PPKI dibentuk dengan tujuan utama untuk mempersiapkan Indonesia menuju kemerdekaannya yang telah diakui oleh Jepang. Panitia ini bertugas untuk melanjutkan peran BPUPK dengan fokus pada penetapan hal-hal yang lebih teknis, seperti pelaksanaan proklamasi kemerdekaan, pembentukan pemerintahan Indonesia, serta mempersiapkan segala hal yang diperlukan untuk proses transisi dari penjajahan Jepang ke kemerdekaan yang penuh (Poesponegoro dan Notosusanto, 2019).

Anggota PPKI terdiri dari 21 orang yang terpilih dengan representasi yang luas dari berbagai daerah di Indonesia, termasuk dari Jawa, Sumatra, Kalimantan, Nusa Tenggara, dan Maluku. Salah satu anggota yang terkenal adalah Ir. Sukarno, yang menjadi ketua PPKI, bersama dengan Mohammad Hatta sebagai wakil ketua. PPKI juga terdiri dari anggota lainnya yaitu:

**Tabel Daftar Anggota PPKI**

1. Ir. Soekarno (Ketua)	11. Sudirman
2. Mohammad Hatta (Wakil Ketua)	12. Soetardjo Kartohadikusumo
3. Soepomo	13. Soeharto
4. Achmad Subardjo	14. Muhammad Yamin
5. Wahid Hasyim	15. M. H. Thamrin
6. Ki Bagoes Hadikusumo	16. Amir Syarifuddin
7. H. Agus Salim	17. Soekirman
8. Radjiman Wedyodiningrat	18. Shudarta
9. A. M. Hanafi	19. S. P. Siregar
10. Oto Iskandardinata	20. Achmad Mubarak
	21. H. Mohammad Natsir

Penting untuk dicatat bahwa pembentukan PPKI ini bukanlah keputusan yang sepenuhnya bebas dari pengaruh Jepang. Meskipun pemerintah Jepang secara resmi memberikan kemerdekaan kepada Indonesia, PPKI masih terikat dengan pengaruh Jepang dalam beberapa aspek administrasi dan pemerintahan. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun Indonesia mendapatkan kesempatan untuk menyusun dasar negara dan struktur pemerintahan, terdapat kendala-kendala yang masih harus dihadapi (Suryokusumo, 2016).

Selain itu, perlu dicatat bahwa PPKI juga memiliki tugas besar dalam melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dalam hal ini, mereka tidak hanya berperan dalam mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan kemerdekaan, tetapi juga melakukan koordinasi antara berbagai kelompok nasionalis dan golongan yang terlibat dalam gerakan kemerdekaan.

### **Peristiwa Penting Menjelang dan Saat Proklamasi Kemerdekaan**

Menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, sejumlah peristiwa penting terjadi yang menggiring bangsa Indonesia menuju titik balik dalam sejarahnya. Di bawah ini akan dijelaskan rangkaian peristiwa penting yang berlangsung sebelum dan pada saat proklamasi, serta peran berbagai tokoh dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia.

#### **a. Persiapan Proklamasi di Rengasdengklok**

Pada 16 Agustus 1945, terjadi ketegangan politik yang melibatkan golongan muda dan golongan tua. Golongan muda yang lebih radikal ingin segera melakukan proklamasi tanpa campur tangan Jepang, sementara golongan tua yang lebih berhati-hati merasa bahwa proklamasi harus dilakukan dalam kerangka yang lebih terstruktur, dengan persetujuan pihak Jepang. Untuk mencegah campur tangan Jepang lebih lanjut, golongan muda yang dipimpin oleh tokoh seperti Sukarno dan Mohammad Hatta dibawa ke Rengasdengklok, sebuah daerah yang relatif jauh dari pengaruh Jepang.

Keputusan untuk membawa Sukarno dan Mohammad Hatta ke Rengasdengklok adalah langkah yang diambil untuk melindungi mereka dari potensi ancaman dan tekanan Jepang yang semakin besar. Di Rengasdengklok, mereka berdua diisolasi untuk



memudahkan persiapan proklamasi tanpa gangguan. Keadaan di Rengasdengklok menunjukkan betapa pentingnya pemuda dalam mendorong kemerdekaan Indonesia dan betapa besarnya ketegangan antara dua golongan ini (Wiharyanto, 2011).

#### **b. Kembalinya Sukarno dan Hatta ke Jakarta**

Pada 17 Agustus 1945, setelah mendapat persetujuan dari golongan tua, Sukarno dan Mohammad Hatta dipulangkan kembali ke Jakarta. Mereka segera menuju rumah Sukarno di Jalan Pegangsaan Timur No. 56, tempat yang telah dipilih untuk membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia.

Pada saat yang bersamaan, situasi politik di Jakarta semakin memanas. Pasukan Jepang yang masih berada di kota ini mulai menyadari bahwa proklamasi kemerdekaan yang akan dilakukan oleh bangsa Indonesia tidak bisa dihalangi lagi. Walaupun tentara Jepang pada umumnya masih ingin mempertahankan kekuasaannya di Indonesia, mereka akhirnya mengakui bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia harus terjadi (Poesponegoro dan Notosusanto, 2019).

#### **c. Penyusunan Teks Proklamasi**

Setelah kembali ke Jakarta, Sukarno dan Mohammad Hatta segera bertemu dengan beberapa tokoh seperti Achmad Soebardjo, Soekarno, dan Sudiro untuk merumuskan teks proklamasi. Pada saat yang bersamaan, Laksamana Tadashi Maeda juga bersedia untuk mendukung proses penyusunan teks proklamasi. Pembicaraan tentang siapa yang harus menandatangani teks proklamasi muncul sebagai masalah krusial.



*Diskusi dengan Pemuda - [www.berdikarionline.com](http://www.berdikarionline.com)*

Pada awalnya, beberapa tokoh yang hadir menginginkan agar teks proklamasi ditandatangani oleh semua tokoh yang terlibat. Namun, dengan pertimbangan strategis, akhirnya disepakati bahwa Sukarno dan Mohammad Hatta yang akan menandatangani teks tersebut atas nama bangsa Indonesia. Penandatanganan oleh kedua tokoh utama ini bertujuan untuk menegaskan bahwa proklamasi kemerdekaan adalah hasil dari perjuangan bangsa Indonesia dan bukan karena pemberian Jepang (Poesponegoro dan Notosusanto, 2019).

#### **d. Pembacaan Teks Proklamasi**

Pada 17 Agustus 1945, setelah teks proklamasi selesai disusun dan disepakati, acara pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan di halaman rumah Sukarno di Jalan Pegangsaan Timur No. 56, Jakarta. Pembacaan ini dilakukan oleh Sukarno, yang diiringi oleh Mohammad Hatta yang berada di sampingnya.

Teks yang dibacakan oleh Sukarno adalah sebagai berikut:

#### **Proklamasi**

"Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain, diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya."

"Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun '05 atas nama bangsa Indonesia"

Soekarno/Hatta

Acara tersebut berlangsung dengan penuh khidmat meskipun sederhana. Begitu teks proklamasi dibacakan, para hadirin yang hadir mulai meneriakkan "Merdeka!". Pengibaran bendera Merah Putih juga dilakukan dengan penuh semangat, simbol dari kemerdekaan yang baru diraih oleh Indonesia setelah berabad-abad dijajah. Upacara ini disaksikan oleh banyak orang yang hadir dan menjadi saksi sejarah bagi bangsa Indonesia.

#### **e. Peran Masyarakat dalam Proklamasi**

Setelah pembacaan teks proklamasi, masyarakat Jakarta dan sekitarnya mulai berbondong-bondong ke Lapangan Ikada untuk ikut menyaksikan kemerdekaan Indonesia secara langsung. Selain itu, berbagai media komunikasi seperti pamflet dan pengeras suara dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi mengenai proklamasi kepada masyarakat luas.

Pengibaran bendera Merah Putih di Lapangan Ikada disertai dengan suara proklamasi yang terus disebarluaskan ke seluruh penjuru Jakarta. Suasana ini menjadi saksi betapa besarnya antusiasme rakyat Indonesia dalam menyambut kemerdekaan yang telah lama dinanti-nantikan (Poesponegoro dan Notosusanto, 2019).

### **Penegasan Pancasila sebagai Dasar Resmi Negara Indonesia**

Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, banyak langkah yang diambil untuk memastikan legitimasi kemerdekaan dan landasan hukum bagi negara yang baru berdiri ini. Salah satu langkah penting yang dilakukan adalah penegasan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Proses ini berlangsung dalam beberapa tahap yang sangat menentukan perjalanan bangsa Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat.



*Penegasan Pancasila -Shutterstock.com/2148340833*

#### **a. Pancasila dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945**

Pancasila pertama kali disepakati sebagai dasar negara Indonesia dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Proses ini dimulai dengan terbentuknya Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPK) yang dibentuk pada 1 Maret 1945 oleh pemerintah Jepang. BPUPK bertugas menyusun berbagai rancangan dasar negara Indonesia, termasuk menyepakati prinsip-prinsip yang akan menjadi dasar konstitusi negara Indonesia merdeka.

Dalam sidang pertama BPUPK yang dilaksanakan pada 28 Mei hingga 1 Juni 1945, berbagai ide dan gagasan mengenai dasar negara yang cocok untuk Indonesia diperdebatkan. Beberapa tokoh, termasuk Sukarno, mengajukan gagasan mengenai sebuah ideologi yang mencakup prinsip-prinsip

dasar untuk negara baru ini. Gagasan ini akhirnya dikenal sebagai Pancasila, yang terdiri dari lima sila yang meliputi:

- 1) Ketuhanan Yang Maha Esa
- 2) Kemanusiaan yang adil dan beradab
- 3) Persatuan Indonesia
- 4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
- 5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Pancasila ini kemudian dituangkan dalam pembukaan UUD 1945, yang menyatakan bahwa Pancasila adalah dasar negara yang akan mendasari segala kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Penetapan Pancasila dalam pembukaan UUD 1945 menunjukkan tekad bangsa Indonesia untuk memujudkan negara yang berlandaskan pada nilai-nilai universal yang dapat diterima oleh seluruh rakyat Indonesia, tanpa memandang perbedaan etnis, agama, dan budaya.

#### **b. Konstitusi Negara dan Pancasila sebagai Dasar Hukum Negara**

Dengan proklamasi kemerdekaan yang disertai dengan pembacaan teks proklamasi pada 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia secara resmi menjadi negara yang merdeka. Namun, untuk memastikan stabilitas negara dan menyusun sistem pemerintahan yang sah, sebuah konstitusi yang jelas sangat diperlukan. Oleh karena itu, setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia segera beralih untuk menegaskan Pancasila sebagai dasar negara dalam bentuk konstitusi yang dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Pada 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang dibentuk untuk melanjutkan tugas BPUPK, melakukan sidang pertama untuk menetapkan UUD 1945. Dalam sidang tersebut, Pancasila diakui dan disahkan sebagai dasar negara yang tidak hanya mencakup ideologi negara tetapi juga menjadi pedoman hidup dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

#### **c. Pancasila dan Keberagaman Indonesia**

Pancasila dipilih sebagai dasar negara Indonesia karena dapat mengakomodasi keberagaman yang ada di Indonesia. Dengan lebih dari 300 suku bangsa dan ratusan bahasa daerah, Indonesia membutuhkan sebuah ideologi yang bisa diterima oleh seluruh rakyat, baik yang beragama Islam, Kristen, Hindu, Budha, maupun yang menganut kepercayaan lainnya. Oleh karena itu, sila pertama yang menyebutkan Ketuhanan Yang Maha Esa mencerminkan penghormatan terhadap berbagai agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia.

Selain itu, sila kedua yang berbunyi Kemanusiaan yang adil dan beradab menegaskan komitmen Indonesia terhadap hak asasi manusia dan kesetaraan sosial bagi seluruh rakyatnya. Pancasila, dengan kelima silanya, memberikan dasar moral dan hukum yang kuat untuk membangun negara yang adil, makmur, dan damai, meskipun negara ini terdiri dari beragam budaya, suku, dan agama.



#### **Jejak Pancasila**

##### **Proklamasi dan Esports**

Komunitas esports Indonesia sering mengadakan turnamen pada 17 Agustus sebagai bentuk perayaan kemerdekaan sambil menegaskan semangat Pancasila dalam membangun persatuan dan kebersamaan di kalangan pemain muda.



*Esports Indonesia – Detik.com*

#### d. Penegasan Pancasila dalam Praktik Kenegaraan

Setelah Pancasila disahkan sebagai dasar negara, penerapannya dalam kehidupan negara dan masyarakat Indonesia berlangsung dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satunya adalah dalam pembentukan lembaga-lembaga negara yang berfungsi untuk menegakkan hukum dan menjaga keseimbangan antara kekuasaan negara dengan hak-hak individu.

Implementasi Pancasila sebagai dasar negara tercermin dalam kebijakan negara yang selalu berusaha untuk menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Misalnya, pada masa orde baru, Pancasila dijadikan sebagai alat untuk mempererat persatuan dan kesatuan bangsa serta menguatkan rasa nasionalisme dalam menghadapi tantangan politik global dan konflik internal.

Namun, seiring dengan perubahan zaman, penghayatan terhadap Pancasila juga terus berkembang. Setelah reformasi 1998, penegasan Pancasila sebagai dasar negara kembali mendapat perhatian penting dalam konteks demokratisasi dan otonomi daerah. Pancasila kembali menjadi dasar moral untuk memastikan negara tetap berada dalam jalur yang benar, yakni menjunjung tinggi demokrasi, keadilan, dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

#### Contoh Soal

Pada Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, apa yang tercantum dalam teks Proklamasi mengenai pemindahan kekuasaan?

- A. "Pemindahan kekuasaan akan dilakukan dalam waktu yang lama"
- B. "Pemindahan kekuasaan akan dilakukan dengan cara damai dan cepat"
- C. "Pemindahan kekuasaan akan dilakukan dengan cara revolusi"
- D. "Pemindahan kekuasaan harus menunggu keputusan dari Jepang"
- E. "Pemindahan kekuasaan akan dilakukan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya"

Jawaban: E. "Pemindahan kekuasaan akan dilakukan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya"

Pembahasan: Teks Proklamasi yang dibacakan oleh Ir. Soekarno menyatakan bahwa pemindahan kekuasaan dan segala urusan yang menyangkut pemerintahan akan dilaksanakan dengan cara yang saksama dan secepat mungkin. Hal ini mencerminkan tekad bangsa Indonesia untuk segera mengatur dan mengelola negara mereka setelah merdeka.

## Rangkuman

Bab ini mengungkapkan perjalanan panjang dan proses bersejarah yang mengarah pada lahirnya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Dimulai dari gagasan yang muncul dalam sidang BPUPK pada tahun 1945, Pancasila diusulkan oleh Ir. Soekarno sebagai dasar negara yang mampu menyatukan beragam suku, agama, dan budaya di Indonesia. Dalam sidang ini, kelima sila Pancasila pertama kali diperkenalkan dengan tujuan untuk menciptakan negara yang berdiri atas prinsip kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Meskipun terdapat perdebatan tentang istilah-istilah tertentu, terutama dalam sila pertama, gagasan ini diterima oleh sebagian besar anggota BPUPK sebagai dasar negara yang inklusif.

Setelah Piagam Jakarta disusun oleh Panitia Sembilan dan mengalami beberapa perubahan, Pancasila akhirnya disahkan sebagai dasar negara dalam sidang PPKI pada 18 Agustus 1945, sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dibacakan. Proklamasi ini bukan hanya menandakan kemerdekaan Indonesia, tetapi juga mengokohkan Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia. Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai ideologi negara, tetapi juga sebagai prinsip yang menyatukan dan mengarahkan bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan negara yang adil dan makmur. Dengan demikian, lahirnya Pancasila sebagai dasar negara menandai awal dari perjalanan Indonesia sebagai negara yang merdeka, berdaulat, dan demokratis.

## Latihan Soal

1. Siapa yang pertama kali mengemukakan gagasan dasar negara Indonesia dalam sidang BPUPK?
  - A. Mr. Muhammad Yamin
  - B. Ir. Soekarno
  - C. Dr. Soepomo
  - D. Mohammad Hatta
  - E. Ki Hadjar Dewantara
  
2. Apa tujuan utama dibentuknya Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPK)?
  - A. Menyusun dasar negara Indonesia
  - B. Menetapkan Presiden Indonesia
  - C. Menyusun Proklamasi Kemerdekaan
  - D. Mengatur pembagian wilayah Indonesia
  - E. Membentuk sistem peradilan negara
  
3. Apa yang dimaksud dengan PPKI yang dibentuk pada 7 Agustus 1945?
  - A. Panitia Pembentukan Konstitusi Indonesia
  - B. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
  - C. Panitia Perjuangan Kemerdekaan Indonesia
  - D. Panitia Pengawas Kemerdekaan Indonesia
  - E. Panitia Perumusan Dasar Negara
  
4. Apa yang menjadi tugas utama dari PPKI setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia?
  - A. Menyusun dasar negara
  - B. Mengatur pembagian kekuasaan
  - C. Menyusun konstitusi Indonesia
  - D. Mengesahkan Proklamasi Kemerdekaan
  - E. Menyusun naskah Piagam Jakarta

5. Apa perubahan besar yang terjadi dalam Piagam Jakarta yang disusun oleh Panitia Sembilan?
- A. Penambahan kata "Islam" dalam sila pertama
  - B. Penghapusan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya
  - C. Penggantian sistem pemerintahan menjadi monarki
  - D. Penghapusan sila pertama
  - E. Penambahan sila tentang pendidikan
6. Apa nama dokumen yang disusun oleh Panitia Sembilan dan menjadi dasar negara Indonesia?
- A. Piagam Jakarta
  - B. Undang-Undang Dasar 1945
  - C. Proklamasi Kemerdekaan
  - D. Deklarasi Kemerdekaan
  - E. Konstitusi 1945
7. Pada saat Proklamasi Kemerdekaan, di mana teks proklamasi dibacakan?
- A. Istana Merdeka
  - B. Jalan Pegangsaan Timur No. 56, Jakarta
  - C. Lapangan Ikada
  - D. Gedung Sate
  - E. Balai Kota Jakarta

**Akses latihan soal  
lainnya di sini yuk!**



## Referensi

Afandi, A. (2020). Pancasila dalam Sejarah dan Realitas. Jakarta: Penerbit Grasindo.

Anderson, B. R. O. G. (2006). *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*. London: Verso.

Kartodirdjo, S. (1991). *Pendudukan Jepang di Indonesia: Suatu Studi tentang Politik dan Ekonomi*. Jakarta: Balai Pustaka.

Poesponegoro, M., & Notosusanto, N. (2019). *Sejarah Nasional Indonesia: Jilid VI*. Jakarta: Balai Pustaka.

Ricklefs, M. C. (2001). *A History of Modern Indonesia Since c. 1300*. Stanford: Stanford University Press.

Suryokusumo, P. (2016). *Politik dan Perjuangan Kemerdekaan Indonesia*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Wiharyanto, S. (2011). *Memahami Sejarah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

## BAB 2

# IMPLEMENTASI NILAI PANCASILA DALAM KEHIDUPAN

### Karakter Pelajar Pancasila

**Bergotong royong:** Membangun kerja sama dengan anggota kelompok untuk mencapai tujuan bersama berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

**Bernalar kritis:** Menganalisis dan mengajukan pertanyaan kritis mengenai penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

**Kreatif:** Mengembangkan pemikiran yang fleksibel dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai situasi.

**Kata Kunci:** Pancasila, Nilai, Norma, Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Permasyarakatan, Keadilan, Identitas Bangsa.

### Tujuan Pembelajaran: Mengetahui, Mempelajari dan Mengamalkan Pancasila

#### 1. Memahami Dasar-Dasar Nilai Pancasila

- ▷ Menyusun pemahaman tentang nilai dasar Pancasila
- ▷ Mengidentifikasi hubungan nilai-nilai Pancasila dengan kehidupan sehari-hari.

#### 2. Menjelaskan Makna yang Terkandung dalam Setiap Sila Pancasila

- ▷ Menguraikan arti penting yang ada pada masing-masing sila dalam Pancasila
- ▷ Menjelaskan kontribusi setiap sila dalam membentuk karakter bangsa.

### **3. Menganalisis Keterkaitan Nilai-Nilai dalam Setiap Sila sebagai Kesatuan**

- ▷ Menyimpulkan keterkaitan antara nilai-nilai dalam setiap sila Pancasila
- ▷ Menganalisis hubungan antar sila Pancasila dalam membangun identitas nasional

### **4. Mengaplikasikan Nilai-Nilai Pancasila dalam Aktivitas Sehari-hari**

- ▷ Menunjukkan penerapan nilai-nilai Pancasila di berbagai aspek kehidupan
- ▷ Mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam interaksi sosial, politik, dan ekonomi



**F I T R I**



## 1. Definisi dan Karakteristik Nilai-Nilai Pancasila



Patung Garuda – [www.istockphoto.com/692081146](http://www.istockphoto.com/692081146)

Pancasila adalah ideologi yang mendasari negara Indonesia. Di dalamnya terkandung nilai-nilai yang menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam konteks filosofi, nilai-nilai Pancasila tidak hanya dapat dipahami sebagai seperangkat prinsip yang berlaku dalam kehidupan negara, tetapi juga sebagai dasar moral yang menuntun setiap individu dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu, untuk memahami penerapan Pancasila, sangat penting untuk mengetahui apa itu nilai-nilai Pancasila, serta karakteristik yang dimilikinya.

### Pengertian Nilai-Nilai Pancasila Menurut Berbagai Ahli

Secara umum, nilai merujuk pada sesuatu yang dianggap berharga atau penting dalam kehidupan manusia. Menurut Henry Pratt Fairchild dalam *Dictionary of Sociology and Related Sciences*, nilai adalah kemampuan individu untuk mempercayai suatu hal yang bertujuan untuk memuaskan keinginan atau hasrat mereka. Artinya, nilai mengacu pada kapasitas manusia dalam memilih atau menilai sesuatu yang memberikan manfaat atau kepuasan bagi dirinya.

Selain itu, George Theodorson dan Achilles Theodorson dalam *A Modern Dictionary of Sociology* menjelaskan bahwa nilai adalah suatu prinsip yang mendasari perilaku manusia. Nilai ini memengaruhi tindakan seseorang dalam kelompok sosialnya, serta berfungsi sebagai standar untuk menilai baik atau buruknya suatu tindakan. Proses penilaian ini didasarkan pada norma-norma sosial yang berlaku dalam suatu masyarakat, yang mencakup berbagai dimensi, mulai dari moral, sosial, hingga keagamaan.

Dalam konteks Pancasila, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tidak hanya berlaku dalam tatanan hukum negara, tetapi juga menyentuh aspek moral, sosial, dan spiritual kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menyatukan berbagai elemen masyarakat Indonesia yang memiliki latar belakang budaya, agama, dan etnis yang berbeda-beda, secara umum, merujuk pada sesuatu yang dianggap penting atau berharga dalam kehidupan manusia. Para ahli memiliki berbagai pandangan tentang apa itu nilai. Menurut Henry Pratt Fairchild dalam *Dictionary of Sociology and Related Sciences*, nilai adalah kemampuan manusia untuk mempercayai sesuatu demi memenuhi keinginannya, yang merujuk pada kapasitas yang diyakini seseorang dari suatu objek untuk memuaskan hasrat manusia. Sementara itu, George Theodorson dan Achilles Theodorson dalam *A Modern Dictionary of Sociology* menggambarkan nilai sebagai asas yang mendasari perilaku yang bersifat abstrak, namun mempengaruhi tindakan individu dalam kelompok sosial.

## Kategori Nilai-Nilai yang Terkandung dalam Pancasila

Dalam konteks Pancasila, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tidak hanya menyentuh satu aspek kehidupan, melainkan melibatkan berbagai dimensi yang membentuk dasar kehidupan sosial, politik, dan spiritual di Indonesia.

Menurut Notoatmodjo, nilai-nilai tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori utama yang saling terkait, yaitu nilai material, nilai vital, dan nilai kerohanian. Masing-masing kategori nilai ini memiliki peran penting dalam membentuk pola pikir dan perilaku manusia dalam mewujudkan tujuan bersama, yaitu kehidupan yang lebih adil, sejahtera, dan beradab.

### a. Nilai Material

Nilai material berhubungan dengan kebutuhan jasmani manusia yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan fisik dan ekonominya. Dalam hal ini, nilai material mencakup segala hal yang dapat mempengaruhi kualitas hidup secara fisik, seperti sandang, pangan, papan, serta kebutuhan dasar manusia lainnya. Nilai material ini penting karena manusia memerlukan sumber daya untuk menjalani kehidupan sehari-hari dan berpartisipasi dalam berbagai aktivitas sosial. Namun, Pancasila mengingatkan kita bahwa meskipun nilai material sangat diperlukan untuk keberlangsungan hidup, pemenuhan kebutuhan ini harus tetap sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan sosial yang terkandung dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

### b. Nilai Vital

Nilai vital berhubungan dengan kelangsungan hidup manusia dalam aspek yang lebih mendalam. Dalam kategori ini, nilai vital mencakup hal-hal yang mendukung keberlanjutan hidup secara sosial, fisik, dan mental, seperti kesehatan, pendidikan, dan kebebasan dalam menjalani aktivitas. Pancasila mengajarkan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mendapatkan kesempatan dalam bidang vital ini, yang berkontribusi pada pengembangan kualitas hidup yang lebih baik. Pemberian akses yang setara bagi setiap individu dalam bidang vital ini adalah cerminan dari sila-sila Pancasila yang mengutamakan pemerataan dan keadilan bagi seluruh rakyat.

### c. Nilai Kerohanian

Nilai kerohanian adalah nilai yang berkaitan dengan aspek batin manusia, yaitu terkait dengan agama, moralitas, etika, dan hubungan manusia dengan Tuhan. Nilai-nilai kerohanian ini mempengaruhi bagaimana seseorang menjalani kehidupan dalam kerangka etika yang tinggi, berperilaku berdasarkan ajaran agama, dan menjaga hubungan yang harmonis antar sesama. Sila pertama, yang berbicara tentang Ketuhanan Yang Maha Esa, adalah manifestasi utama dari nilai kerohanian dalam Pancasila. Nilai ini mengajarkan bahwa kehidupan beragama dan spiritual harus dihormati dan dijadikan pedoman dalam setiap tindakan yang diambil oleh individu dan kelompok dalam masyarakat.

Sebagai bagian penting dari kategori nilai dalam Pancasila, nilai kerohanian memiliki peran yang sangat signifikan dalam membentuk kehidupan moral dan etika bangsa Indonesia. Menurut Darmodiharjo dan Shidarta (2006), nilai kerohanian mencakup beberapa elemen dasar, yaitu nilai kebenaran, nilai keindahan, nilai kebaikan moral, dan nilai religius. Masing-masing nilai ini mengandung prinsip-prinsip yang menjadi pedoman bagi individu dalam berinteraksi dengan sesama dan menjaga hubungan harmonis dalam kehidupan bermasyarakat.



▷ **Nilai Kebenaran**

Nilai kebenaran berkaitan dengan pencarian dan penerimaan atas kenyataan yang ada di dunia ini, yang didasari oleh akal budi manusia. Dalam konteks Pancasila, pencarian kebenaran ini merupakan salah satu landasan yang harus dijunjung tinggi oleh setiap warga negara Indonesia. Nilai kebenaran mengajarkan bahwa manusia harus selalu berusaha untuk menemukan dan menerima fakta yang sesuai dengan kenyataan, tanpa ada upaya untuk menyelewengkan atau menyembunyikan kebenaran demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Dalam kehidupan sehari-hari, nilai kebenaran ini tercermin dalam sikap transparansi dan kejujuran, baik dalam hubungan pribadi maupun dalam kebijakan pemerintahan. Misalnya, dalam dunia politik, pengambilan keputusan yang berdasarkan pada kebenaran yang objektif sangat diperlukan agar kebijakan yang dihasilkan dapat bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Kebenaran juga menjadi pedoman dalam kehidupan beragama, di mana setiap individu diharapkan dapat memegang teguh ajaran agama dengan tulus, tanpa menyimpang dari prinsip dasar yang diyakini.

▷ **Nilai Keindahan**



*Keindahan Budaya – istockphoto.com/1168953845*

Nilai keindahan dalam Pancasila mengacu pada penghargaan terhadap estetika dan harmoni yang ada dalam kehidupan manusia. Keindahan tidak hanya terbatas pada bentuk fisik atau seni, tetapi juga mencakup keindahan dalam pikiran, perasaan, dan tindakan. Dalam pengertian yang lebih luas, nilai keindahan adalah kemampuan manusia untuk menciptakan sesuatu yang baik dan indah, baik dalam konteks sosial, budaya, maupun spiritual.

Keindahan dalam kehidupan sosial bisa terlihat dalam hubungan antar sesama yang penuh rasa hormat, toleransi, dan saling menghargai. Keindahan dalam berinteraksi antar individu di masyarakat menciptakan suasana yang harmonis, di mana perbedaan pendapat dan latar belakang budaya dapat dihargai dengan penuh kedamaian. Keindahan dalam beragama tercermin pada sikap saling menghormati antar umat beragama, serta menghargai keberagaman dalam kehidupan sosial.

▷ **Nilai Kebaikan Moral**

Nilai kebaikan moral berkaitan dengan penerapan prinsip-prinsip moral yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat. Nilai ini menekankan pentingnya sikap jujur, adil, bertanggung jawab, dan saling membantu antar sesama. Dalam konteks Pancasila, kebaikan moral sangat erat kaitannya dengan penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan solidaritas.

Sebagai contoh, dalam sila kedua Pancasila yang mengajarkan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, setiap individu diajak untuk mengedepankan rasa keadilan dan belas kasih terhadap orang lain, tanpa membedakan status sosial, agama, ras, atau etnis. Nilai kebaikan moral ini mengajarkan kita untuk selalu berbuat baik, berperilaku dengan etika yang baik, dan menjaga keharmonisan dalam kehidupan bersama.

Nilai kebaikan moral juga mengajarkan pentingnya empati, yaitu kemampuan untuk merasakan dan memahami perasaan orang lain. Sikap empati ini memungkinkan terjadinya kerjasama yang baik dalam masyarakat, di mana setiap individu bekerja sama untuk kepentingan bersama dan saling mendukung dalam mencapai kesejahteraan.

### ▷ Nilai Religius

Nilai religius adalah nilai yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhan, serta penerapan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Pancasila, nilai religius sangat penting karena Pancasila didasarkan pada keyakinan akan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang mengajarkan pentingnya menghormati hak beragama setiap individu dan menjaga kebebasan dalam menjalani ajaran agama masing-masing.

Nilai religius ini mencakup pengamalan ajaran agama yang berfokus pada pencapaian kehidupan yang lebih baik, tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Penerapan nilai religius dapat dilihat dalam sikap hormat terhadap perbedaan agama, menjaga hubungan yang harmonis antar umat beragama, serta melaksanakan kewajiban agama dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.

Di tingkat pribadi, nilai religius tercermin dalam ibadah yang dilakukan dengan ikhlas, serta dalam upaya untuk selalu mendekatkan diri kepada Tuhan melalui doa, amal, dan perbuatan baik. Dalam kehidupan sosial, nilai religius juga tercermin dalam upaya untuk menumbuhkan rasa saling menghormati dan hidup berdampingan dengan damai meskipun memiliki keyakinan yang berbeda-beda.

## Ciri Nilai-Nilai Pancasila

Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar negara, tetapi juga memberikan panduan hidup yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ciri-ciri nilai Pancasila menjadi kunci untuk memahami bagaimana nilai-nilai ini mengatur kehidupan sosial, moral, dan budaya bangsa Indonesia. Adapun ciri-ciri nilai Pancasila adalah sebagai berikut:

### a. Struktur Nilai yang Bersifat Hierarkis dan Piramidal

Pancasila memiliki struktur nilai yang bersifat hierarkis dan piramidal, yang berarti bahwa setiap sila dalam Pancasila terhubung dan mendasari satu sama lain. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila disusun dalam urutan tertentu, di mana sila pertama menjadi dasar bagi sila-sila berikutnya. Hal ini menggambarkan hubungan yang saling terkait antara satu sila dengan sila lainnya, membentuk suatu sistem yang utuh dan tidak terpisahkan. Struktur ini menunjukkan bahwa sila pertama berfungsi sebagai fondasi moral dan spiritual yang mengarahkan penerapan nilai-nilai dalam sila-sila selanjutnya.



## Jejak Pancasila

### Nilai Pancasila = Nilai "All in One"

Jika biasanya kita mengunduh banyak aplikasi untuk tujuan yang berbeda-beda (edit foto, e-wallet, belajar), Pancasila itu seperti *super-app*-nya kehidupan Indonesia. Nilai-nilainya menyentuh semua aspek hidup seperti, kebutuhan fisik (material), aktivitas harian (vital), sampai spiritualitas (kerohanian). Satu nilai, tapi aplikatif ke mana-mana!



Contoh Aplikasi Editing - [istockphoto.com](https://www.istockphoto.com)

Menurut Notonagoro, struktur piramidal Pancasila menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila disusun dalam tingkatan yang memiliki urutan dan prioritas tertentu. Setiap tingkat atau sila yang ada tidak hanya berdiri sendiri, tetapi saling menguatkan dan melengkapi satu sama lain. Dengan demikian, sila pertama tentang Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi dasar dari sila-sila lainnya yang mencakup nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Struktur piramidal ini dapat digambarkan dengan cara berikut:

- 1) Sila pertama: Menjadi dasar yang mendasari dan memberi inspirasi bagi penerapan nilai-nilai dalam sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima.
- 2) Sila kedua: Didukung oleh sila pertama dan berfungsi untuk membentuk sikap saling menghargai dan menghormati antar sesama, yang juga menyentuh sila ketiga, keempat, dan kelima.
- 3) Sila ketiga: Didasari oleh sila pertama dan kedua serta membentuk landasan bagi tercapainya persatuan yang lebih kuat, yang mempengaruhi sila keempat dan kelima.
- 4) Sila keempat: Didukung oleh sila pertama, kedua, dan ketiga, serta menjadi landasan bagi penerapan sistem demokrasi yang mengedepankan musyawarah dan mufakat dalam kehidupan bermasyarakat.
- 5) Sila kelima: Merupakan implementasi akhir dari semua sila sebelumnya, yang berfokus pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan mengintegrasikan nilai-nilai dari sila pertama hingga keempat.

Struktur ini menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila tidak bisa diterapkan secara terpisah-pisah. Setiap sila saling terkait dan membentuk satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Konsep piramidal ini memperlihatkan bahwa pengamalan Pancasila harus dilakukan dengan mempertimbangkan setiap sila dalam urutannya, di mana setiap sila menguatkan dan menyempurnakan sila lainnya. Selain itu, sistem piramidal ini juga menunjukkan dua dimensi penting:

- 1) Dimensi kuantitatif: Menunjukkan urutan sila secara berjenjang yang saling mendukung. Sila pertama yang bersifat fundamental menjadi dasar dari seluruh sistem nilai lainnya.
- 2) Dimensi kualitatif: Menunjukkan kualitas dari setiap sila yang semakin berkembang dan mendalam. Sila pertama memberikan kualitas spiritual dan moral yang kemudian diperluas pada sila-sila berikutnya, seperti kemanusiaan yang beradab, persatuan, dan keadilan.

Dengan demikian, struktur hierarkis dan piramidal Pancasila mencerminkan tatanan nilai yang tidak hanya menjelaskan hubungan antar sila, tetapi juga memberikan petunjuk bagaimana setiap sila harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan saling mendukung satu sama lain.

#### **b. Menyentuh Aspek Objektif dan Subjektif**

Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia, memiliki nilai-nilai yang tidak hanya bersifat objektif, tetapi juga subjektif. Ini menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai Pancasila mencakup dua dimensi yang saling berhubungan: dimensi yang dapat diterapkan secara konkret dalam kehidupan sosial (objektif), dan dimensi yang lebih mengarah pada penghayatan pribadi, moral, dan etika (subjektif). Kedua aspek ini saling melengkapi untuk membentuk sistem nilai yang menyeluruh.

##### **1) Aspek Objektif**

Nilai objektif dalam Pancasila merujuk pada sifat-sifat yang berkaitan dengan kenyataan yang dapat diukur, umum, dan universal. Nilai-nilai ini dapat diterjemahkan ke dalam bentuk aturan atau norma yang berlaku dalam tatanan negara dan masyarakat. Sifat objektif ini juga berhubungan dengan penerapan hukum dan kebijakan negara yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila.

Misalnya, sila kelima, yang berbicara tentang Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, mencerminkan penerapan nilai objektif dalam kebijakan sosial dan ekonomi yang harus memastikan adanya pemerataan kesejahteraan di seluruh lapisan masyarakat. Begitu pula dengan sila keempat, yang berkaitan dengan Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, yang menuntut diterapkannya prinsip-prinsip demokrasi dalam sistem pemerintahan dan kehidupan politik Indonesia.



*Gedung Mahkamah Konstitusi - istockphoto.com/869645294*

Pancasila dalam aspek objektif juga berfungsi sebagai norma fundamental negara yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam sistem hukum Indonesia. Nilai-nilai ini tidak hanya memandu kehidupan berbangsa tetapi juga menjadi landasan dalam pembuatan kebijakan, penegakan hukum, dan pembentukan struktur sosial negara.

## **2) Aspek Subjektif**

Sementara itu, nilai subjektif dalam Pancasila berkaitan dengan dimensi batin dan moralitas individu. Nilai-nilai ini mencakup bagaimana setiap individu menginternalisasi dan menerapkan prinsip-prinsip Pancasila dalam kehidupan pribadi mereka. Nilai subjektif ini sangat dipengaruhi oleh pemahaman pribadi setiap orang terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, yang kemudian diterjemahkan dalam sikap, perilaku, dan tindakan sehari-hari.

Sebagai contoh, sila pertama, yang berbicara tentang Ketuhanan Yang Maha Esa, menyentuh aspek subjektif dalam hal penghayatan spiritual setiap individu terhadap Tuhan. Ini mencakup bagaimana individu menjalani kehidupan berdasarkan ajaran agamanya, dengan rasa hormat terhadap kebebasan beragama orang lain. Begitu pula dengan sila kedua, yang menekankan pada Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, yang mendorong setiap orang untuk mengedepankan rasa empati, keadilan, dan kesetaraan dalam berinteraksi dengan sesama manusia.

Nilai-nilai subjektif dalam Pancasila juga mencerminkan pandangan hidup yang berkembang dalam masyarakat Indonesia, yang dilandasi oleh sejarah, budaya, dan filsafat bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup yang bersumber dari pemikiran dan pengalaman bangsa Indonesia, mendorong setiap individu untuk berperilaku sesuai dengan prinsip-prinsip moral yang terkandung dalam Pancasila, serta untuk memperlakukan orang lain dengan rasa hormat dan penuh pengertian.

### **c. Bersifat Mutlak atau Absolut**

Nilai-nilai Pancasila dapat dikatakan bersifat mutlak atau absolut, yang artinya nilai-nilai tersebut tidak akan berubah sepanjang waktu. Pancasila bukanlah hasil pemikiran yang bisa diubah atau disesuaikan dengan perkembangan zaman atau kepentingan politik sesaat. Sebaliknya, Pancasila merupakan hasil penggalian dari budaya bangsa Indonesia yang tersebar di seluruh wilayah Nusantara. Nilai-nilai ini berasal dari adat istiadat, kebudayaan, kepercayaan, dan agama yang telah ada dan mengakar di bumi Nusantara sejak berabad-abad lalu.

Sebagai nilai yang absolut, Pancasila menjadi pedoman hidup yang tetap dan tidak dapat diganggu gugat. Kebenaran yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila tidak bisa dipertanyakan atau

digantikan, karena telah diterima oleh seluruh bangsa Indonesia sebagai prinsip dasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini tercermin dalam berbagai aspek kehidupan bangsa, seperti pada masa pra-sejarah, di mana nilai-nilai ini sudah ada dalam kehidupan nenek moyang Indonesia, melalui berbagai praktik budaya dan kepercayaan yang berkembang di berbagai daerah di Nusantara.

Sebagai contoh, nilai ketuhanan yang terkandung dalam sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, bersifat mutlak karena mengharuskan seluruh rakyat Indonesia untuk menghormati keberagaman agama yang ada, tanpa ada kompromi terhadap prinsip dasar ini. Begitu pula dengan nilai kemanusiaan dalam sila kedua, yang mengajak setiap individu untuk menghormati hak asasi manusia dengan penuh kasih sayang dan rasa keadilan.



*Berbagai Adat di Indonesia – Jurnalpost.com*

Sebagai nilai yang bersifat absolut, Pancasila juga mengajarkan pentingnya persatuan bangsa yang mencakup seluruh rakyat Indonesia, tanpa membedakan latar belakang etnis, agama, ataupun budaya. Nilai ini mengajarkan bahwa setiap individu harus menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau kelompok.

Dalam konteks keadilan sosial yang ada pada sila kelima, Pancasila mendorong kita untuk mewujudkan pemerataan dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik yang berlandaskan pada prinsip-prinsip yang tidak bisa diubah oleh kepentingan apapun. Nilai ini mengingatkan kita untuk bekerja bersama dalam menciptakan

masyarakat yang adil dan makmur, dengan mengutamakan kesejahteraan bersama, bukan hanya untuk kelompok tertentu.

Sebagai dasar negara yang tidak dapat diubah, Pancasila adalah pedoman yang menjadi titik tolak bagi seluruh kebijakan negara. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya telah diakui oleh para pendiri bangsa sebagai prinsip dasar yang harus dijaga dan diterapkan oleh setiap generasi. Hal ini tercermin dalam Pembukaan UUD 1945 yang menegaskan bahwa Pancasila adalah dasar negara yang tidak bisa digantikan atau disesuaikan dengan ideologi atau sistem lainnya.

Dengan demikian, Pancasila sebagai nilai yang mutlak menuntut agar setiap warga negara Indonesia tidak hanya memahami, tetapi juga mengamalkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai Pancasila yang bersifat absolut ini menuntut kejujuran dan komitmen setiap individu untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik, penuh kedamaian, saling menghormati, dan menjunjung tinggi keadilan sosial.

### **Bentuk Penerapan Nyata Nilai-Nilai Pancasila dalam Kehidupan**

Nilai-nilai Pancasila memberikan pedoman hidup yang tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga praktis dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia dapat dilihat melalui tiga bentuk utama, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Setiap bentuk penerapan nilai ini memiliki peranannya masing-masing yang saling mendukung dalam mewujudkan kehidupan yang lebih adil, makmur, dan sejahtera.

### a. Nilai Dasar

Nilai dasar adalah prinsip-prinsip fundamental yang bersifat sangat abstrak dan tetap, terlepas dari pengaruh perubahan waktu. Nilai dasar tidak terikat pada ruang dan waktu tertentu, serta tidak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi sosial yang berkembang. Nilai dasar mencerminkan kebenaran yang dapat diterima oleh semua pihak tanpa perlu pembuktian lebih lanjut (aksiomatik). Contoh penerapan nilai dasar dalam kehidupan sehari-hari:

- 1) Sila pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa menekankan pada pentingnya pengakuan terhadap Tuhan, yang diterjemahkan dalam sikap hidup yang spiritual dan penuh pengertian terhadap sesama. Penghormatan terhadap agama dan keyakinan masing-masing umat beragama adalah salah satu penerapan dari nilai dasar ini.
- 2) Sila kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menuntut kita untuk memperlakukan setiap individu dengan penuh martabat dan adil. Prinsip dasar ini mengarahkan sikap kita untuk menghormati hak asasi manusia dan bertindak berdasarkan empati dan keadilan.

### b. Nilai Instrumental

Nilai instrumental adalah penjabaran lebih lanjut dari nilai dasar yang mengarah pada tindakan konkret yang sesuai dengan situasi atau kondisi tertentu. Nilai ini bertindak sebagai pedoman praktis yang dapat dijalankan dalam berbagai konteks kehidupan sehari-hari, sesuai dengan tuntutan zaman dan kebutuhan sosial. Contoh penerapan nilai instrumental dalam kehidupan sehari-hari:

- 1) Sila ketiga: Persatuan Indonesia dapat diterjemahkan melalui tindakan yang mendukung persatuan bangsa, seperti menanggulangi isu-isu yang memecah belah masyarakat, menjaga keharmonisan antar etnis, agama, dan budaya, serta meningkatkan rasa solidaritas di antara seluruh elemen bangsa.
- 2) Sila keempat: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan menunjukkan pentingnya musyawarah dalam pengambilan keputusan, baik dalam keluarga, masyarakat, maupun negara. Penerapan nilai ini dapat dilihat dalam setiap keputusan bersama yang diambil dengan penuh kebijaksanaan dan mengedepankan kepentingan bersama.

### c. Nilai Praksis

Nilai praksis adalah penerapan langsung dari nilai dasar dan instrumental dalam tindakan nyata yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Nilai ini mengarah pada langkah-langkah yang konkret dan spesifik untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam tindakan sehari-hari, baik dalam lingkungan sosial, politik, maupun pribadi. Contoh penerapan nilai praksis dalam kehidupan sehari-hari ada pada Sila kelima Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia yaitu menuntut agar keadilan sosial tidak hanya ada dalam teori, tetapi juga dalam praktik. Penerapan nilai ini dapat dilihat pada kebijakan sosial yang memberikan akses yang setara dalam pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja untuk semua warga negara.

Penerapan nilai praksis dalam kehidupan keluarga bisa berupa sikap saling menghargai antar anggota keluarga, menjaga kesejahteraan bersama, serta memastikan bahwa setiap anggota keluarga mendapatkan haknya yang setara. Dalam masyarakat, ini tercermin dalam kegiatan gotong royong atau dalam partisipasi aktif dalam program-program pembangunan yang mengutamakan kepentingan bersama.

Jika penerapan nilai-nilai dasar dan instrumental cenderung bersifat teoretis, maka nilai praksis adalah realisasi dari nilai-nilai tersebut dalam tindakan sehari-hari. Penerapan nilai praksis ini tidak hanya melibatkan kebijakan atau keputusan besar, tetapi juga perilaku individu dalam interaksi sosial yang secara langsung mempengaruhi hubungan antar sesama.

### Contoh Soal

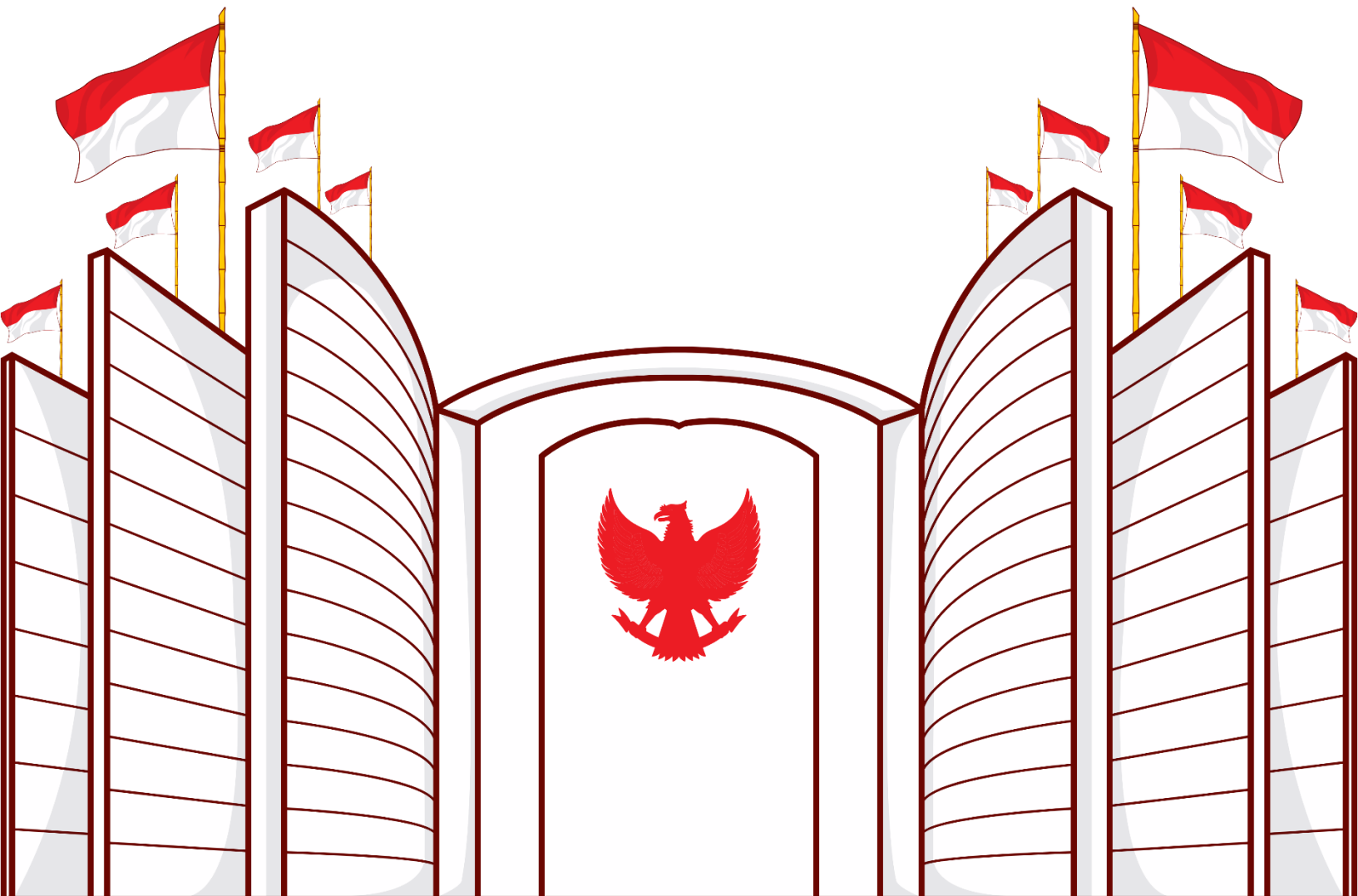
Berikut ini yang merupakan ciri khas nilai-nilai Pancasila adalah...

- A. Tidak memiliki keterkaitan antara satu sila dengan sila lainnya
- B. Bersifat tetap dan tidak dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman
- C. Bersifat hierarkis dan piramidal
- D. Hanya berlaku dalam konteks hukum dan politik

Jawaban: C. Bersifat hierarkis dan piramidal

Pembahasan:

Ciri nilai Pancasila bersifat hierarkis dan piramidal, artinya kelima sila memiliki keterkaitan satu sama lain dan tersusun secara berjenjang. Sila pertama menjadi dasar dari sila-sila berikutnya, dan setiap sila mendukung serta memperkuat sila lainnya. Ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila tidak berdiri sendiri, melainkan membentuk satu kesatuan yang utuh.





## 2. Makna yang Terkandung pada Sila-Sila Pancasila



*Nilai Pancasila –Merdeka.com*

### **Ketuhanan Yang Maha Esa**

Ketuhanan Yang Maha Esa adalah sila pertama dalam Pancasila yang mendasari nilai-nilai spiritual dan moral bangsa Indonesia. Sejak zaman dahulu, bangsa Indonesia sudah mengenal dan mempraktikkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari, yang tercermin dalam kebiasaan adat istiadat, kebudayaan, serta nilai-nilai agama yang ada. Nilai ini tidak hanya mengajarkan pengakuan terhadap Tuhan sebagai sumber kehidupan, tetapi juga menghormati dan menghargai keberagaman keyakinan yang ada di Indonesia.

#### **a. Sejarah Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Indonesia**

Pada masa perumusan dasar negara, nilai Ketuhanan Yang Maha Esa telah diterima dengan sangat kuat dalam masyarakat Indonesia, bahkan hampir semua tokoh yang hadir dalam sidang BPUPK (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) pada tahun 1945 sepakat bahwa nilai ketuhanan harus dijadikan sebagai *causa materialis* (asal mula bahan) dalam pembentukan dasar negara (Kaelan, 2018). Oleh karena itu, sila pertama Pancasila ini sangat penting sebagai fondasi moral bagi pembentukan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat.

#### **a. Makna dan Peran Ketuhanan Yang Maha Esa**

Makna dari Ketuhanan Yang Maha Esa sangat mendalam dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Sila ini tidak hanya berfungsi sebagai prinsip dasar yang memandu kehidupan beragama di Indonesia, tetapi juga sebagai pendorong semangat untuk membangun kehidupan yang adil, damai, dan harmonis, dengan mengedepankan rasa toleransi dan saling menghargai antar umat beragama. Sila ini memperkuat komitmen bangsa Indonesia untuk melaksanakan kehidupan publik dan politik yang berlandaskan pada nilai moral dan budi pekerti yang luhur.

#### **b. Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Konteks Epistemologi**

Dalam konteks epistemologi atau ilmu pengetahuan, sila Ketuhanan Yang Maha Esa mengajarkan bahwa Tuhan merupakan *causa prima*, yaitu penyebab utama dari segala sesuatu yang ada, yang tidak disebabkan oleh penyebab lain (Rindjin, 2012). Tuhan dalam konteks ini dipandang sebagai sumber dari segala kebaikan, keadilan, dan kehidupan itu sendiri, sementara manusia sebagai ciptaan-Nya memiliki kewajiban untuk bersyukur dan menjalankan kehidupan berdasarkan nilai-nilai yang diajarkan-Nya.

#### **c. Negara Indonesia dan Pengakuan terhadap Pluralisme Agama**

Secara filosofis, sila pertama ini juga mengandung pengertian bahwa negara Indonesia adalah negara yang mengakui pluralisme agama. Setiap warga negara diberikan kebebasan untuk memeluk agama dan keyakinannya masing-masing, sesuai dengan keyakinan batin mereka. Hal ini tercermin dalam pasal-pasal dalam UUD 1945 yang mengatur kebebasan beragama di Indonesia. Indonesia sebagai negara yang plural, dengan beragam agama, suku, dan budaya, menjadikan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar moral yang mengikat seluruh komponen bangsa Indonesia.

#### **d. Jaminan Perlindungan Terhadap Kebebasan Beragama**

Pasal 29 Ayat (2) dalam UUD 1945 menyatakan bahwa "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu". Dengan adanya pasal ini, negara memberikan jaminan bagi setiap individu untuk menjalankan agamanya tanpa adanya diskriminasi. Negara tidak akan campur tangan dalam urusan keyakinan agama, dan setiap warga negara berhak untuk memilih dan mempraktikkan agama mereka dengan bebas.

Selain itu, Pasal 28E Ayat (1) UUD 1945 juga memberikan hak yang sama kepada setiap warga negara untuk memeluk agama dan beribadat menurut agama yang diyakininya. Pasal 28E Ayat (2) menegaskan kebebasan untuk meyakini dan mengungkapkan kepercayaan sesuai dengan hati nurani. Kebebasan beragama ini dianggap sebagai hak asasi manusia yang sangat fundamental, karena langsung berkaitan dengan martabat pribadi sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

#### **e. Implementasi Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Kehidupan Sosial**

Dengan begitu, sila pertama Pancasila ini menegaskan bahwa nilai Ketuhanan Yang Maha Esa tidak hanya mendasari kehidupan beragama, tetapi juga membentuk landasan moral dan sosial yang kuat bagi terciptanya persatuan, keadilan, dan kesejahteraan bersama. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia berfungsi untuk mempersatukan semua keberagaman yang ada, serta mewujudkan negara yang adil, makmur, dan berperadaban tinggi.

### **Kemanusiaan yang Adil dan Beradab**

Inti dari sila "Kemanusiaan yang adil dan beradab" terletak pada manusia itu sendiri. Untuk memahami hakikat sila ini, kita harus terlebih dahulu menyadari kedudukan manusia dalam negara. Manusia memiliki posisi yang sentral, karena dia merupakan subjek yang berperan dalam membangun dan mempertahankan negara, sekaligus menjadi tujuan dari keberadaan negara itu sendiri. Dalam konteks ini, manusia adalah pendukung utama bagi negara dan juga merupakan subjek yang menjadi fokus utama dalam pengambilan kebijakan negara.

#### **a. Kedudukan Manusia dalam Negara**

Manusia memiliki hakikat yang sangat unik. Di satu sisi, manusia adalah makhluk individu, tetapi di sisi lain, dia juga merupakan makhluk sosial yang saling berinteraksi dengan sesama. Rumusan sila ini mencakup pemahaman bahwa negara harus menjamin perlakuan yang adil bagi setiap individu,

dengan tetap menghormati martabat manusia sebagai makhluk yang diciptakan Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam konteks negara, peran manusia sangat vital karena manusia bukan hanya sebagai objek kebijakan, tetapi juga subjek yang menjalankan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Hakikat ini menjadikan manusia sebagai makhluk yang memiliki nilai dan martabat yang harus dihormati dalam setiap aspek kehidupan, baik dalam hal sosial, politik, maupun ekonomi.

#### **b. Konsep Keadilan dalam Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab**

Keadilan dalam sila ini tidak hanya mengacu pada pembagian yang merata dalam kehidupan, tetapi juga pada pengakuan terhadap hak-hak dasar manusia. Keadilan sosial menjadi dasar untuk memastikan setiap individu mendapatkan kesempatan yang setara, tanpa adanya diskriminasi atau penindasan berdasarkan suku, agama, ras, atau status sosial. Dengan demikian, keadilan dalam konteks Pancasila berarti menjamin hak-hak asasi manusia dan menghapuskan segala bentuk ketidakadilan.

Kata adil, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengandung makna "sama berat, tidak memihak pada pihak tertentu, berpihak pada yang benar." Oleh karena itu, dalam konteks "Kemanusiaan yang adil dan beradab", keadilan bukan sekadar pemberian yang adil, tetapi juga proses yang berlandaskan pada moralitas dan etika, serta menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban antar individu dalam masyarakat.



*Sidang pengadilan - pn-negara.go.id*

#### **c. Aspek Adab dalam Kehidupan Berbangsa**

Kata beradab dalam sila ini mengandung pengertian tentang etika, kesopanan, dan perilaku yang mencerminkan kemanusiaan. Adab bukan hanya menyangkut kebiasaan baik dalam interaksi sosial, tetapi juga mengacu pada perilaku yang menunjukkan rasa hormat terhadap sesama dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Kebaikan budi pekerti yang tercermin dalam tindakan sehari-hari menjadi refleksi dari beradab, yang berhubungan erat dengan prinsip dasar negara Pancasila.

Sejalan dengan hal tersebut, pengertian beradab ini melibatkan sikap saling menghormati antara individu, kelompok, dan masyarakat, serta bagaimana manusia menjaga hubungan harmonis dalam kehidupan sosialnya. Oleh karena itu, prinsip ini tidak hanya berlaku dalam interaksi sosial semata, tetapi juga mengarah pada keadilan sosial yang lebih besar dalam ranah kehidupan berbangsa dan bernegara.

#### **d. Mewujudkan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dalam Praktik**

Realitas sosial menunjukkan bahwa masih banyak ketidakadilan dan perbedaan yang merugikan sebagian besar masyarakat. Untuk mewujudkan Kemanusiaan yang adil dan beradab, negara harus menciptakan sistem yang memungkinkan setiap individu untuk mengakses hak-haknya dengan bebas dan tanpa diskriminasi. Program-program sosial yang memfasilitasi akses pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan hak-hak politik sangat penting untuk memastikan keadilan sosial bagi seluruh warga negara.

Selain itu, negara juga harus memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu dan memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan kesempatan yang setara untuk mengembangkan potensinya, tanpa adanya hambatan berdasarkan latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya. Ini adalah bagian dari upaya mewujudkan kehidupan yang beradab dan berkeadilan, sebagaimana yang tertuang dalam sila kedua Pancasila.

#### **e. Persatuan dalam Keberagaman**

Nilai kemanusiaan dalam sila ini juga menekankan pentingnya persatuan dalam keberagaman. Meskipun Indonesia memiliki banyak suku, agama, dan budaya, sila ini mengajarkan bahwa perbedaan tersebut harus dihormati dan dijadikan kekuatan untuk memperkuat persatuan bangsa. *Bhinneka Tunggal Ika*, yang berarti "Berbeda-beda tetapi tetap satu," menjadi landasan dalam mewujudkan kemanusiaan yang adil dan beradab dalam kehidupan berbangsa.

Keberagaman ini seharusnya tidak menjadi alasan untuk terpecah-belah, melainkan menjadi kekuatan yang memperkaya budaya dan identitas nasional Indonesia. Setiap individu, apapun suku, agama, dan latar belakangnya, harus merasa dihargai dan diperlakukan dengan adil dalam tatanan sosial dan politik.

### **Persatuan Indonesia**

Sila "Persatuan Indonesia" dalam Pancasila mengandung makna penting terkait persatuan bangsa dan negara yang terwujud melalui proses yang dinamis. Proses ini mengarah pada persatuan yang melibatkan wilayah, bangsa, dan negara Indonesia. Persatuan yang tercipta harus dijaga, dipelihara, dan terus dikembangkan seiring berjalannya waktu dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan negara (Kaelan, 2018).

#### **a. Makna Persatuan Indonesia**

Kata "persatuan" secara etimologis berasal dari kata satu yang berarti "utuh dan tidak terpecah-pecah." Oleh karena itu, persatuan dapat dimaknai sebagai wujud keutuhan bangsa Indonesia yang dibentuk melalui proses penyatuan berbagai unsur yang beragam. Indonesia merujuk pada kenyataan bahwa bangsa dan wilayah Indonesia terbentang luas, dari Merauke hingga Sabang. Pemahaman terhadap keberagaman bangsa Indonesia ini tidak hanya dilihat dari segi geografis, tetapi juga sebagai entitas nasional yang menyatukan berbagai kelompok sosial, budaya, agama, dan suku yang ada di seluruh Indonesia.

#### **b. Persatuan dalam Keberagaman**

Persatuan Indonesia mencerminkan adanya kesadaran terhadap pentingnya hidup bersama sebagai sebuah bangsa meskipun memiliki keberagaman yang sangat luas. Keberagaman tersebut meliputi suku, ras, agama, dan budaya yang berbeda-beda. *Bhinneka Tunggal Ika* yang berarti "Berbeda-beda tetapi tetap satu" menggarisbawahi pentingnya persatuan dalam kehidupan sosial masyarakat yang pluralistik. Dalam konteks ini, perbedaan bukan menjadi hambatan atau alasan untuk terpecah, tetapi justru menjadi kekuatan untuk saling menguatkan dalam membangun negara Indonesia.

### c. Nilai Persatuan dalam Konteks Sosial dan Negara

Dalam sila "Persatuan Indonesia", ada nilai bahwa negara adalah manifestasi dari sifat kodrat manusia yang monodualis, yaitu sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Negara, sebagai lembaga yang dibentuk oleh masyarakat, menjadi wadah untuk menjaga dan melindungi kehidupan bersama agar tercipta harmoni dan kesejahteraan bersama.

Perbedaan yang ada dalam masyarakat Indonesia bukanlah suatu masalah yang harus dipertentangkan, tetapi harus dihormati dan diterima sebagai kenyataan yang menguatkan identitas bangsa. Kesadaran akan keberagaman ini harus menjelma dalam bentuk kebijakan yang inklusif dan adil, dengan menekankan persatuan sebagai dasar utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

### d. Sejarah Persatuan dalam Perjuangan Kemerdekaan

Dari Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, persatuan dalam perjuangan kemerdekaan sangat menentukan keberhasilan perjuangan rakyat Indonesia. Persatuan menjadi faktor kunci yang memperkuat dan memobilisasi masyarakat dalam meraih kemerdekaan. Tema persatuan sudah tercermin sejak Manifesto Politik 1925 yang diungkapkan oleh para pemuda Indonesia yang berada di Negeri Belanda. Hal ini dilanjutkan dengan Sumpah Pemuda 1928, yang menegaskan tekad untuk bersatu demi Indonesia yang merdeka.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan, persatuan Indonesia masih tetap menjadi dasar dalam mewujudkan tujuan bangsa Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Pancasila, yang mengedepankan persatuan dalam keberagaman, menjadi pedoman hidup untuk memperkuat dan mempererat kesatuan bangsa Indonesia (Kaelan, 2018).



*Pembacaan Teks Proklamasi – Detik.com*

### e. Persatuan Indonesia dalam Konteks Nasionalisme

Kesadaran akan pentingnya persatuan menguatkan rasa nasionalisme dalam diri setiap warga negara. Persatuan dan nasionalisme saling mendukung dalam mewujudkan cita-cita bangsa. Nasionalisme adalah rasa cinta tanah air yang memotivasi setiap warga negara untuk menjaga persatuan dan kesatuan, serta berkontribusi pada kemajuan bangsa. Sila "Persatuan Indonesia" mengajarkan bahwa persatuan bukan hanya soal status negara atau wilayah, tetapi juga dalam bagaimana setiap individu berperan aktif dalam kehidupan sosial yang damai dan harmonis.

### f. Realisasi Persatuan Indonesia

Realisasi Persatuan Indonesia bukanlah hal yang statis, melainkan sebuah tujuan dinamis yang terus dipelihara. Persatuan Indonesia tidak hanya terlihat pada kesatuan bangsa, negara, dan wilayah Indonesia, tetapi lebih penting adalah usaha untuk mewujudkan tujuan bersama sebagai satu bangsa. Keberagaman yang ada, justru memperkaya dinamika sosial negara, yang harus diatur dengan baik agar tidak menjadi konflik.

Dengan demikian, persatuan Indonesia menjadi kunci dalam menjaga kesatuan dan keberlanjutan negara. Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan dan upaya berkelanjutan untuk memperkuat persatuan di tengah keberagaman, baik dalam aspek sosial, politik, maupun ekonomi.

## **Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan**

Sila "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan" mengandung makna mendalam terkait dengan prinsip dasar dalam penyelenggaraan politik Negara Indonesia. Sila ini mencerminkan pentingnya kerakyatan, permusyawaratan/perwakilan, dan kedaulatan rakyat sebagai tiga unsur utama dalam proses pemerintahan yang sehat. Kedaulatan rakyat, yang menjadi dasar dalam sistem pemerintahan Indonesia, berhubungan erat dengan bagaimana rakyat memberikan suara mereka melalui sistem permusyawaratan dan perwakilan yang ada (Kaelan, 2018).

### **a. Kerakyatan sebagai Esensi dari Sila Ini**

Kerakyatan, dalam konteks sila ini, merupakan inti dari penyelenggaraan negara. Kerakyatan menandakan bahwa kekuasaan dan keputusan dalam negara harus bersumber dari rakyat, dengan mekanisme yang mendasarkan pada permusyawaratan atau musyawarah untuk mencapai mufakat. Oleh karena itu, peran masyarakat sebagai pemegang kedaulatan sangat penting dalam membentuk kebijakan yang mencerminkan aspirasi rakyat (Kaelan, 2018).

Manusia, dalam kodratnya sebagai makhluk monodualis, merupakan gabungan antara individu dan makhluk sosial. Hal ini mencerminkan bahwa negara merupakan tubuh yang terdiri dari individu-individu yang saling berinteraksi untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan bersama. Dalam hal ini, negara berfungsi untuk menyeimbangkan kepentingan pribadi dengan kepentingan bersama demi menciptakan kesejahteraan sosial.

### **b. Permusyawaratan/Perwakilan dalam Demokrasi**

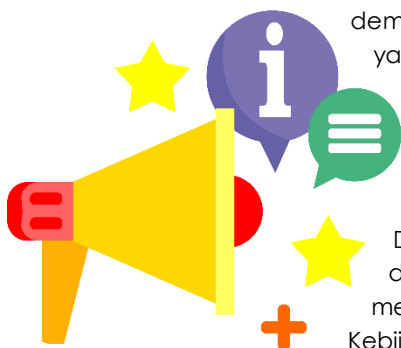
Pada dasarnya, demokrasi adalah sarana untuk mencapai tujuan bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang salah satunya terwujud melalui permusyawaratan atau perwakilan. Permusyawaratan menggambarkan proses demokrasi yang memungkinkan terjadinya dialog dan diskusi antara wakil-wakil rakyat dan masyarakat dalam pengambilan keputusan (Affandi, 2020). Ini adalah bentuk dasar dari sistem demokrasi, yang diimplementasikan dalam Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang memiliki tugas untuk menampung dan mewakili aspirasi rakyat.

Menurut Kaelan (2018), perwakilan merujuk pada partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Partisipasi ini tercermin dalam pemilihan wakil rakyat yang memiliki tugas untuk mewakili suara rakyat dalam proses pembuatan kebijakan. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan diharapkan mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

### **c. Hikmat Kebijaksanaan dalam Pengambilan Keputusan**

Hikmat kebijaksanaan adalah landasan yang penting dalam pengambilan keputusan di negara yang demokratis. Hikmat ini mengajarkan pentingnya pengambilan keputusan yang berpijak pada nilai-nilai moral dan etika, serta mengedepankan kepentingan rakyat secara keseluruhan (Kaelan, 2018). Oleh karena itu, kebijaksanaan dalam konteks sila ini tidak hanya tentang pengambilan keputusan yang rasional dan tepat, tetapi juga berhubungan dengan sikap yang bijak, adil, dan beradab.

Dalam sistem pemerintahan, sikap bijaksana dari wakil rakyat sangat diperlukan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tetap memperhatikan prinsip keadilan dan kesejahteraan bersama. Kebijakan yang berlandaskan hikmat kebijaksanaan mampu menciptakan stabilitas politik, sosial, dan ekonomi yang diperlukan untuk kesejahteraan rakyat (Sustantina, 2015).



#### d. Pemilihan Wakil Rakyat yang Mewakili Kepentingan Rakyat

Kata perwakilan merujuk pada proses dimana rakyat memilih wakil mereka untuk mengambil keputusan yang dapat memengaruhi kehidupan mereka. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki tugas untuk menyuarakan aspirasi rakyat, serta mendiskusikan dan memutuskan kebijakan negara. Dalam konteks ini, partisipasi aktif masyarakat dalam pemilihan wakil mereka menjadi kunci agar kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan dan kepentingan rakyat (Sustantina, 2015).

#### e. Konsekuensi dari Kerakyatan dalam Negara Monodualis

Sebagai negara monodualis, Indonesia memiliki tantangan untuk menjaga keseimbangan antara hak individu dan hak sosial. Negara harus mampu memastikan bahwa setiap individu memiliki kebebasan untuk berkembang sesuai dengan hak-haknya, namun tetap mengutamakan kesejahteraan bersama. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan harus menghasilkan kebijakan yang menyeimbangkan kepentingan individu dengan kebutuhan kolektif masyarakat.

#### f. Realisasi Sila dalam Kehidupan Demokrasi

Proses permusyawaratan atau musyawarah adalah bagian penting dari sistem demokrasi Indonesia. Melalui musyawarah, negara memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil adalah hasil dari diskusi bersama, dengan mempertimbangkan seluruh aspirasi masyarakat. Keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat akan memperkuat demokrasi, memperlihatkan keadilan, dan memastikan bahwa setiap individu diperlakukan secara adil dalam pengambilan keputusan yang melibatkan kepentingan umum.



*Musyawah Desa - dp2kbp3a.tanahlautkab.go.id*

### Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

#### a. Hakikat Keadilan Sosial dalam Pancasila

Keadilan sosial, sebagaimana terurai dalam sila "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia", memiliki arti yang mendalam dan merupakan bagian integral dari tujuan bangsa Indonesia untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Prinsip dasar keadilan sosial adalah keadaan yang harus tercapai oleh bangsa ini, yang berfokus pada pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dalam pandangan Notonagoro, keadilan sosial yang dimaksud dalam sila ini adalah kondisi yang terwujud ketika setiap individu mendapatkan hak yang setara, baik dalam hal ekonomi, sosial, maupun politik. Dengan demikian, keadilan sosial juga berhubungan dengan nilai kemanusiaan yang mengakui keberagaman,

serta menciptakan kesempatan yang setara untuk setiap warga negara dalam memperoleh hak-hak dasar mereka.

Sila ini sejalan dengan konsep yang ada dalam sila “Kemanusiaan yang adil dan beradab”, di mana keadilan sosial ini bertujuan untuk menegakkan nilai-nilai kemanusiaan dan agama, serta menghormati hak setiap individu dalam negara yang berdasarkan pada nilai kebersamaan dan saling pengertian (Rio, 202). Keadilan sosial bertujuan untuk mengatasi ketimpangan, dengan menciptakan masyarakat yang lebih merata dan sejahtera dalam berbagai aspek kehidupan.

#### **b. Tujuan Keadilan Sosial**

Tujuan utama dari keadilan sosial adalah untuk membangun masyarakat yang setara dan teratur, dengan memberikan akses yang sama bagi setiap individu untuk meraih kemajuan dalam kehidupan mereka. Keadilan sosial mendorong upaya untuk mewujudkan kesetaraan dalam pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Dengan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh rakyat, maka terwujudlah solidaritas dan kemajuan bersama (Kaelan, 2018).

Konsep ini memiliki keterkaitan erat dengan prinsip “liberty” atau kebebasan yang setara bagi semua orang, di mana setiap warga negara memiliki kebebasan untuk mencapai cita-citanya tanpa adanya hambatan atau diskriminasi berdasarkan latar belakang ekonomi, sosial, atau budaya (Latif, 2015). Oleh karena itu, keadilan sosial bukan hanya tentang memberikan hak-hak yang adil, tetapi juga mengatasi ketimpangan sosial yang ada dalam masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan bersama.

#### **c. Aspek Prinsip Keadilan Sosial dalam Kehidupan**

Menurut Kaelan (2018), keadilan sosial mencakup dua prinsip utama yang terkandung dalam sila ini, yang pertama adalah keadilan sosial dalam kehidupan nasional, yang berfokus pada pemerataan hak dan kewajiban setiap warga negara dalam mencapai kehidupan yang lebih baik. Dalam hal ini, keadilan sosial berusaha untuk menciptakan kesejahteraan bagi semua, tanpa ada perbedaan atau diskriminasi terhadap kelompok manapun.

Kedua, keadilan sosial juga mencakup pemenuhan hak-hak dasar bagi seluruh rakyat melalui negara yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik. Ini berarti negara harus memastikan bahwa setiap warga negara dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti pangan, pendidikan, dan tempat tinggal yang layak, guna menciptakan kehidupan yang bermartabat bagi setiap individu.

#### **d. Keadilan Sosial sebagai Wujud dari Kesatuan Bangsa**

Keadilan sosial tidak hanya berfungsi untuk pemerataan kesejahteraan, tetapi juga untuk memperkuat kesatuan bangsa. Hal ini sesuai dengan pandangan Rahayu (2017), yang menyatakan bahwa tujuan keadilan sosial adalah untuk mewujudkan masyarakat yang bersatu, yang memiliki hak yang setara dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan adanya keadilan sosial, maka akan tercipta hubungan yang lebih harmonis antara pemerintah dan masyarakat serta antar sesama warga negara.

Lebih lanjut, keadilan sosial juga mencakup penciptaan kesempatan yang sama dalam berbagai aspek kehidupan, tanpa adanya diskriminasi berdasarkan status sosial, ekonomi, ataupun latar belakang pendidikan. Negara harus berperan aktif dalam menghapus ketimpangan sosial dan menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, di mana semua warga negara dapat berperan serta dalam pembangunan bangsa.

#### **e. Realisasi Keadilan Sosial**

Untuk mewujudkan keadilan sosial ini, setiap kebijakan yang diambil oleh negara harus mempertimbangkan aspek distribusi kesejahteraan yang adil. Misalnya, dalam kebijakan pembangunan ekonomi, negara harus memastikan bahwa manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan. Selain itu, kebijakan

pemerataan pendidikan dan pelayanan kesehatan juga menjadi prioritas agar tidak ada warga negara yang tertinggal dalam memperoleh hak-hak dasar tersebut.

Keadilan sosial dalam konteks ini juga menuntut adanya kebijakan yang mendukung pemberdayaan masyarakat dan pengurangan kesenjangan sosial. Dengan mengutamakan prinsip kesetaraan dalam setiap aspek kehidupan, maka keadilan sosial dapat tercapai secara optimal, yang pada akhirnya akan memperkuat fondasi bagi kemajuan dan kemakmuran bangsa Indonesia.

**f. Keadilan Sosial sebagai Pilar Pembangunan Nasional**

Pembangunan sosial yang berkelanjutan hanya dapat terwujud apabila ada keadilan sosial yang menyertai seluruh prosesnya. Negara tidak hanya berfungsi sebagai penyedia kebijakan, tetapi juga sebagai fasilitator yang memastikan setiap kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan rakyat. Dalam hal ini, keadilan sosial menjadi pilar dalam setiap rencana pembangunan untuk menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia.



### Jejak Pancasila

**Sila Ketiga: “Persatuan Indonesia” = viral kalau kompak!**

Mulai dari gerakan mendukung UMKM lokal hingga kampanye “Bangga Buatan Indonesia”, warganet Indonesia bisa sangat kompak. Fenomena ini menunjukkan bahwa sila ketiga bukan sekadar slogan di buku teks, melainkan dapat hidup dalam aksi nyata, bahkan melalui tagar dan konten kreatif di TikTok dan Instagram. Persatuan hari ini dapat dimulai dari satu klik dan satu unggahan!



*Banyak Produk lokal yang viral dan mampu bersaing karna dukungan Masyarakat Indonesia –Pojksatu.com*

### Contoh Soal

Makna dari sila Persatuan Indonesia adalah...

- A. Menyatukan semua warga negara agar memiliki budaya yang sama
- B. Mewajibkan semua warga negara untuk memeluk satu agama
- C. Menjaga keutuhan bangsa dalam keberagaman suku, agama, dan budaya
- D. Menghilangkan semua perbedaan demi menciptakan keseragaman

Jawaban: C. Menjaga keutuhan bangsa dalam keberagaman suku, agama, dan budaya

Pembahasan:

Sila Persatuan Indonesia menekankan pentingnya menjaga keutuhan bangsa di tengah keragaman. Ini mencakup pengakuan dan penghargaan terhadap berbagai perbedaan yang ada, serta komitmen untuk hidup berdampingan secara harmonis tanpa mengorbankan identitas masing-masing. Persatuan dicapai bukan dengan menghapus perbedaan, tetapi dengan menjadikannya kekuatan bangsa.

## Kegiatan Kelompok 1

**Judul : Makna Sila-sila Pancasila untuk Pelajar**

**Tujuan : Menjelaskan makna tiap sila dan memberi contoh penerapannya di sekolah, rumah, dan lingkungan sekitar.**

Pancasila menjadi pedoman sikap kita sebagai pelajar. Kelima sila saling berkaitan dan perlu dipraktikkan dalam kegiatan sehari-hari. Lakukan kegiatan berikut secara berkelompok (4–5 orang).

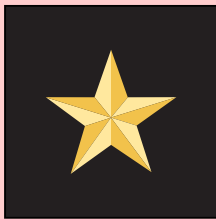
1. Bentuk kelompok dan bagi peran sederhana: pencari info, penulis, dan penyaji.
2. Buat mind map lima sila. Tulis 1–2 contoh sikap untuk tiap sila yang bisa dilakukan pelajar.
3. Pilih tiga situasi di sekolah (misalnya piket, kerja kelompok, upacara). Tentukan sila yang paling cocok untuk masing-masing situasi dan alasannya singkat.
4. Jawab pertanyaan panduan (cukup 1–2 kalimat per nomor):
  - Apa arti utama sila ke-1 bagi pelajar? Beri 1 contoh sikap.
  - Dua contoh perilaku “kemanusiaan yang adil dan beradab” di kelas.
  - Bagaimana caramu menjaga persatuan saat kerja kelompok berbeda pendapat?
  - Apa itu musyawarah? Contoh keputusan kelas yang sebaiknya dimusyawarahkan.
  - Sikap adil saat piket kelas itu seperti apa?
  - Di media sosial kelas ada komentar berbeda pendapat. Sikap apa yang sesuai Pancasila?
  - Sebutkan satu kegiatan sekolah yang mencerminkan dua sila sekaligus dan jelaskan singkat.
  - Nilai Pancasila mana yang ingin kamu latih minggu ini? Tulis rencana tindakanmu.
5. Ubah hasilnya jadi poster A4 atau slide 1–2 halaman. Cantumkan judul dan nama kelompok.
6. Presentasi 2–3 menit per kelompok, lalu terima 1 apresiasi dan 1 saran dari teman.
7. Refleksi individu 3–4 kalimat: tindakan Pancasila yang akan kamu lakukan besok.



### 3. Aplikasi Pancasila dalam Kehidupan Sehari-hari

Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah bangsa harus dirasakan manfaatnya dalam kehidupan nyata masyarakat Indonesia. Nilai-nilai luhur Pancasila dapat diimplementasikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penerapan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bertujuan untuk membangun masyarakat yang harmonis, adil, dan makmur, di mana setiap individu menghormati dan menjalankan kewajiban moralnya untuk kesejahteraan bersama.

#### Tabel Aplikasi Pancasila dalam Kehidupan



Sumber:  
<https://id.wikipedia.org/>

##### Sila Pertama dapat tercermin melalui tindakan-tindakan berikut:

- ▷ Percaya dan Takwa Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, serta meyakini bahwa Tuhan adalah sumber dari segala kehidupan.
- ▷ Menghormati Kebebasan Menjalankan Ibadah Menghargai setiap individu dalam menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Hal ini mencerminkan sikap toleransi dalam perbedaan keyakinan.
- ▷ Menjaga Kerukunan Hidup Antara Sesama Menjalin hubungan yang baik antar pemeluk agama, menghindari perselisihan antar umat beragama, dan menghargai perbedaan yang ada.
- ▷ Bekerja Sama dengan Pemeluk Agama yang Berbeda Menciptakan hubungan yang harmonis dalam masyarakat dengan memperlakukan pemeluk agama lain dengan rasa hormat.
- ▷ Tidak Memaksakan Suatu Agama kepada Orang Lain Menghargai hak individu untuk memilih agama dan kepercayaan mereka tanpa paksaan dari pihak lain.
- ▷ Selalu Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa Menjalankan kehidupan dengan rasa syukur atas segala karunia yang diberikan Tuhan, serta memanfaatkan anugerah-Nya untuk kebaikan bersama.
- ▷ Selalu Melaksanakan Ibadah Sesuai dengan Ajaran Agama Melaksanakan kewajiban agama dengan konsisten, mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari.



Sumber:  
<https://id.wikipedia.org/>

##### Sila kedua dapat tercermin melalui tindakan-tindakan berikut:

- ▷ Memperlakukan Manusia Sesuai dengan Harkat dan Martabatnya Setiap orang harus dihormati sebagai makhluk Tuhan, dengan tidak melihat latar belakang, status sosial, atau rasnya. Ini mencerminkan keadilan sosial dalam masyarakat.
- ▷ Mengakui Persamaan Derajat, Hak, dan Kewajiban Setiap Manusia Semua manusia berhak mendapatkan perlakuan yang setara, dengan hak yang sama dalam pendidikan, pekerjaan, dan kesempatan untuk berkembang.
- ▷ Berani Membela Kebenaran dan Keadilan Mengambil sikap yang tegas dalam mendukung nilai-nilai keadilan, serta berani melawan

ketidakadilan, baik dalam keluarga, komunitas, maupun dalam masyarakat.

- ▷ Mengembangkan Sikap Tenggang Rasa dan Tepa Selira Memiliki empati terhadap sesama, dengan memahami dan menghargai perasaan orang lain dalam berbagai kondisi.
- ▷ Tidak Semena-Mena Terhadap Orang Lain Menghargai hak-hak orang lain dan menghindari segala bentuk penindasan atau perlakuan yang tidak adil.
- ▷ Membantu Sesama yang Sedang Menghadapi Kesulitan Berpartisipasi dalam kegiatan sosial untuk membantu mereka yang membutuhkan bantuan, baik dalam bentuk materi, tenaga, atau dukungan moral.

**Sila ketiga dapat tercermin melalui tindakan-tindakan berikut:**

- ▷ Menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa Dalam setiap tindakan dan sikap kita, harus mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Kesatuan bangsa harus dijaga dengan menghindari segala bentuk perpecahan yang dapat merusak hubungan sosial antar elemen bangsa.
- ▷ Menghormati Perbedaan Suku, Agama, Ras, dan Golongan Bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, agama, ras, dan golongan membutuhkan sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari, kita harus mampu menerima perbedaan ini sebagai kekayaan bangsa yang memperkuat identitas nasional.
- ▷ Menghindari Konfrontasi Antar Kelompok Mendorong dialog dan musyawarah untuk mencapai kesepakatan yang damai dan menghindari segala bentuk konflik yang dapat membahayakan persatuan Indonesia. Kita harus siap mendengarkan berbagai pendapat yang beragam dan menemukan titik temu yang menguntungkan bersama.
- ▷ Berkontribusi untuk Kemajuan Negara dan Bangsa Setiap warga negara, melalui profesi dan perannya masing-masing, harus berkomitmen untuk memberikan kontribusi positif bagi kemajuan negara. Ini bisa berupa kontribusi dalam bidang pendidikan, ekonomi, sosial, atau kebudayaan.



Sumber:  
<https://id.wikipedia.org/>

**Sila keempat dapat tercermin melalui tindakan-tindakan berikut:**

- ▷ Menghormati Proses Demokrasi Setiap warga negara harus menghargai dan mengikuti proses demokrasi yang ada, seperti pemilu dan musyawarah yang dilaksanakan di berbagai tingkat pemerintahan. Keputusan yang diambil harus berdasarkan pada suara rakyat yang diwakili oleh wakil-wakilnya.
- ▷ Mengutamakan Musyawarah untuk Mufakat Dalam pengambilan keputusan, baik dalam skala kecil (keluarga) maupun besar (negara), musyawarah harus menjadi cara utama untuk mencapai kesepakatan. Diskusi yang terbuka dan sehat akan menghasilkan keputusan yang lebih bijak dan menyeluruh.
- ▷ Partisipasi dalam Keputusan Negara Sebagai warga negara, kita diajak untuk berpartisipasi aktif dalam setiap proses pembuatan keputusan, baik



Sumber:  
<https://id.wikipedia.org/>

itu melalui pemilihan umum, diskusi publik, atau kegiatan masyarakat lainnya. Partisipasi ini penting agar aspirasi rakyat didengar dan dapat mewujudkan negara yang lebih adil dan sejahtera.

- ▷ Pemilihan Pemimpin yang Berkualitas Dalam sistem demokrasi, pemilihan pemimpin yang cakap dan bijaksana sangat penting. Pemilih memiliki tanggung jawab untuk memilih individu yang dapat dipercaya dan memiliki visi yang baik untuk bangsa.
- ▷ Menjaga Kebebasan Berpendapat Setiap warga negara berhak untuk mengungkapkan pendapat dan ide secara bebas. Namun, kebebasan ini harus dijalankan dengan rasa tanggung jawab, dengan tetap menghormati pendapat orang lain dan menjaga persatuan bangsa.
- ▷ Menghormati Hasil Keputusan yang Dicapai Melalui Musyawarah Setelah melalui proses musyawarah dan perwakilan, sebagai warga negara kita wajib menghormati hasil keputusan yang telah dicapai bersama, meskipun kita tidak selalu setuju dengan keputusan tersebut. Hal ini menunjukkan sikap kedewasaan dalam berdemokrasi, serta kepercayaan terhadap proses dan sistem yang telah ditetapkan untuk kebaikan bersama.
- ▷ Mengedepankan Kepentingan Umum di Atas Kepentingan Pribadi Dalam setiap keputusan yang diambil oleh pemerintah atau perwakilan rakyat, kita harus mengedepankan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Ini mencerminkan kesadaran kolektif untuk mewujudkan kesejahteraan bersama dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil dapat memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

**Sila kelima dapat tercermin melalui tindakan-tindakan berikut:**

- ▷ Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh pemerintah harus bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, dengan menitikberatkan pada pengentasan kemiskinan dan pemerataan pembangunan di seluruh pelosok Indonesia.
- ▷ Menjamin Akses yang Setara dalam Pendidikan dan Kesehatan Setiap individu berhak mendapatkan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang layak dan setara, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau daerah tempat tinggal.
- ▷ Menghargai Hak-hak Asasi Manusia Setiap orang memiliki hak yang setara dalam menjalani kehidupannya. Tidak ada diskriminasi dalam hak untuk bekerja, memilih pasangan hidup, memilih agama, serta hak-hak dasar lainnya yang terkait dengan martabat manusia.
- ▷ Menyediakan Kesempatan Kerja dan Kesejahteraan Ekonomi Pemerintah harus mengupayakan terciptanya lapangan kerja bagi masyarakat, serta memberikan kesempatan yang sama bagi semua individu untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan mendukung kesejahteraan mereka.
- ▷ Bergotong Royong dan Membantu Sesama Sila kelima juga mengajak kita untuk senantiasa menjaga semangat gotong royong dan saling



Sumber:  
<https://id.wikipedia.org/>

membantu, terutama bagi mereka yang kurang mampu atau sedang mengalami kesulitan. Ini merupakan wujud nyata dari keadilan sosial yang adil dan merata.

- ▷ Meningkatkan Infrastruktur dan Layanan Publik Untuk mewujudkan keadilan sosial, pemerintah perlu fokus pada pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh daerah, termasuk daerah terpencil dan kurang berkembang. Peningkatan akses terhadap fasilitas publik seperti jalan, air bersih, listrik, dan sistem transportasi yang baik akan mendukung kemudahan hidup masyarakat serta meningkatkan kualitas kehidupan.
- ▷ Melindungi Kelompok Rentan dan Marjinal Negara harus memberikan perhatian khusus kepada kelompok masyarakat yang rentan dan marjinal, seperti anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok minoritas lainnya. Kebijakan yang berpihak kepada kelompok-kelompok ini sangat penting untuk memastikan bahwa mereka dapat menikmati hak-hak dasar mereka tanpa ada hambatan, serta mendapatkan perlindungan dan perhatian yang setara dalam masyarakat.



### Jejak Pancasila

#### Persatuan Indonesia Membuat Warganet Indonesia Terkenal di Media Sosial!

Saat terjadi musibah nasional atau ada acara penting (seperti *SEA Games*, *Asian Games*, atau konser musisi Indonesia), warganet sering sekali bersatu untuk memberikan dukungan. Ini adalah wujud nyata dari menjaga persatuan dan menghargai perbedaan.



*Pendukung Timnas U-22 membawaposter dukungan jelang final SEA Games 2023.- Tirta.id*

#### Contoh Soal

Contoh penerapan sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari adalah...

- A. Mengutamakan teman dekat dalam pembagian bantuan sosial
- B. Membantu tetangga yang kurang mampu tanpa mengharap imbalan
- C. Menolak gotong royong jika tidak mendapatkan upah
- D. Memilih hanya kelompok tertentu dalam pembagian kesempatan kerja

Jawaban: B. Membantu tetangga yang kurang mampu tanpa mengharap imbalan

Pembahasan:

Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia mengajarkan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bersama. Membantu tetangga yang membutuhkan merupakan tindakan nyata dalam menerapkan nilai solidaritas, empati, dan pemerataan dalam kehidupan bermasyarakat. Tindakan ini menunjukkan semangat keadilan sosial sebagaimana diamanatkan oleh sila kelima Pancasila.

## Rangkuman

Bab 2 membahas penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari agar setiap individu dapat bertindak dengan adil, bermoral, dan bertanggung jawab. Penerapan nilai-nilai tersebut terlihat dalam berbagai aspek kehidupan, seperti dalam pengakuan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, penghargaan terhadap hak asasi manusia, dan pengembangan persatuan Indonesia dalam keragaman.

Setiap sila Pancasila mengandung prinsip yang penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sila pertama mengajarkan untuk menghormati kebebasan beragama, sila kedua menekankan perlakuan adil terhadap sesama, sila ketiga mengingatkan pentingnya menjaga persatuan bangsa, sila keempat mengutamakan musyawarah dan perwakilan dalam pengambilan keputusan, dan sila kelima memastikan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Semua nilai ini harus diterjemahkan dalam sikap dan tindakan nyata dalam kehidupan pribadi dan sosial.

Penerapan Pancasila juga harus tercermin dalam kebijakan negara, di mana pemerintah bertanggung jawab untuk melindungi hak asasi manusia, menyediakan akses pendidikan dan kesehatan yang setara, serta memastikan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat. Dengan mengamalkan Pancasila secara konsisten, Indonesia dapat mewujudkan cita-cita negara yang adil, makmur, dan sejahtera, sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan sosial yang terkandung dalam Pancasila.

## Latihan Soal

1. Apa yang dimaksud dengan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari?
  - A. Menjalankan setiap sila Pancasila hanya dalam ranah politik
  - B. Menyusun kebijakan negara yang adil dan merata
  - C. Menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap tindakan, baik pribadi, sosial, maupun pemerintahan
  - D. Menghormati setiap agama dan keyakinan pribadi tanpa perlu tindakan nyata
2. Apa tujuan utama dari Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam kehidupan sehari-hari?
  - A. Menyebarkan agama tertentu ke seluruh Indonesia
  - B. Menghargai kebebasan beragama dan memeluk keyakinan masing-masing
  - C. Menetapkan agama negara
  - D. Menghukum orang yang tidak beragama
3. Bagaimana penerapan Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dalam kehidupan masyarakat?
  - A. Memperlakukan setiap individu dengan cara yang tidak adil
  - B. Menghargai hak asasi manusia dan tidak mendiskriminasi berdasarkan status sosial
  - C. Mengutamakan keuntungan pribadi daripada kepentingan bersama
  - D. Mengabaikan hak-hak orang lain dalam masyarakat
4. Apa yang menjadi fokus utama dalam Sila Persatuan Indonesia?
  - A. Memisahkan kelompok-kelompok berdasarkan perbedaan
  - B. Mencapai kesepakatan hanya untuk kepentingan pribadi
  - C. Menjaga persatuan bangsa dalam keberagaman suku, agama, dan budaya
  - D. Mengabaikan perbedaan agama dan budaya dalam kehidupan sosial
5. Apa yang ditekankan dalam Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan?
  - A. Menghindari diskusi dan musyawarah dalam pengambilan keputusan
  - B. Demokrasi yang berpihak pada satu kelompok
  - C. Mengutamakan musyawarah dan perwakilan rakyat dalam membuat keputusan
  - D. Menyelesaikan masalah tanpa melibatkan rakyat
6. Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia bertujuan untuk...
  - A. Memastikan pemerataan kekayaan hanya di perkotaan
  - B. Menciptakan ketimpangan sosial yang lebih besar

- C. Memberikan kesempatan yang sama bagi semua warga negara untuk meraih kesejahteraan
  - D. Membatasi hak-hak sosial untuk kelompok tertentu
7. Penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari mencakup:
- A. Mengutamakan kepentingan individu di atas kepentingan bersama
  - B. Menghargai perbedaan dan mengamalkan nilai Pancasila dalam hubungan sosial
  - C. Mengabaikan nilai keadilan sosial
  - D. Membatasi kebebasan berpendapat untuk beberapa kelompok

**Akses latihan soal  
lainnya di sini yuk!**



## Referensi

Affandi, A. (2020). *Demokrasi dan Musyawarah dalam Konteks Pancasila*. Jakarta: Penerbit Demokrasi Indonesia.

Kaelan, S. (2018). *Pancasila: Dasar Negara dan Filosofi Bangsa Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.

Latif, M. (2015). *Pancasila sebagai Pedoman Hidup Bangsa*. Bandung: Pustaka Bandung.

Notonagoro, M. (2005). *Pancasila: Dasar Filsafat Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Rahayu, I. (2017). *Pendidikan Pancasila untuk Masyarakat Majemuk*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Rio, S. (2021). *Penerapan Nilai Pancasila dalam Kehidupan Sehari-hari*. Surabaya: Penerbit Widya Bhakti.

Sustantina, R. (2015). *Keadilan Sosial dalam Perspektif Pancasila*. Malang: Penerbit Cendikia.



## BAB 3

# KEPATUHAN TERHADAP NORMA YANG BERLAKU

### Karakter Pelajar Pancasila

**Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia:** Bersyukur dan menjalankan kewajiban sesuai norma agama serta berperilaku baik dalam kehidupan bermasyarakat.

**Bergotong royong:** Bekerja sama dengan orang lain secara aktif untuk menjaga keharmonisan dan mencapai tujuan bersama sesuai norma yang berlaku.

**Bernalar kritis:** Mengolah informasi, mengajukan pertanyaan yang relevan, serta menafsirkan gagasan sesuai norma.

**Kata Kunci:** Pancasila, Nilai, Norma, Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Permasyarakatan, Keadilan, Identitas Bangsa.

### Tujuan Pembelajaran: Memahami, Menganalisis dan Mengamalkan Norma

#### 1. Menyusun Pemahaman tentang Manusia Sebagai Makhluk Ciptaan Tuhan Yang Maha Esa

- ▷ Menjelaskan peran manusia sebagai individu dan bagian dari masyarakat
- ▷ Mendeskripsikan Makna yang Terkandung pada Setiap Sila Pancasila

#### 2. Menguraikan Definisi Norma dalam Konteks Sosial

- ▷ Menjelaskan tujuan norma dalam menjaga ketertiban dalam masyarakat
- ▷ Menerapkan Nilai-Nilai Pancasila dalam Kehidupan Sehari-hari

### **3. Menjelaskan Macam-Macam Norma dalam Kehidupan Masyarakat**

- ▷ Memahami berbagai jenis norma yang berlaku di masyarakat
- ▷ Menjelaskan peran setiap jenis norma dalam membentuk perilaku sosial

### **4. Menerapkan Perilaku yang Sesuai Norma dalam Kehidupan Sosial**

- ▷ Mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan norma di masyarakat
- ▷ Menunjukkan contoh konkret tindakan sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari



**F I T R I**



## 1. Manusia sebagai Makhluk Tuhan, Individu, dan Sosial



*Interaksi Sosial dalam kehidupan sehari-hari – Shutterstock.com/2547493121*

Manusia adalah makhluk yang memiliki banyak dimensi. Ia diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk yang tidak hanya unggul secara fisik, tetapi juga dikaruniai akal, hati nurani, dan kemampuan untuk berinteraksi dengan sesamanya. Dalam kehidupannya, manusia berperan sebagai makhluk Tuhan, makhluk individu yang unik, serta makhluk sosial yang hidup dalam kebersamaan. Ketiga aspek ini saling melengkapi dan membentuk dasar dari kehidupan yang tertib dan bermakna.

### **Manusia sebagai Makhluk Tuhan Yang Maha Esa**

Manusia menempati posisi istimewa sebagai ciptaan Tuhan. Dibandingkan makhluk lainnya, manusia merupakan makhluk yang paling sempurna karena dianugerahi akal, kehendak, dan kesadaran moral. Dalam berbagai kepercayaan, manusia dipahami sebagai ciptaan yang dikehendaki Tuhan untuk mengelola bumi dan menjalankan kehidupan sesuai aturan ilahi.

Secara etimologis, kata "manusia" berasal dari kata manu dalam bahasa Sanskerta, yang artinya 'makhluk berpikir'. Dalam bahasa Latin, istilah homo juga berasal dari kata humus (tanah), menunjukkan asal fisik manusia, namun dibedakan dengan makhluk lain karena akal budinya. Manusia bukan hanya memiliki bentuk fisik, tetapi juga dibekali akal pikiran dan hati nurani yang menjadikannya mampu membedakan antara baik dan buruk, benar dan salah.

Dalam berbagai tingkatan ciptaan Tuhan, manusia berada pada tingkat tertinggi. Benda mati seperti batu dan air hanya memiliki wujud, tumbuhan memiliki wujud dan kehidupan, hewan memiliki wujud, kehidupan, dan naluri. Manusia juga dikaruniai akal, jiwa, serta kesadaran moral. Hal ini menegaskan bahwa manusia tidak hanya hidup, tetapi juga dapat berpikir, merasa, dan bertanggung jawab atas perbuatannya.

Sebagai makhluk berakal, manusia memiliki kebebasan untuk menentukan tindakan, namun kebebasan itu tidak bersifat mutlak. Ada batasan moral dan spiritual yang menjadi acuan. Manusia harus mempertimbangkan apakah tindakannya sesuai dengan nilai-nilai kebenaran dan apakah dapat dipertanggungjawabkan, baik di hadapan sesama maupun di hadapan Tuhan. Misalnya, seseorang bisa memilih untuk berbuat curang, namun kesadarannya akan nilai moral dapat menahan tindakan tersebut.

Kemampuan manusia untuk berpikir, mencipta, dan berinovasi juga merupakan anugerah Tuhan. Dengan akal dan hati, manusia bisa mengembangkan ilmu pengetahuan, menciptakan teknologi, dan menghasilkan karya seni. Semua potensi ini harus digunakan dengan bijaksana sebagai bentuk syukur atas karunia Tuhan. Maka dari itu, menjalani hidup sesuai perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya adalah bagian dari kepatuhan dan rasa tanggung jawab sebagai makhluk ciptaan.

## Manusia sebagai Individu



*Manusia dan kebersamaan – Shutterstock.com*

Manusia disebut sebagai makhluk individu karena memiliki keunikan, kemandirian, dan identitas yang tidak bisa disamakan satu sama lain. Kata individu berasal dari bahasa Latin *individuum*, yang berarti "tidak terbagi" atau "tak terpisahkan". Dengan kata lain, individu mencerminkan satuan terkecil dari makhluk hidup yang berdiri sendiri secara utuh dan terbatas (Barlian & Iswandi U., 2020).

Sebagai makhluk individu, manusia terdiri atas unsur jasmani (fisik) dan rohani (psikis). Keduanya menyatu membentuk pribadi yang utuh. Tidak cukup hanya mengenali manusia dari bentuk tubuh atau wajahnya saja, sebab unsur kepribadian, emosi, dan cara berpikirnya pun membentuk siapa dirinya. Bahkan pada anak kembar sekalipun, tidak ada yang benar-benar identik, karena masing-masing memiliki karakter, minat, dan potensi yang berbeda.

Keunikan individu tidak hanya berasal dari faktor biologis, tetapi juga dibentuk oleh lingkungan. Faktor keturunan atau genetik yang diwariskan dari orang tua membentuk ciri bawaan seseorang (*genotipe*), seperti warna mata, bentuk tubuh, atau suara. Namun faktor lingkungan seperti pola asuh, pendidikan, budaya, dan interaksi sosial berperan besar dalam memengaruhi perkembangan sifat dan perilaku seseorang (Barlian & Iswandi U., 2020). Inilah alasan mengapa saudara sekandung sekalipun bisa tumbuh menjadi individu yang sangat berbeda.

Setiap manusia menjalani proses pembentukan diri melalui pengalaman dan respons terhadap lingkungan. Dalam proses ini, manusia belajar untuk memahami siapa dirinya, bagaimana berperilaku, serta bagaimana menyesuaikan diri dengan situasi yang dihadapi. Perkembangan kepribadian ini disebut sebagai identitas diri, yang mencerminkan konsistensi dalam pola berpikir, merasa, dan bertindak (Mansur, 2016). Identitas ini yang menjadikan seseorang dapat dikenali sebagai pribadi yang khas dan otentik.

Keunikan manusia juga tampak dari ciri-ciri psikisnya, seperti minat, motivasi, harapan, dan tujuan hidup. Psikolog Nusriadi Santayana menyebut bahwa setiap orang memiliki potensi intelektual dan emosional yang berbeda. Ini yang menjelaskan mengapa seseorang bisa sangat tertarik pada seni, sementara yang lain pada ilmu eksakta. Lingkungan dan pengalaman hidup pun ikut membentuk cara berpikir dan cara seseorang menyikapi peristiwa yang terjadi di sekitarnya. Setiap individu memiliki ciri khas yang membuatnya berbeda dari orang lain. Menurut berbagai pandangan psikologi dan pendidikan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk memahami keunikan manusia sebagai individu (diadaptasi dari Astawa, 2017 & Lontaan, 2023):

**a. Kemampuan Berpikir (Kognisi), Merasa (Afeksi), dan Bertindak (Konasi)**

Manusia memiliki kemampuan berpikir secara logis dan kritis, dapat merasakan berbagai emosi, serta memiliki kehendak untuk melakukan tindakan. Ketiganya saling memengaruhi dalam proses pengambilan keputusan.

**b. Bakat, Minat, dan Sikap yang Unik**

Setiap orang membawa kombinasi unik dari potensi yang dimilikinya. Ada yang berbakat dalam seni, olahraga, atau sains. Sikap terhadap sesuatu juga menunjukkan perbedaan kepribadian dan nilai yang diyakini.

**c. Budaya Pribadi Berdasarkan Lingkungan dan Pola Asuh**

Cara hidup seseorang sangat dipengaruhi oleh budaya keluarga, sekolah, dan masyarakat tempat ia dibesarkan. Budaya ini membentuk kebiasaan dan cara individu berinteraksi dengan lingkungannya.

**d. Hak dan Tanggung Jawab sebagai Individu**

Sebagai individu, manusia memiliki hak yang harus dihormati, seperti hak untuk hidup, belajar, dan berkembang. Namun, setiap hak selalu dibarengi dengan tanggung jawab untuk menghormati hak orang lain.

**e. Kebutuhan yang Beragam**

Tidak semua individu memiliki kebutuhan yang sama. Ada yang lebih memerlukan dukungan emosional, ada pula yang membutuhkan ruang untuk berekspresi atau belajar. Perbedaan ini penting untuk dipahami agar tidak terjadi penyeragaman dalam memperlakukan manusia.

**f. Pengembangan Diri sebagai Individu**

Manusia akan terus berkembang sepanjang hidupnya. Perkembangan ini dilakukan untuk memenuhi berbagai kebutuhan, mencapai tujuan, dan meraih kehidupan yang bermakna. Proses ini berjalan berdasarkan akal dan perasaan, serta dipengaruhi oleh nilai dan kepercayaan yang diyakini.

## **Makhluk dalam Konteks Sosial**

Manusia pada dasarnya tidak mampu hidup secara terpisah dari orang lain. Dalam kehidupan nyata, setiap manusia membutuhkan manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhan fisik, emosional, intelektual, bahkan spiritualnya. Itulah sebabnya manusia disebut sebagai makhluk sosial atau makhluk yang cenderung hidup dalam kebersamaan, berinteraksi, dan membentuk komunitas bersama orang lain.

Kecenderungan untuk hidup berkelompok sudah terlihat sejak masa kanak-kanak, ketika manusia mulai belajar tentang dunia melalui hubungan dengan keluarga, teman, dan lingkungan sekitarnya. Perjalanan hidup manusia dari anak-anak hingga dewasa tidak bisa dilepaskan dari kehadiran orang lain. Oleh karena itu, sifat sosial bukan sekadar pilihan, melainkan bagian dari kodrat manusia itu sendiri (Efendi, dkk., 2016).

Dalam proses perkembangan diri, manusia membutuhkan interaksi sosial untuk belajar memahami nilai, norma, serta budaya yang berlaku dalam masyarakat. Interaksi ini membantu manusia mengembangkan empati, rasa tanggung jawab, dan keterampilan hidup bersama yang harmonis. Kehidupan bermasyarakat memberikan ruang bagi manusia untuk mengenali hak dan kewajibannya, serta belajar menyesuaikan diri demi terciptanya keharmonisan dalam kebersamaan.



## Jejak Pancasila

### Individu dan Keberagaman Karakter Manusia

Faktor-faktor biologis, seperti genetik, memengaruhi sebagian besar sifat fisik, namun lingkungan (budaya, pendidikan, dan pengalaman hidup) berperan penting dalam membentuk seseorang. Ini mengapa meskipun lahir dari orang tua yang sama, dua anak bisa sangat berbeda.



Keunikan setiap individu –  
Shutterstock.com/2213070729

#### a. Kesadaran Sosial dan Tanggung Jawab

Salah satu ciri utama manusia sebagai makhluk sosial adalah kesadarannya terhadap posisi dan perannya di dalam kelompok sosial. Manusia menyadari bahwa ia memiliki tanggung jawab moral terhadap orang-orang di sekitarnya, baik dalam keluarga, sekolah, tempat kerja, hingga masyarakat luas. Kesadaran ini mendorong manusia untuk berperilaku sesuai harapan lingkungan sosial dan menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum (Astawa, 2017).

Keinginan manusia untuk hidup bersama bukan hanya berasal dari kebutuhan jasmani atau keamanan semata, tetapi juga dari dorongan batiniah untuk merasa diterima, dihargai, dan menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Dengan kata lain, manusia memiliki naluri untuk menyatu dengan kelompoknya, serta rasa ingin menjalin hubungan yang saling menguntungkan dan mendukung (Putrawan, 2023).

#### b. Makna Interaksi Sosial

Interaksi sosial merupakan proses penting dalam kehidupan sosial manusia. Ia adalah bentuk hubungan timbal balik antara individu dengan individu lainnya, atau antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Interaksi sosial bersifat dinamis karena selalu berkembang, dipengaruhi oleh norma, budaya, serta situasi yang terus berubah. Melalui interaksi inilah manusia belajar tentang peran sosialnya, membangun kerja sama, dan membentuk sistem kehidupan yang teratur (Herimanto & Winarno, 2008).

#### c. Implikasi Manusia sebagai Makhluk Sosial

Sebagai makhluk sosial, manusia memiliki beberapa kesadaran penting yang menjadi dasar kehidupannya dalam masyarakat (Herimanto & Winarno, 2008):

##### 1) Kesadaran bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri

Manusia menyadari keterbatasannya dan membutuhkan bantuan, dukungan, serta keberadaan orang lain untuk memenuhi berbagai aspek kehidupannya.

##### 2) Kesadaran untuk selalu berhubungan dengan orang lain

Kehidupan bermasyarakat membutuhkan keterbukaan dan kemampuan berkomunikasi, sehingga tercipta hubungan yang sehat dan saling menghargai.

##### 3) Penghargaan terhadap hak dan keberadaan orang lain

Hidup bersama menuntut adanya rasa hormat atas hak-hak individu lain, seperti hak untuk berpendapat, hidup layak, dan diperlakukan adil.

#### 4) Ketaatan terhadap norma sosial yang berlaku

Untuk menjaga ketertiban dan keamanan, manusia harus tunduk pada aturan bersama yang disepakati dalam masyarakat.

#### d. Kontribusi Sosial Manusia

Keberadaan manusia sebagai makhluk sosial menuntutnya untuk menjalankan peran-peran tertentu dalam kehidupan bersama (Herimanto & Winarno, 2008). Beberapa bentuk kontribusi manusia dalam kehidupan sosial antara lain:

##### 1) Melakukan interaksi yang sehat dengan individu atau kelompok lain

Interaksi yang positif akan membangun rasa saling percaya, gotong royong, dan kerja sama dalam mencapai tujuan bersama.

##### 2) Membentuk dan berperan dalam kelompok sosial

Kelompok sosial seperti keluarga, sekolah, organisasi, dan komunitas memberikan wadah bagi manusia untuk belajar nilai-nilai sosial dan mengembangkan diri.

##### 3) Menciptakan dan menjaga norma sosial

Norma sosial terbentuk dari kebiasaan dan nilai yang dijunjung oleh masyarakat. Manusia tidak hanya mengikuti norma, tetapi juga berperan dalam memperkuat dan melestarikannya agar kehidupan bersama tetap tertib dan harmonis.

#### Contoh Soal

Apa yang dimaksud dengan manusia sebagai makhluk sosial?

- Manusia hidup dalam kelompok yang terisolasi tanpa interaksi dengan orang lain
- Manusia selalu mengikuti perintah Tuhan secara langsung
- Manusia memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dan hidup bersama dalam kelompok sosial
- Manusia lebih cenderung untuk hidup sendiri dan mandiri

Jawaban: C. Manusia memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dan hidup bersama dalam kelompok sosial

Pembahasan:

Manusia sebagai makhluk sosial berarti bahwa manusia tidak dapat hidup tanpa adanya interaksi dengan orang lain. Mereka membutuhkan kelompok sosial untuk memenuhi berbagai kebutuhan, seperti emosional, fisik, dan ekonomi. Norma sosial yang berlaku dalam kelompok tersebut mengatur bagaimana manusia berinteraksi dengan sesama, yang memengaruhi kesejahteraan individu dan kelompok.



## 2. Konsep Nilai dan Norma



*Nilai dan Norma – Shutterstock.com/2245354347*

### Definisi Nilai

Nilai merupakan suatu konsep abstrak yang mendalam, yang mengarah pada apa yang dianggap penting, benar, dan bermakna dalam kehidupan manusia. Nilai berfungsi sebagai pedoman dalam bertindak, berperilaku, dan berinteraksi dalam masyarakat. Dalam konteks sosial, nilai-nilai ini tidak hanya berdasar pada kepentingan pribadi, tetapi juga mencerminkan standar yang diterima bersama dalam suatu kelompok atau komunitas.

Menurut Hisyam (2020), nilai-nilai sosial yang diterima oleh suatu komunitas merupakan bentuk konkret dari prinsip-prinsip yang diyakini dan dihargai oleh anggotanya. Perasaan yang timbul dari penerimaan terhadap nilai ini sering kali menjadi dasar dalam pengambilan keputusan yang dianggap benar atau penting. Nilai juga memberi arah dalam setiap tindakan yang diambil, baik itu yang menyangkut kehidupan pribadi maupun interaksi sosial.

Dalam pandangan George Theodorson dan Achilles B. Theodorson (Pelly, 1994), nilai adalah prinsip-prinsip abstrak yang menjadi pedoman untuk berperilaku. Nilai ini tidak hanya mengatur tindakan fisik, tetapi juga mencakup prinsip-prinsip moral dan etika yang mengatur bagaimana seseorang bertindak dalam masyarakat. Oleh karena itu, keterikatan seseorang pada nilai-nilai tertentu sangat kuat dan berakar pada kesadaran emosionalnya.

#### a. Nilai sebagai Pembimbing Tindakan

Adanya nilai di dalam diri seseorang sering menjadi alasan utama bagi individu untuk melakukan sesuatu. Nilai tidak hanya memandu perilaku seseorang, tetapi juga menjadi alasan untuk tidak melakukan hal yang dianggap salah atau tidak sesuai dengan prinsip yang diyakini. Misalnya, seseorang yang berkomitmen untuk selalu jujur akan melakukan tindakan sesuai dengan nilai tersebut, bahkan tanpa adanya pengawasan langsung. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan yang didasarkan pada nilai-nilai yang diyakini lebih didorong oleh kesadaran pribadi, bukan hanya karena ada yang mengawasi atau mengontrol.

Dalam banyak kasus, individu yang dipandu oleh nilai-nilai ini cenderung tidak mengharapkan imbalan atau keuntungan pribadi. Kepuasan yang mereka rasakan bersifat internal, datang dari perasaan bahwa mereka telah menjalani hidup dengan prinsip yang benar. Sebagai contoh, seseorang yang menjaga kehormatan dan kejujuran dalam hidupnya merasa puas meskipun tidak ada pengakuan atau penghargaan eksternal (Liliweri, 2021).

#### **b. Nilai dalam Kehidupan Sosial**

Dalam konteks kehidupan sosial, setiap individu tentu tidak sadar sepenuhnya bahwa ia telah diajarkan untuk mengenali dan memahami nilai-nilai universal yang berlaku dalam masyarakat. Nilai-nilai ini terbentuk dari interaksi sosial yang melibatkan prinsip kehidupan yang lebih besar, seperti kejujuran, tanggung jawab, solidaritas, dan rasa saling menghormati. Prinsip-prinsip ini menjadi dasar dalam berinteraksi dan menjalani kehidupan bermasyarakat, serta menjamin keharmonisan dalam hubungan antar individu.

Sebagai contoh, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia, mencakup nilai-nilai seperti kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Nilai-nilai tersebut menjadi panduan hidup yang mendalam bagi setiap warga negara Indonesia untuk mewujudkan kehidupan yang damai, rukun, dan penuh solidaritas. Setiap orang memiliki tanggung jawab untuk tidak hanya memahami nilai-nilai tersebut, tetapi juga untuk mewujudkannya dalam tindakan sehari-hari (Liliweri, 2021).

### **Definisi Norma**

Norma adalah sekumpulan aturan yang disepakati bersama dalam suatu masyarakat untuk mengatur perilaku anggota-anggotanya. Norma berfungsi untuk menciptakan keteraturan, kedamaian, dan kesepahaman antara individu dalam kehidupan bersama. Tanpa norma yang jelas, masyarakat akan sulit menjalani kehidupan yang tertib, dan potensi terjadinya konflik pun semakin besar. Oleh karena itu, norma dianggap sangat penting sebagai pedoman hidup bersama dalam setiap komunitas atau kelompok sosial.

Menurut Sriyana (2022), norma adalah aturan yang mengatur hubungan antar individu dalam kelompok atau masyarakat. Norma ini memberi batasan mengenai perilaku yang dapat diterima dan yang tidak dapat diterima, serta memberikan pengawasan terhadap perilaku setiap individu. Dengan adanya norma, setiap orang akan memahami hak dan kewajiban sosial mereka, serta tahu apa yang diperbolehkan dan yang dilarang dalam kehidupan sosial.

Istilah "norma" sendiri berasal dari bahasa Belanda, yang berarti patokan atau pedoman yang menjadi dasar bagi setiap perilaku dan tindakan dalam masyarakat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), norma dijelaskan sebagai aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat, yang dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku agar sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku.

#### **a. Fungsi dan Tujuan Norma dalam Masyarakat**

Norma memainkan peranan penting dalam menjaga agar kehidupan dalam masyarakat tetap tertib dan tidak kacau. Fungsi utama norma adalah sebagai alat pengontrol sosial. Tanpa norma yang mengatur, setiap individu akan bertindak sesuai keinginannya tanpa mempertimbangkan dampak bagi orang lain, yang bisa menyebabkan kerusakan sosial dan ketidaknyamanan.

Selain itu, norma juga berfungsi untuk mencegah terjadinya benturan antar kepentingan. Misalnya, dalam hal pembagian sumber daya, norma memberikan pedoman agar tidak terjadi persaingan yang merugikan. Norma juga berperan dalam menciptakan kehidupan sosial yang aman, tertib, dan damai karena setiap individu tahu apa yang seharusnya dilakukan dalam situasi tertentu.



Norma juga memberikan batasan tentang larangan dan perintah dalam berperilaku. Dalam hal ini, norma mengarahkan individu agar bertindak sesuai dengan nilai-nilai sosial yang berlaku di masyarakat. Dengan adanya norma, setiap individu memiliki pemahaman yang jelas tentang apa yang diharapkan darinya dalam kehidupan bermasyarakat.

### b. Peran Norma dalam Membentuk Kehidupan Sosial

Secara lebih mendalam, norma memiliki beberapa peran dalam kehidupan sosial, seperti yang dijelaskan oleh para ahli:

- 1) Anthony Giddens menjelaskan bahwa norma adalah prinsip atau aturan yang konkret yang seharusnya dipatuhi oleh anggota masyarakat agar tercipta kehidupan yang tertib.
- 2) Leonard Broom dan Philip Selznick mengemukakan bahwa norma merupakan rancangan ideal perilaku manusia yang menetapkan batas-batas bagi anggota masyarakat untuk mencapai tujuan hidup yang lebih besar dalam kelompok sosialnya.
- 3) John J. Macionis menyatakan bahwa norma adalah aturan dan harapan-harapan yang ada di masyarakat untuk memberikan panduan bagaimana anggota-anggotanya harus berperilaku.
- 4) Richard T. Schaefer dan Robert P. Lamm mengemukakan bahwa norma adalah standar perilaku yang mapan yang dijaga oleh masyarakat, sehingga setiap orang dapat mengetahui apa yang harus dilakukan dalam konteks sosial.
- 5) Craig Calhoun menambahkan bahwa norma adalah aturan atau pedoman yang menetapkan bagaimana seseorang seharusnya bertindak dalam situasi tertentu sesuai dengan harapan sosial yang ada.
- 6) Alfred Bellebaum menegaskan bahwa norma sosial merupakan alat yang digunakan untuk mengatur setiap individu agar bertindak sesuai dengan prinsip dan keyakinan yang diterima dalam kelompok masyarakat.
- 7) Ernst Utrecht menyatakan bahwa norma adalah kumpulan petunjuk hidup yang digunakan untuk mengatur berbagai tata tertib di dalam masyarakat agar tercipta keteraturan sosial.
- 8) Soerjono Soekanto menambahkan bahwa norma sosial adalah aturan yang dibuat untuk memastikan hubungan antar individu dalam kelompok berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan konflik.

### Norma sebagai Pengontrol Sosial

Norma adalah aturan yang mengatur perilaku dalam masyarakat untuk menjaga ketertiban. Tanpa norma, masyarakat akan sulit menjalani kehidupan yang tertib. Norma memastikan setiap individu tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, mencegah konflik, dan menciptakan keharmonisan.



*Norma dimulai ditengah keluarga –  
Shutterstock.com/ 1924356704*

### Contoh Soal

Apa perbedaan utama antara nilai dan norma?

- A. Nilai adalah aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, sementara norma adalah prinsip moral yang bersifat abstrak
- B. Nilai lebih mengacu pada panduan abstrak dalam kehidupan, sementara norma lebih mengarah pada aturan konkret yang harus diikuti
- C. Nilai adalah norma yang berlaku dalam agama, sementara norma adalah prinsip yang tidak terikat pada agama
- D. Nilai adalah norma yang bersifat tertulis, sedangkan norma bersifat lebih abstrak

Jawaban: B. Nilai lebih mengacu pada panduan abstrak dalam kehidupan, sementara norma lebih mengarah pada aturan konkret yang harus diikuti

Pembahasan:

Nilai adalah prinsip atau panduan hidup yang bersifat lebih abstrak dan mendalam, yang menggambarkan apa yang dianggap baik dan penting dalam kehidupan. Sedangkan norma adalah aturan yang lebih konkret dan praktis, yang mengatur perilaku seseorang dalam masyarakat. Norma bersifat lebih terperinci dan mengarah pada tindakan yang dapat diamati.





### 3. Jenis-Jenis Norma



*Buku norma dan aturan – Shutterstock.com/2547001057*

Dalam masyarakat, terdapat berbagai jenis norma yang mengatur perilaku anggota masyarakat. Setiap jenis norma memiliki karakteristik, sanksi, dan peran yang berbeda dalam menjaga keteraturan sosial. Berdasarkan pembagian umum, norma dapat dibedakan menjadi beberapa jenis utama yaitu, Norma Agama, Norma Kesusilaan, Norma Kesopanan, dan Norma Hukum.

#### **Norma Agama**

Norma agama adalah pedoman hidup yang bersumber langsung dari Tuhan Yang Maha Esa, yang mengatur setiap perilaku dan tindakan manusia. Norma ini berbentuk perintah, ajaran, dan larangan yang harus diikuti oleh setiap individu yang menganut agama tertentu. Setiap agama memberikan pedoman yang jelas mengenai perilaku yang harus dilakukan, serta perilaku yang harus dihindari, berdasarkan ajaran agama tersebut.

Menurut Pasolong (2021), norma agama mencakup perintah yang harus dilaksanakan dan larangan yang harus dihindari oleh setiap umat beragama. Setiap tindakan yang dilakukan berdasarkan norma agama akan selalu bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, sementara tindakan yang melanggar ajaran agama akan menjauhkan individu dari Tuhan Yang Maha Esa.

Norma agama tidak hanya terkait dengan hubungan individu kepada Tuhan tetapi juga dengan hubungan manusia dengan sesama makhluk ciptaan-Nya. Norma agama mengatur kehidupan manusia dalam dua aspek: aspek rohani yang berkaitan dengan kewajiban terhadap Tuhan dan aspek sosial yang berkaitan dengan kewajiban terhadap sesama manusia. Sebagai contoh, dalam agama Islam, ada perintah untuk menjalankan shalat, berpuasa, memberi zakat, dan larangan untuk melakukan perbuatan dosa seperti mencuri, berdusta, atau membunuh. Begitu pula dalam agama Kristen, ada ajaran untuk mengasihi sesama, berdoa, serta menjauhi keburukan.

### a. Tuntutan Norma Agama dalam Kehidupan Sosial

Norma agama tidak hanya berfungsi untuk menjaga hubungan antara manusia dengan Tuhan, tetapi juga memberikan dampak besar pada kehidupan sosial. Ketika seseorang hidup sesuai dengan ajaran agamanya, hal tersebut akan membawa implikasi terhadap interaksi sosialnya, menciptakan keharmonisan, dan menghindari konflik sosial. Marzuki (2008) menjelaskan bahwa setiap individu yang mematuhi ajaran agamanya secara pribadi dan berkomitmen untuk melakukan perbuatan yang baik tidak hanya mendapatkan ketenangan batin, tetapi juga memberikan kontribusi positif bagi kehidupan sosial di sekitarnya.

Contoh nyata dari hal ini adalah ketika seseorang berpegang teguh pada ajaran agamanya untuk selalu berbuat jujur dan menghindari kebohongan. Tindakan tersebut akan menciptakan hubungan yang saling percaya antara sesama, dan pada gilirannya menciptakan lingkungan sosial yang lebih damai dan harmonis. Oleh karena itu, norma agama berperan penting dalam membentuk moralitas dan etika dalam masyarakat.

### b. Pahala dan Dosa dalam Konteks Norma Agama

Pada umumnya, setiap pemeluk agama meyakini bahwa mematuhi perintah Tuhan dan menjauhi larangan-Nya akan mendatangkan pahala, yang dapat berupa ganjaran baik di dunia maupun di akhirat. Pasolong (2021) menyatakan bahwa setiap amal baik yang dilakukan sesuai dengan ajaran agama akan dihargai dengan pahala, sementara pelanggaran terhadap norma agama akan mendatangkan dosa yang berakibat pada sanksi dari Tuhan. Dalam banyak ajaran agama, pahala dianggap sebagai ganjaran atas kebaikan, sedangkan dosa merupakan akibat dari pelanggaran terhadap aturan ilahi.

Sebagai contoh, dalam ajaran Islam, seseorang yang melaksanakan shalat tepat waktu dan berpuasa dengan penuh keikhlasan akan mendapatkan pahala, sedangkan orang yang meninggalkan shalat atau tidak berpuasa tanpa alasan yang sah akan mendapat dosa. Sementara itu, dalam agama Kristen, seseorang yang hidup sesuai dengan ajaran Kristus dan mengasihi sesama akan mendapatkan ganjaran dari Tuhan, sementara mereka yang mengabaikan ajaran agama akan mendapatkan hukuman.

### c. Kesadaran Iman dalam Menjalankan Norma Agama

Kesadaran terhadap norma agama sangat erat kaitannya dengan iman yang dimiliki oleh setiap individu. Tanpa adanya iman yang kuat, seseorang mungkin akan merasa ragu atau bahkan mengabaikan perintah agama. Marzuki (2008) menjelaskan bahwa norma agama hanya bisa dijalankan dengan penuh kesadaran dan ikhlas jika didasari oleh iman yang kokoh terhadap Tuhan. Iman memberikan kekuatan untuk menjalani setiap perintah-Nya, meskipun terkadang terdapat tantangan atau godaan untuk melanggar.

Norma agama juga memiliki dimensi sosial yang sangat penting. Ketika seseorang mematuhi ajaran agamanya, ia tidak hanya berhubungan dengan Tuhan, tetapi juga ikut berperan dalam menciptakan tatanan sosial yang baik. Sebagai contoh, ketika seseorang berusaha untuk tidak berbuat jahat dan selalu menjaga hubungan baik dengan orang lain, maka kehidupan sosial di sekitarnya pun akan menjadi lebih damai.

### d. Tanggung Jawab Sosial dalam Norma Agama

Norma agama mengajarkan bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab tidak hanya terhadap diri sendiri tetapi juga terhadap orang lain. Prihantini, dkk. (2022) menyatakan bahwa agama mendorong umatnya untuk tidak hanya memenuhi kebutuhan pribadi, tetapi juga berperan aktif dalam memperbaiki kehidupan sosial, seperti menolong sesama, menjaga kerukunan antar umat beragama, serta menjaga keberlanjutan lingkungan.



Contoh lain dari tanggung jawab sosial yang diajarkan dalam agama adalah kewajiban untuk saling menghormati dan menjauhi permusuhan. Dalam agama Islam, misalnya, ada ajaran untuk berbuat baik kepada tetangga, sementara dalam agama Kristen diajarkan untuk mengasihi sesama seperti diri sendiri. Prinsip-prinsip ini menunjukkan betapa pentingnya norma agama dalam membangun kehidupan sosial yang harmonis.

## Norma Kesusilaan



*Menghargai terhadap Hak Prioritas Orang Lain – Idntimes.com*

Norma kesusilaan adalah pedoman hidup yang berhubungan dengan hati nurani manusia, yang diakui dan diikuti oleh setiap individu dalam masyarakat. Norma ini mengatur perilaku individu berdasarkan prinsip moral yang berakar pada kejujuran dan kebaikan. Suara hati nurani manusia memandu seseorang untuk memilih perbuatan yang benar dan menghindari perbuatan yang salah. Hati nurani ini tidak bisa dibohongi, ia memberikan petunjuk yang sangat jelas mengenai apakah suatu tindakan itu baik atau buruk (Bakri, 2013).

Norma kesusilaan menganggap bahwa menjaga kesejahteraan masyarakat adalah hal yang sangat penting. Norma ini bersifat universal, artinya berlaku di mana pun dan kapan pun dalam kehidupan manusia (Utomo dan Prasetyo, 2023). Dengan demikian, norma kesusilaan bukan hanya berlaku dalam situasi tertentu, tetapi juga mengatur perilaku dalam kehidupan sehari-hari, menjadikan setiap individu harus bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip moral yang berlaku secara umum.

### a. Suara Hati Nurani dalam Norma Kesusilaan

Suara hati nurani yang menjadi dasar dari norma kesusilaan adalah suara kejujuran yang mendorong manusia untuk berperilaku baik. Misalnya, seseorang yang memiliki hati nurani yang kuat tidak akan mencuri dompet orang lain yang jatuh di tempat umum. Ia tahu bahwa perbuatan tersebut adalah salah dan tidak sesuai dengan norma kesusilaan yang ada dalam masyarakat (Ermanovida, dkk., 2021).

Contoh lain adalah seorang siswa yang mengikuti ujian dengan jujur, tanpa menyontek, karena ia memahami bahwa perbuatan tersebut tidak hanya salah secara moral tetapi juga merugikan orang lain. Melakukan hal-hal yang sesuai dengan hati nurani ini adalah bagian dari pengamalan norma kesusilaan. Pelanggaran terhadap norma kesusilaan, seperti berbohong atau menipu, biasanya akan menimbulkan perasaan bersalah, cemas, dan penyesalan (Kardiman, dkk., 2018). Inilah bentuk sanksi internal yang datang langsung dari dalam diri individu, yang mengingatkan mereka untuk kembali ke jalan yang benar.

## **b. Sanksi Norma Kesusilaan: Dari dalam Diri**

Sanksi terhadap pelanggaran norma kesusilaan bersifat otonom, yakni berasal dari dalam diri individu itu sendiri. Sanksi ini tidak berupa hukuman fisik atau sosial yang langsung diterapkan oleh pihak lain, tetapi lebih kepada perasaan batin seperti penyesalan, rasa bersalah, dan ketidaknyamanan pribadi. Ketika seseorang melanggar norma kesusilaan, mereka mungkin merasakan ketidaktenangan dalam diri mereka, yang mengindikasikan bahwa mereka telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai moral mereka sendiri (Suharto dan Efendi, 2013).

Kepekaan hati nurani seseorang sangat berpengaruh terhadap seberapa kuat mereka mengikuti norma kesusilaan. Semakin tajam kepekaan hati nurani seseorang, semakin besar pula kecenderungannya untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai moral. Sebaliknya, jika seseorang kurang peka terhadap nilai-nilai ini, mereka mungkin lebih sering melanggar norma kesusilaan tanpa merasa bersalah.

## **c. Contoh Penerapan Norma Kesusilaan dalam Kehidupan Sehari-hari**

Norma kesusilaan dalam kehidupan sehari-hari sangat berkaitan dengan interaksi sosial yang saling menghormati dan berperilaku adil. Contoh penerapannya bisa terlihat dalam tindakan seperti bertindak adil dan amanah, bertindak jujur, menepati janji, berbuat baik kepada sesama, dan tidak menyakiti orang lain. Misalnya, ketika seseorang memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan tanpa mengharapkan imbalan apa pun, atau ketika seseorang menepati janji yang telah dibuatnya, itu adalah bentuk penerapan norma kesusilaan dalam kehidupan sosial (Subroto, 2021).

Sebaliknya, contoh pelanggaran terhadap norma kesusilaan antara lain adalah tidak jujur, mengingkari janji, menzalimi orang lain, atau berbuat curang. Pelanggaran-pelanggaran ini tidak hanya merugikan orang lain, tetapi juga menyebabkan rasa malu dan ketidaktenangan dalam diri pelaku, karena mereka tahu bahwa perbuatannya bertentangan dengan prinsip moral yang dipegang masyarakat.

## **Norma Kesopanan**

Norma kesopanan adalah aturan sosial yang mengatur tata krama dan perilaku individu dalam masyarakat. Norma ini mencakup segala hal yang berkaitan dengan etika berperilaku, adat istiadat, dan tradisi yang diakui oleh kelompok masyarakat tertentu. Setiap masyarakat memiliki standar kesopanan yang berbeda, tetapi tujuannya tetap sama, yakni untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara individu, menjaga kehormatan, dan memperkuat ikatan sosial dalam kehidupan sehari-hari (Wasitmadja, dkk., 2018).

Norma kesopanan berperan penting dalam menjaga dan menghargai satu sama lain dalam kehidupan sosial. Ketika individu mematuhi norma ini, mereka tidak hanya menunjukkan rasa hormat terhadap orang lain tetapi juga berperilaku dengan cara yang diterima oleh masyarakatnya. Seiring berjalannya waktu, norma kesopanan menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya hidup, yang diajarkan sejak dini oleh orang tua kepada anak-anaknya (Sriyana, 2022).

### **a. Nilai dan Pengaruh Norma Kesopanan**

Norma kesopanan tidak hanya mengatur hubungan antar individu, tetapi juga memperlihatkan nilai yang lebih dalam, yakni menghargai orang lain sebagai sesama manusia. Ketika seseorang mengikuti norma kesopanan, mereka berusaha untuk menghormati keberadaan orang lain, memperlakukan orang dengan baik, serta menjaga perilaku agar tetap sesuai dengan tata krama yang berlaku dalam komunitas tersebut.

Norma ini juga menunjukkan betapa pentingnya menjaga hubungan sosial yang sehat. Sebagai contoh, seseorang yang tahu bagaimana berperilaku sopan di tempat umum akan dihormati oleh orang lain, bahkan jika mereka tidak saling mengenal. Ini menunjukkan bahwa penerapan norma

kesopanan memengaruhi keberhasilan seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain di lingkungan sosialnya (Sugiarto, 2018).

#### **b. Contoh Penerapan Norma Kesopanan dalam Kehidupan Sehari-hari**

Contoh paling sederhana dari penerapan norma kesopanan adalah bagaimana kita menghormati orang yang lebih tua, tidak berbicara kasar di depan umum, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Misalnya, tidak memberikan sesuatu menggunakan tangan kiri, tidak melanggar aturan antrian, tidak memotong pembicaraan orang lain, dan selalu berucap salam ketika bertemu seseorang (Subroto, 2021). Semua tindakan ini termasuk dalam kategori norma kesopanan, yang meski terlihat sepele, memiliki dampak besar dalam membangun kehidupan sosial yang tertib dan saling menghormati.



*Menghormati orangtua – shutterstock.com/441777118*

Penting untuk diingat bahwa norma kesopanan bisa berbeda di setiap budaya. Misalnya, di beberapa budaya, cara berpakaian yang sopan bisa berbeda antara satu negara dengan negara lainnya. Namun demikian, esensi dari norma kesopanan adalah menjaga tata krama yang berlaku, serta memperlakukan orang lain dengan hormat, tanpa memandang status atau latar belakangnya.

#### **c. Sanksi Pelanggaran Norma Kesopanan**

Pelanggaran terhadap norma kesopanan bisa mendapatkan sanksi sosial. Sanksi ini bisa berupa kecaman, rasa malu, atau pengucilan dari kelompok sosial. Pelanggaran norma kesopanan sering kali tidak melibatkan hukuman yang formal, seperti dalam norma hukum, tetapi dampaknya tetap bisa memengaruhi hubungan sosial seseorang. Misalnya, jika seseorang berbicara kasar atau tidak sopan di depan orang tua atau orang yang lebih tua, mereka mungkin akan dianggap kurang beradab atau tidak menghargai orang lain (Arifiyanto, dkk., 2014).

Contoh lain dari pelanggaran norma kesopanan adalah ketika seseorang mengabaikan aturan sosial dasar seperti memberi salam saat bertemu orang, atau tidak mengikuti adat istiadat saat berada di sebuah acara keluarga atau sosial. Meskipun tindakan ini tampaknya kecil, namun dapat menimbulkan persepsi negatif dari masyarakat.

### **Norma Hukum**

Norma hukum adalah aturan yang ditetapkan oleh negara untuk mengatur perilaku warganya, memastikan bahwa setiap individu dalam masyarakat dapat hidup bersama dalam keadaan tertib dan adil. Norma hukum biasanya bersifat lebih formal dan memiliki sanksi yang lebih tegas jika dilanggar, yang bisa berupa hukuman administratif atau pidana. Hal ini berbeda dengan norma agama, kesusilaan, dan kesopanan yang lebih bersifat moral dan sosial, sementara norma hukum diatur secara jelas oleh sistem hukum negara.

Pada dasarnya, norma hukum mengatasi pelanggaran terhadap norma-norma lain yang ada dalam masyarakat. Sebagai contoh, meskipun ada norma agama atau norma kesusilaan yang mengatur perilaku seseorang, norma hukum memberikan sanksi yang lebih jelas dan tegas kepada mereka yang melanggar

aturan yang sudah disepakati bersama dalam masyarakat (Arifyanto, dkk., 2014). Sanksi hukum yang diberikan juga mencakup hukuman yang berbeda sesuai dengan beratnya pelanggaran yang dilakukan, mulai dari denda hingga hukuman penjara.

#### **a. Sifat Norma Hukum**

Norma hukum memiliki ciri khas yaitu memaksa, yang berarti aturan ini tidak hanya disarankan atau dianggap baik untuk diikuti, tetapi jika dilanggar, individu yang melanggar akan menghadapi sanksi atau hukuman yang diberikan oleh negara. Arifyanto, dkk. (2014) mengemukakan bahwa norma hukum bersifat memaksa karena ia ditetapkan dan diberlakukan oleh negara, yang memiliki kekuatan untuk menegakkan peraturan dan menjatuhkan sanksi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai contoh, jika seseorang melanggar peraturan lalu lintas dengan tidak mematuhi lampu merah atau rambu-rambu lalu lintas, maka mereka akan dikenakan denda atau sanksi hukum lainnya yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Sanksi hukum ini jelas dan memiliki prosedur yang harus diikuti, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Itulah sebabnya norma hukum disebut sebagai aturan yang tegas dan memiliki sanksi yang jelas (Tjoman, 2022).

#### **b. Sanksi atas Pelanggaran Norma Hukum**

Sanksi yang diberikan bagi pelanggar norma hukum sangat beragam, bergantung pada jenis pelanggaran yang dilakukan. Sanksi-sanksi ini dirancang untuk memberikan efek jera dan memastikan ketertiban dalam masyarakat. Setiawan dan Lubis (2022) menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan norma hukum, sanksi terhadap pelanggaran bisa berupa denda, penahanan, atau bahkan hukuman penjara, tergantung pada pelanggaran yang dilakukan.

Misalnya, pelanggaran terhadap hukum lalu lintas, seperti melanggar rambu, tidak menggunakan sabuk pengaman, atau menerobos lampu merah, biasanya akan dikenakan denda atau tilang. Sedangkan untuk pelanggaran yang lebih serius, seperti pencurian atau pembunuhan, pelaku akan dikenakan sanksi yang lebih berat, termasuk hukuman penjara sesuai dengan ketentuan dalam hukum pidana.

Penting untuk diingat bahwa sanksi hukum bertujuan tidak hanya untuk memberi efek jera kepada pelanggar, tetapi juga untuk melindungi kepentingan masyarakat luas agar tetap dapat hidup dalam suasana yang aman dan tertib.

#### **c. Norma Hukum dan Pancasila sebagai Landasan Negara**

Dalam konteks negara Indonesia, norma hukum bersumber pada Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia. Pancasila menjadi landasan filosofis dalam pembentukan undang-undang dan peraturan yang mengatur kehidupan bermasyarakat. Wasitmadja, dkk. (2018) menyebutkan bahwa Pancasila sebagai dasar negara memberikan nilai-nilai moral yang mengarahkan pembentukan sistem hukum yang adil dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Salah satu contoh konkret dari penerapan norma hukum di Indonesia adalah Peraturan Lalu Lintas. Dalam hal ini, setiap individu yang menggunakan jalan umum wajib mematuhi aturan-aturan lalu lintas demi keselamatan bersama. Setiap pelanggaran terhadap peraturan tersebut akan dikenakan sanksi, seperti tilang, yang merupakan bagian dari norma hukum yang ditegakkan oleh negara.

#### **d. Norma Hukum sebagai Alat Pengaturan Sosial**

Norma hukum juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur hubungan antara individu dan negara, serta antara individu dengan individu lainnya dalam masyarakat. Sebagai contoh, undang-undang yang mengatur hak asasi manusia dan aturan tentang kebebasan berbicara merupakan bagian dari norma hukum yang mengatur bagaimana seseorang berinteraksi dengan orang lain di dalam masyarakat, sehingga dapat hidup dalam kesetaraan dan keadilan (Prasetyo dan Purnomosidi, 2019).



## Jejak Pancasila

### Norma Agama: Kunci Kehidupan Spiritual dan Sosial

Norma agama tidak hanya mengarahkan kita dalam berhubungan dengan Tuhan, tapi juga dengan sesama. Dari ajaran seperti berpuasa hingga larangan untuk berbuat dosa, norma agama membantu kita menciptakan kedamaian dalam hati dan membangun kehidupan sosial yang harmonis.

### Pancasila: Fondasi dari Semua Norma di Indonesia

Pancasila bukan hanya dasar negara, tapi juga fondasi dari norma hukum kita. Peraturan seperti lalu lintas atau hak asasi manusia berakar pada nilai-nilai Pancasila, memastikan bahwa hukum dan kehidupan sosial kita berjalan dengan keadilan dan kesejahteraan bersama.



*Norma agama juga menjaga hubungan dengan sesama manusia – Shutterstock.com*

### Contoh Soal

Norma mana yang mengatur hubungan antara individu dengan Tuhan dan sesama makhluk-Nya?

- A. Norma kesopanan
- B. Norma agama
- C. Norma kesusilaan
- D. Norma hukum

Jawaban: B. Norma agama

Pembahasan:

Norma agama adalah aturan yang bersumber dari ajaran agama dan mengatur hubungan individu dengan Tuhan serta dengan sesama makhluk-Nya. Pelanggaran terhadap norma agama sering kali dianggap sebagai dosa, dan setiap agama memiliki pedoman yang mengatur perilaku umatnya sesuai dengan keyakinan mereka.

## Kegiatan Kelompok 1

**Judul: Ragam Norma di Sekitar Kita**

**Tujuan: Mengetahui jenis-jenis norma (agama, kesusilaan, kesopanan, hukum) dan fungsinya bagi kehidupan pelajar di rumah, sekolah, lingkungan, dan ruang digital.**

Sebagai aturan hidup bersama, norma berfungsi memandu, memengaruhi, dan mengatur perilaku agar tertib dan harmonis. Berdasarkan sumbernya, dikenal norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Keempatnya saling melengkapi dalam kehidupan sehari-hari. Untuk memahaminya, lakukan kegiatan berikut.

1. Bentuklah 4 kelompok diskusi.
2. Setiap kelompok memilih satu jenis norma (harus berbeda antarkelompok) dan satu konteks fokus: sekolah, rumah, lingkungan sekitar, atau ruang digital.
3. Cari informasi tentang norma yang dipilih. Sertakan: pengertian, tujuan, 2 contoh penerapan, 1 contoh pelanggaran beserta sanksi/konsekuensi, serta manfaat bila norma ditaati. Gunakan sumber terpercaya (buku pelajaran, situs/berita resmi).
4. Susun hasilnya menjadi poster/infografik semenarik mungkin (beri judul, kata kunci, contoh, dan slogan singkat yang mudah diingat).
5. Pilih satu anggota untuk mempresentasikan karya kelompok selama 2–3 menit. Kelompok lain memberi 1 apresiasi dan 1 saran.

Selesai presentasi, tulis **refleksi singkat (3–4 kalimat)** tentang satu norma yang paling ingin kamu terapkan dan rencana tindakan konkretnya.





## 4. Berperilaku Sesuai Norma



*Tertib lalulintas – shutterstock.com/2539676609*

Mematuhi norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat adalah hal yang penting untuk menjaga keharmonisan dan keteraturan dalam hidup bersama. Norma mencakup segala aturan yang diatur oleh agama, kesusilaan, kesopanan, dan hukum, yang berfungsi sebagai pedoman bagi setiap individu dalam berinteraksi dengan orang lain. Namun, tidak jarang kita mendengar tentang pelanggaran terhadap norma-norma tersebut. Untuk itu, penting untuk memahami faktor penyebab pelanggaran norma, cara-cara untuk mengatasi pelanggaran, serta bagaimana kita dapat berperilaku sesuai norma di berbagai aspek kehidupan.

### Penyebab Pelanggaran Norma

Menurut Paul B. Horton, setiap tindakan yang melanggar norma-norma kelompok atau masyarakat disebut sebagai penyimpangan sosial. Penyimpangan ini terjadi ketika individu atau kelompok bertindak bertentangan dengan nilai-nilai yang diterima dalam masyarakat. Pelanggaran norma ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang bersifat internal (dari dalam diri individu) maupun eksternal (dari lingkungan sosial). Berikut adalah beberapa faktor penyebab terjadinya pelanggaran norma yang umum terjadi dalam kehidupan sosial:

#### a. Proses Sosialisasi yang Tidak Sempurna

Salah satu penyebab utama pelanggaran norma adalah proses sosialisasi yang tidak sempurna. Sosialisasi yang tidak berjalan dengan baik dapat mengakibatkan individu kurang memahami nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Hal ini sering kali terjadi ketika agen sosialisasi, seperti orang tua, guru, atau lingkungan sosial lainnya, gagal mengajarkan nilai-nilai dan norma secara menyeluruh. Misalnya, seorang anak yang tidak diajarkan tentang pentingnya berperilaku sopan santun kepada orang lain akan cenderung mengabaikan aturan ini saat berinteraksi dengan orang lain. Hodriani, dkk. (2023) menyatakan bahwa proses sosialisasi yang tidak sempurna dapat menyebabkan individu kurang sensitif terhadap norma-norma yang ada dalam masyarakat.

#### **b. Pengaruh Hasil Sosialisasi Subkebudayaan Menyimpang**

Terkadang, individu tumbuh dalam lingkungan subkultur yang memiliki nilai dan norma yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan norma yang diterima dalam masyarakat umum. Hal ini dikenal dengan istilah sosialisasi subkebudayaan yang menyimpang. Sebagai contoh, anak yang tumbuh di lingkungan keluarga yang terlibat dalam kegiatan kriminal mungkin akan terpengaruh oleh nilai-nilai yang mendukung perilaku menyimpang. Contoh lainnya adalah seorang remaja yang dibesarkan dalam lingkungan yang mengabaikan norma-norma sosial, sehingga ia tidak merasa bersalah saat melakukan pelanggaran, seperti mencuri atau merusak properti orang lain. Arifyanto, dkk. (2014) menjelaskan bahwa sosialisasi dalam subkebudayaan yang menyimpang dapat mempengaruhi perkembangan perilaku menyimpang di masa depan.

#### **c. Ketegangan antara Budaya dan Struktur Sosial**

Ketegangan antara kebudayaan dan struktur sosial juga dapat menyebabkan pelanggaran norma. Ketegangan ini muncul ketika individu tidak memiliki kesempatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sesuai dengan norma yang berlaku. Misalnya, seorang individu yang hidup dalam kemiskinan mungkin merasa bahwa ia tidak memiliki akses untuk mendapatkan pekerjaan yang layak atau pendidikan yang memadai. Hal ini dapat menyebabkan individu tersebut melakukan pelanggaran norma untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti mencuri atau menipu. Kardiman, dkk. (2018) mencatat bahwa ketegangan ini dapat berujung pada perilaku menyimpang, bahkan dapat berujung pada tindakan kriminal jika tidak ada jalan keluar yang legal atau sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.

#### **d. Pengaruh Agen Sosialisasi yang Menyimpang**

Agen sosialisasi yang tidak tepat atau menyimpang juga dapat berperan dalam pembentukan perilaku menyimpang. Kebebasan berinteraksi di era modern dengan siapa pun dan kapan pun, melalui media sosial dan teknologi, dapat membuka ruang untuk pergaulan yang tidak sehat. Sosialisasi yang dilakukan melalui media sosial, yang memfasilitasi interaksi tanpa kontrol yang ketat, sering kali memberikan dampak negatif pada individu, terutama remaja. Jika anak-anak atau remaja mendapatkan pengaruh dari agen sosialisasi yang tidak baik, mereka bisa terjerumus dalam perilaku menyimpang. Sebagai contoh, seseorang yang mengakses konten yang tidak etis atau ilegal di media sosial bisa terpengaruh untuk meniru perilaku tersebut. Arifyanto, dkk. (2021) menyebutkan bahwa cara interaksi yang buruk ini bisa mendorong perilaku yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.

#### **e. Dorongan Kebutuhan Ekonomi**

Manusia adalah makhluk yang memiliki kebutuhan ekonomi, dan terkadang dorongan untuk memenuhi kebutuhan hidup bisa menjadi penyebab terjadinya pelanggaran norma. Homo economicus, sebutan bagi manusia sebagai makhluk yang selalu terdorong untuk memenuhi kebutuhannya, sering kali mengabaikan norma demi mencapai tujuan ekonomi. Contohnya, seseorang yang merasa terdesak oleh kebutuhan ekonomi mungkin tergoda untuk melakukan pencurian, korupsi, atau penipuan demi mendapatkan uang. Subroto (2021) menjelaskan bahwa tekanan ekonomi sering kali menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan seseorang melanggar norma sosial, termasuk melakukan tindakan kriminal untuk memenuhi kebutuhan finansial.

#### **f. Pelampiasan Rasa Kecewa**

Ketika seseorang merasa keinginannya tidak tercapai atau harapan yang ia miliki tidak terwujud, ia mungkin merasa kecewa dan frustrasi. Penyimpangan sosial sering kali terjadi akibat pelampiasan rasa kecewa. Sebagai contoh, seorang supporter yang kecewa dengan kekalahan tim sepak bola favoritnya bisa melakukan tindakan kekerasan terhadap lawan atau bahkan merusak fasilitas publik. Hodriani, dkk. (2023) mengungkapkan bahwa kekesalan dan kekecewaan dapat menyebabkan individu untuk berperilaku menyimpang, baik dalam skala kecil maupun besar. Ini menunjukkan betapa

pentingnya pengelolaan emosi dalam menghindari perilaku negatif yang bertentangan dengan norma.

#### **g. Keinginan untuk Dipuji**

Keinginan untuk dipuji juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan perilaku menyimpang, terutama di kalangan remaja. Banyak remaja yang melakukan tindakan ekstrem atau tidak sesuai norma hanya untuk mendapatkan pengakuan atau pujian dari orang lain. Contoh hal ini bisa dilihat pada seseorang yang ingin terkenal di media sosial dan akhirnya melakukan tindakan berbahaya atau tidak etis hanya untuk mendapatkan perhatian. Sriyana (2022) menjelaskan bahwa perilaku menyimpang sering kali dipicu oleh keinginan untuk mendapatkan pengakuan sosial, yang memotivasi seseorang untuk melanggar norma-norma yang ada.



*Sanksi bagi pelanggar norma dan nilai – shutterstock.com/2585889421*

### **Cara Mencegah dan Mengatasi Pelanggaran Norma**

Setiap anggota masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga ketertiban sosial dan memastikan norma-norma yang berlaku dihormati. Untuk mengatasi pelanggaran norma dan mencegah tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai yang ada, perlu dilakukan upaya-upaya konkret yang melibatkan setiap individu. Menurut Koentjaraningrat (Hisyam, 2021), ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menghentikan pelanggaran norma dalam masyarakat. Berikut adalah cara yang dapat dilakukan untuk mencegah dan mengatasi pelanggaran di masyarakat:

#### **a. Menambah Keyakinan Para Anggota Masyarakat akan Kebaikan Norma**

Penting untuk menumbuhkan keyakinan di kalangan masyarakat bahwa mematuhi norma adalah hal yang baik dan bermanfaat bagi diri mereka sendiri serta masyarakat secara keseluruhan. Untuk itu, setiap individu perlu diyakinkan bahwa berperilaku sesuai dengan norma akan membawa dampak positif, baik dalam kehidupan pribadi maupun sosial. Upaya ini bisa dilakukan melalui pendidikan dan penyuluhan yang menekankan manfaat mematuhi norma-norma yang berlaku.

Contohnya, menyampaikan betapa pentingnya menjaga kesopanan dalam berinteraksi, menghormati sesama, dan menjalani hidup sesuai dengan ajaran agama dan aturan hukum yang berlaku. Ketika masyarakat menyadari kebaikan yang dapat diperoleh dari mematuhi norma, mereka akan lebih termotivasi untuk berperilaku baik dan menghindari pelanggaran norma.

**b. Memberikan Penghargaan atau Imbalan Bagi Anggota Masyarakat yang Mematuhi Norma**

Memberikan penghargaan atau imbalan bagi individu atau kelompok yang mematuhi norma sangat efektif untuk memotivasi perilaku positif dalam masyarakat. Penghargaan ini bisa berupa pengakuan sosial, penghargaan resmi, atau bentuk insentif lainnya yang mendorong individu untuk terus berperilaku baik.

Contohnya, pemerintah atau organisasi sosial dapat memberikan penghargaan kepada warga yang berkontribusi positif dalam menjaga ketertiban atau yang selalu mematuhi aturan. Dengan adanya penghargaan, masyarakat akan merasa dihargai atas usaha mereka untuk berperilaku sesuai norma dan akan semakin termotivasi untuk menjaga perilaku baik tersebut.

**c. Menanamkan Rasa Malu di Dalam Diri Warga Masyarakat**

Menumbuhkan rasa malu pada individu yang melanggar norma adalah langkah penting untuk mencegah perilaku menyimpang. Rasa malu dapat menjadi mekanisme kontrol sosial yang efektif, karena individu yang merasa malu atas tindakan mereka cenderung akan menghindari pelanggaran di masa depan. Untuk itu, pendidikan tentang pentingnya rasa malu terhadap pelanggaran norma sosial perlu ditekankan sejak dini.

Misalnya, orang yang berbicara kasar atau merusak fasilitas umum harus merasa malu atas tindakan tersebut, bukan hanya karena dia takut dihukum, tetapi karena dia tahu bahwa perbuatannya tidak sesuai dengan nilai-nilai yang diterima masyarakat. Ini dapat dilakukan melalui kampanye sosial yang menekankan pada pentingnya menjaga harga diri dan kehormatan dalam kehidupan sosial.



**d. Menimbulkan Rasa Takut Kepada Pelanggar Norma**

Meningkatkan rasa takut terhadap sanksi atau konsekuensi yang ditimbulkan akibat pelanggaran norma juga merupakan strategi yang efektif dalam mengatasi pelanggaran norma. Rasa takut ini bukan hanya berhubungan dengan hukuman hukum, tetapi juga dengan pengucilan sosial atau kecaman dari lingkungan sekitar.

Contohnya, seorang individu yang melanggar aturan lalu lintas seperti menerobos lampu merah dapat merasa takut akan mendapatkan denda atau tilang dari petugas. Selain itu, pelanggar juga dapat merasa takut terhadap pandangan negatif masyarakat terhadap tindakan mereka, yang bisa berujung pada hilangnya reputasi sosial mereka. Oleh karena itu, penegakan hukum yang tegas dan sanksi sosial yang jelas sangat penting dalam menumbuhkan rasa takut terhadap pelanggaran norma.

**e. Terciptanya Sistem Hukum atau Sistem Tata Tertib yang Diikuti dengan Sanksi yang Tegas**

Sistem hukum yang kuat dan sistem tata tertib yang berlaku di masyarakat adalah pilar utama dalam menjaga agar setiap individu mematuhi norma yang ada. Dengan adanya sistem hukum yang jelas dan sanksi yang tegas, masyarakat dapat melihat bahwa pelanggaran norma tidak akan dibiarkan begitu saja. Sanksi yang jelas dan diterapkan secara konsisten akan memberikan efek jera kepada para pelanggar norma.

Contoh penerapan sistem hukum yang efektif adalah dalam kasus pelanggaran norma hukum seperti pencurian atau kekerasan. Sanksi seperti penjara atau denda yang tegas dapat memberikan pelajaran bagi individu yang berpotensi melanggar norma. Di samping itu, sanksi sosial seperti pengucilan atau kecaman dari masyarakat juga dapat memperkuat penegakan norma dalam kehidupan sosial.

## Bertindak Sesuai Norma

Norma dalam masyarakat berfungsi sebagai pedoman untuk menentukan apa yang dapat diterima sebagai perilaku yang baik dan sesuai dalam berbagai aspek kehidupan. Norma tersebut mengatur hubungan antar individu dalam berbagai lingkungan, mulai dari keluarga, sekolah, hingga masyarakat secara umum. Tindakan yang sesuai dengan norma tidak hanya membantu menciptakan keteraturan, tetapi juga mendukung terciptanya hubungan yang harmonis antara individu dan kelompok. Setiap lingkungan sosial, baik itu keluarga, sekolah, atau masyarakat, memiliki norma-norma tertentu yang harus dipatuhi agar kehidupan bersama dapat berjalan dengan lancar. Berikut ini adalah beberapa contoh tindakan sesuai norma di lingkungan keluarga, sekolah, bermasyarakat, dan bernegara.

### a. Lingkungan Keluarga

Keluarga adalah unit sosial pertama yang sangat penting dalam pembentukan perilaku individu. Norma dalam keluarga mengatur bagaimana setiap anggota keluarga berinteraksi dan berperilaku satu sama lain. Sejak lahir, seorang anak dibesarkan dengan norma dan nilai-nilai yang diterapkan oleh keluarga melalui proses sosialisasi primer. Dalam konteks ini, perilaku yang sesuai dengan norma keluarga akan sangat mempengaruhi perkembangan karakter dan perilaku seseorang. Berikut ini adalah beberapa contoh tindakan yang sesuai dengan norma di lingkungan keluarga:

#### 1) Taat pada Perintah dan Nasihat Orang Tua



*Menaati perintah orangtua dengan membantu membersihkan lingkungan rumah – shutterstock.com/2591714395*

Salah satu perilaku yang paling mendasar dan menentukan kualitas sikap seseorang adalah ketaatan pada orang tua. Orang tua berperan sebagai agen sosialisasi utama yang mengajarkan anak untuk mematuhi norma-norma yang berlaku di rumah. Anjuran untuk mendengarkan nasihat orang tua tidak hanya berfungsi sebagai ajaran moral, tetapi juga sebagai panduan hidup yang akan membantu anak untuk bersikap baik dan menghormati orang lain. Misalnya, ketika orang tua mengingatkan anak untuk menjaga kebersihan atau tidak berbicara kasar, ini merupakan tindakan yang mengarah pada pembentukan karakter yang sopan dan beradab.

#### 2) Saling Menyayangi Antar Anggota Keluarga

Kasih sayang antar anggota keluarga adalah hal yang esensial dalam menciptakan keharmonisan di rumah. Setiap anggota keluarga, mulai dari orang tua hingga anak-anak, diharapkan untuk saling menyayangi dan memperhatikan satu sama lain. Dengan saling menghargai, keluarga akan menjadi tempat yang nyaman dan penuh dukungan. Menghormati perasaan satu sama lain dan memberikan perhatian dalam situasi yang sulit dapat mengurangi konflik dan mempererat hubungan keluarga. Menunjukkan kasih sayang dapat berupa tindakan sederhana seperti mendengarkan ketika seseorang berbicara, memberi pelukan, atau berbagi waktu bersama.

#### 3) Menjaga Nama Baik Keluarga

Menjaga nama baik keluarga merupakan salah satu norma penting dalam keluarga. Setiap individu dalam keluarga bertanggung jawab untuk menjaga reputasi keluarga dengan berperilaku baik. Salah satu contoh perilaku yang sesuai norma adalah menghindari tindakan yang dapat merusak nama baik keluarga, seperti melakukan pelanggaran hukum atau bertindak tidak etis. Misalnya,

anak-anak diharapkan untuk tidak terlibat dalam tindakan kriminal, mencuri, atau berkelakuan kasar karena hal ini dapat merusak citra keluarga. Sebaliknya, berperilaku dengan integritas dan menghormati norma yang ada akan memperbaiki dan menjaga nama baik keluarga di mata masyarakat.

#### **4) Membantu Orang Tua dalam Berbagai Pekerjaan di Rumah**

Tindakan membantu orang tua dalam pekerjaan rumah adalah perilaku yang sangat dihargai dalam keluarga. Ini bukan hanya sekedar membantu, tetapi juga menciptakan budaya kebersamaan dan tanggung jawab dalam rumah tangga. Dengan membantu orang tua, terutama dalam pekerjaan rumah seperti mencuci piring, membersihkan rumah, atau merawat adik, anak-anak belajar untuk berbagi tugas dan memahami pentingnya kerja sama. Kegiatan ini juga mengajarkan mereka untuk bertanggung jawab terhadap kebersihan dan ketertiban rumah.

Selain itu, mengajarkan anak-anak untuk bekerja bersama orang tua di rumah dapat membantu mereka menghargai kerja keras dan menghormati orang lain yang berperan dalam kehidupan mereka sehari-hari.

### **b. Lingkungan Sekolah**

Lingkungan sekolah juga memiliki serangkaian norma yang harus dihormati oleh setiap individu yang berada di dalamnya. Norma-norma ini mencakup berbagai aturan yang berkaitan dengan disiplin, etika, dan cara berinteraksi yang baik antar siswa, serta antara siswa dengan guru atau staf sekolah. Aturan-aturan ini berfungsi untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi proses pembelajaran dan memastikan bahwa setiap peserta didik dapat berkembang dalam lingkungan yang teratur dan saling menghormati. Perilaku yang sesuai dengan norma di sekolah tidak hanya berfokus pada kepatuhan terhadap peraturan, tetapi juga berhubungan dengan pembentukan karakter dan kedisiplinan siswa. Beberapa contoh tindakan yang sesuai dengan norma di lingkungan sekolah adalah sebagai berikut:

#### **1) Memakai Seragam Sesuai Aturan Sekolah**

Salah satu norma yang paling mendasar di lingkungan sekolah adalah aturan mengenai pakaian seragam. Setiap sekolah memiliki peraturan yang mengatur pakaian seragam yang harus dipakai siswa. Mematuhi aturan berpakaian di sekolah tidak hanya bertujuan untuk menciptakan keseragaman, tetapi juga sebagai bentuk disiplin dan penghormatan terhadap aturan yang berlaku. Seragam yang dikenakan dengan tepat akan menunjukkan rasa tanggung jawab dan keseriusan dalam mengikuti kegiatan sekolah. Mengikuti aturan seragam juga menunjukkan bahwa siswa menghargai aturan yang ada di lingkungan sekolah, serta berusaha menjaga citra positif sekolah.

#### **2) Tidak Menyontek Saat Ujian**

Norma lainnya yang sangat penting di sekolah adalah larangan menyontek saat ujian. Menyontek merupakan tindakan yang bertentangan dengan nilai kejujuran dan integritas, yang merupakan bagian dari norma dasar di sekolah. Setiap peserta didik diharapkan untuk mengerjakan ujian dengan kemampuan mereka sendiri, tanpa bantuan dari orang lain atau kecurangan lainnya. Selain itu, tindakan ini juga mendukung perkembangan pribadi siswa untuk bertanggung jawab atas pencapaian mereka dan menghargai usaha yang mereka lakukan dalam belajar.

Ketaatan terhadap norma ini sangat penting, karena tidak hanya berhubungan dengan ujian saat itu, tetapi juga dengan kualitas moral siswa di masa depan. Sebuah sekolah yang menegakkan norma kejujuran akan melahirkan generasi yang menghargai hasil kerja keras mereka dan memiliki integritas yang tinggi.

### 3) Mengerjakan Tugas yang Diberikan Guru

Mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru adalah perilaku yang menunjukkan tanggung jawab dan kedisiplinan. Setiap tugas yang diberikan di sekolah tidak hanya bertujuan untuk mengukur pemahaman siswa, tetapi juga untuk melatih mereka agar bertanggung jawab dan bisa bekerja dengan baik dalam waktu yang telah ditentukan. Tugas-tugas ini juga mengajarkan disiplin waktu, karena siswa diharapkan untuk menyelesaikan tugas tepat waktu. Disiplin dalam mengumpulkan tugas tepat waktu menunjukkan komitmen terhadap pendidikan dan masa depan mereka.

Selain itu, mengerjakan tugas dengan serius juga berarti siswa belajar untuk menilai diri sendiri dan memperbaiki kelemahan mereka, yang dapat membantu dalam pembelajaran di masa depan.



*Mengerjakan tugas guru – shutterstock.com/1435670348*

### 4) Melaksanakan Piket Membersihkan Kelas

Melaksanakan piket membersihkan kelas adalah contoh lain dari tindakan yang sesuai dengan norma di lingkungan sekolah. Piket merupakan tanggung jawab bersama yang diajarkan untuk mengembangkan rasa kebersamaan dan kepedulian terhadap lingkungan. Setiap siswa memiliki kewajiban untuk menjaga kebersihan kelas, tidak hanya karena itu adalah kewajiban yang diatur, tetapi juga sebagai bagian dari menjaga kenyamanan belajar bagi semua orang.

Melakukan piket juga mengajarkan siswa untuk berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang nyaman dan bersih, serta menumbuhkan rasa memiliki terhadap lingkungan tempat mereka belajar. Norma kebersihan ini mengajarkan siswa untuk bertanggung jawab atas keadaan sekitar mereka dan memastikan bahwa tempat belajar mereka selalu dalam kondisi yang baik.

#### c. Lingkungan Masyarakat

Dalam kehidupan bermasyarakat, terdapat berbagai macam norma sosial yang harus dihormati oleh setiap individu. Norma-norma ini tidak hanya mengatur perilaku sehari-hari, tetapi juga mencakup nilai-nilai dan aturan yang ditetapkan bersama untuk menciptakan keteraturan, keamanan, dan kedamaian dalam hidup bermasyarakat. Adapun perilaku yang sesuai dengan norma di lingkungan masyarakat mencakup tindakan yang mendorong terciptanya rasa saling menghargai dan mendukung satu sama lain dalam komunitas tersebut. Berikut ini adalah beberapa contoh perilaku yang sesuai dengan norma yang berlaku di lingkungan masyarakat:

### **1) Membayar iuran yang Telah Disepakati di Lingkungan Masyarakat**

Norma pertama yang sangat penting dalam masyarakat adalah mematuhi kewajiban finansial yang telah disepakati bersama. Salah satu contohnya adalah membayar iuran bulanan yang berfungsi untuk menjaga kebersihan dan ketertiban lingkungan, seperti iuran untuk pengangkutan sampah atau pemeliharaan fasilitas umum lainnya. Mematuhi kewajiban ini bukan hanya sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan yang ada, tetapi juga untuk mendukung keamanan dan kenyamanan lingkungan secara keseluruhan. Dengan adanya iuran ini, semua warga dapat menikmati fasilitas bersama, dan norma ini memastikan bahwa setiap individu berkontribusi terhadap kelangsungan hidup yang lebih baik.

### **2) Tidak Melakukan Kegiatan yang Meresahkan Masyarakat**

Perilaku yang sesuai dengan norma di masyarakat mencakup tidak melakukan kegiatan yang dapat mengganggu ketenangan dan kenyamanan orang lain. Setiap individu dalam lingkungan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga kenyamanan, keamanan, dan kedamaian bersama. Misalnya, menghindari tindakan yang mengganggu ketertiban, seperti berbicara keras di tempat umum atau melakukan aktivitas yang mengganggu warga sekitar. Norma ini bersifat universal, berlaku di hampir setiap masyarakat di dunia, dan membantu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi semua pihak.

### **3) Ikut Serta dalam Kegiatan Kerja Bakti**

Kerja bakti atau gotong royong adalah salah satu tindakan yang sangat dihargai dalam masyarakat. Kegiatan ini melibatkan seluruh warga untuk bersama-sama melakukan pekerjaan yang bermanfaat, seperti membersihkan lingkungan, memperbaiki fasilitas umum, atau membantu sesama yang membutuhkan. Partisipasi dalam kegiatan ini menunjukkan rasa kepedulian terhadap lingkungan dan sesama anggota masyarakat. Keterlibatan dalam kerja bakti juga mempererat hubungan antar warga, menciptakan rasa kebersamaan, dan memastikan lingkungan tetap tertata dan bersih.

### **4) Menghormati Anggota Masyarakat Lain yang Berbeda Suku, Agama, Ras, atau Golongan**

Masyarakat terdiri dari individu-individu yang memiliki latar belakang yang beragam, baik dalam hal suku, agama, ras, maupun golongan. Salah satu norma dasar yang berlaku adalah sikap saling menghargai perbedaan ini. Setiap individu diharapkan untuk tidak mendiskriminasi orang lain berdasarkan perbedaan yang ada. Menghormati orang lain, terlepas dari latar belakang mereka, adalah bagian dari tindakan sesuai norma sosial yang mengarah pada terciptanya masyarakat yang inklusif dan damai.

Norma ini sangat penting untuk menghindari potensi konflik yang timbul akibat ketidakpahaman atau ketidakharmonisan antar kelompok. Masyarakat yang sehat dan maju adalah masyarakat yang menghargai setiap individu dengan segala perbedaan yang ada, tanpa ada pengecualian.

## **d. Kehidupan Bernegara**

Berperilaku sesuai dengan norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan kewajiban setiap warga negara. Norma yang dimaksud di sini adalah norma hukum yang ditetapkan oleh negara untuk mengatur tata tertib kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Norma ini tidak hanya mencakup kewajiban individu terhadap negara, tetapi juga mengikat seluruh anggota masyarakat dengan sanksi yang berlaku apabila melanggarnya. Sebagai bagian dari negara, setiap individu diharapkan untuk taat pada hukum yang berlaku demi terciptanya kehidupan yang tertib, aman, dan damai. Berikut adalah beberapa perilaku sesuai norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang perlu dipatuhi oleh setiap warga negara:

### 1) Mematuhi Peraturan Lalu Lintas

Salah satu contoh perilaku yang sesuai dengan norma berbangsa dan bernegara adalah mematuhi peraturan lalu lintas. Ketaatan terhadap peraturan lalu lintas bukan hanya bermanfaat untuk keselamatan diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain yang ada di sekitar kita. Peraturan lalu lintas dibuat untuk menciptakan ketertiban dalam berlalu lintas dan memastikan bahwa setiap individu dapat melakukan perjalanan dengan aman. Oleh karena itu, mematuhi rambu lalu lintas dan aturan keselamatan adalah salah satu bentuk tanggung jawab sebagai warga negara yang baik. Menjaga keselamatan diri dan orang lain di jalan raya merupakan salah satu kontribusi individu terhadap masyarakat dan negara.

### 2) Membayar Pajak Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan

Membayar pajak adalah kewajiban setiap warga negara yang sangat penting. Pajak yang dibayar oleh masyarakat digunakan untuk pembangunan negara dan untuk mendukung berbagai fasilitas umum yang bermanfaat bagi seluruh rakyat. Pajak yang dibayar dengan tepat waktu dan sesuai ketentuan merupakan salah satu bentuk kontribusi terhadap kemajuan negara. Negara, melalui pajak, dapat memperbaiki infrastruktur, memperkuat sistem pendidikan dan kesehatan, serta menyediakan layanan publik lainnya. Kepatuhan terhadap kewajiban ini mencerminkan peran aktif individu dalam memajukan negara dan memastikan kesejahteraan bersama.



*Aplikasi pembayaran pajak – shutterstock.com/1851635272*

### 3) Tidak Bertindak Main Hak Sendiri

Di dalam kehidupan bermasyarakat, terkadang muncul keinginan untuk bertindak main hakim sendiri, seperti dalam kasus perampokan atau pembegalan. Tindakan seperti ini sangat bertentangan dengan norma hukum yang berlaku di negara. Hukum negara memiliki mekanisme tersendiri dalam menangani pelanggaran hukum, dan tidak seharusnya individu bertindak sesuai dengan keinginannya sendiri. Pelanggaran hukum seperti ini tidak hanya merugikan korban, tetapi juga merusak tatanan sosial yang telah dibangun bersama. Oleh karena itu, menjaga ketertiban dan menghormati hukum adalah salah satu kewajiban sebagai warga negara yang baik, dengan tidak melibatkan diri dalam tindakan-tindakan yang dapat merugikan orang lain atau negara.

### 4) Menjaga Keamanan dan Ketertiban Umum

Setiap individu juga bertanggung jawab dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum di lingkungan sekitar mereka. Perilaku yang sesuai dengan norma berbangsa dan bernegara tercermin dalam upaya menjaga keamanan publik, baik itu di ruang publik, tempat kerja, maupun lingkungan rumah. Misalnya, menghindari kerusuhan dan tidak terlibat dalam kegiatan yang dapat mengganggu ketenangan umum. Keamanan dan ketertiban sangat dibutuhkan dalam negara agar setiap orang dapat menjalani kehidupannya dengan nyaman, tanpa takut akan ancaman atau gangguan.



## Jejak Pancasila

### Norma Agama Tergeser oleh Modernisasi

Seiring perkembangan zaman, norma agama semakin terabaikan. Generasi muda, yang lebih terbuka terhadap globalisasi, cenderung lebih toleran terhadap pelanggaran norma agama, seperti pergaulan bebas dan pengabaian kewajiban.



*Ilustrasi pondasi, jika dalam hidup fondasi lemah maka kita akan mudah goyah - id.pngtree.com*

### Contoh Soal

Apa langkah pertama yang harus dilakukan untuk mencegah pelanggaran norma dalam masyarakat?

- A. Menambah jumlah sanksi yang lebih berat
- B. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya norma
- C. Mengabaikan pelanggaran norma jika tidak merugikan banyak orang
- D. Menyalahkan individu yang melanggar norma tanpa memberikan solusi

Jawaban: B. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya norma

Pembahasan:

Langkah pertama dalam mencegah pelanggaran norma adalah dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya norma. Sosialisasi dan pendidikan yang berkelanjutan mengenai norma yang berlaku akan membantu setiap individu untuk lebih memahami peran dan tanggung jawab mereka dalam menjaga ketertiban sosial. Dengan kesadaran yang tinggi, masyarakat akan lebih taat pada norma-norma yang ada.

## Rangkuman

Bab 3 membahas pentingnya kepatuhan terhadap norma dan aturan yang berlaku dalam kehidupan sosial, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat. Manusia sebagai makhluk sosial harus mematuhi berbagai norma yang ada, seperti norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum, untuk menjaga keharmonisan dan keteraturan dalam masyarakat. Kepatuhan terhadap aturan ini berfungsi untuk menciptakan kehidupan yang lebih tertib dan aman bagi semua anggota masyarakat.

Selain itu, bab ini juga menekankan faktor-faktor yang menyebabkan pelanggaran norma, seperti kesalahan dalam proses sosialisasi, ketegangan sosial, atau dorongan ekonomi. Upaya untuk mengatasi pelanggaran norma meliputi pemberian penghargaan bagi yang mematuhi norma, serta penerapan sanksi bagi pelanggar untuk menegakkan aturan. Hal ini penting untuk menjaga agar norma yang berlaku tetap dihormati dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat.

Pentingnya berperilaku sesuai norma juga dijelaskan dalam konteks kehidupan keluarga, sekolah, masyarakat, serta kehidupan bernegara. Di setiap lingkungan, individu dituntut untuk mengikuti norma yang ada, seperti mematuhi aturan lalu lintas di jalan raya, menghargai hak orang lain, dan menjaga ketertiban umum. Semua itu bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang seimbang, adil, dan harmonis dalam masyarakat dan negara.

## Latihan Soal

1. Apa yang dimaksud dengan norma agama dalam kehidupan bermasyarakat?
  - A. Aturan yang ditetapkan oleh negara untuk mengatur hubungan antar individu
  - B. Aturan yang berdasarkan ajaran agama yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan
  - C. Norma yang mengatur hubungan sosial dalam keluarga
  - D. Aturan yang berlaku hanya di lingkungan sekolah
2. Norma apa yang mengatur perilaku manusia dalam hal sopan santun dan etika pergaulan di masyarakat?
  - A. Norma hukum
  - B. Norma agama
  - C. Norma kesusilaan
  - D. Norma kesopanan
3. Apa yang dimaksud dengan penyimpangan sosial menurut Paul B. Horton?
  - A. Perilaku yang sesuai dengan norma masyarakat
  - B. Perilaku yang menyebabkan perubahan dalam masyarakat
  - C. Perilaku yang melanggar norma-norma kelompok atau masyarakat
  - D. Perilaku yang selalu diterima oleh masyarakat
4. Apa langkah pertama yang harus dilakukan untuk mengatasi pelanggaran norma dalam masyarakat?
  - A. Memberikan sanksi berat
  - B. Menambahkan keyakinan para anggota masyarakat akan kebaikan norma-norma yang berlaku
  - C. Menghukum pelaku pelanggaran secara langsung
  - D. Mengabaikan pelanggaran jika tidak merugikan banyak orang
5. Norma yang mengatur hubungan antara individu dan negara, seperti kewajiban membayar pajak, adalah norma:
  - A. Norma agama
  - B. Norma kesopanan
  - C. Norma hukum
  - D. Norma kesusilaan

6. Tindakan apa yang sesuai dengan norma di lingkungan sekolah?
- A. Menyalahgunakan fasilitas sekolah
  - B. Memakai seragam sesuai aturan sekolah
  - C. Mengabaikan aturan sekolah
  - D. Bertindak kasar terhadap teman
7. Apa yang dimaksud dengan norma dalam kehidupan bernegara?
- A. Aturan yang mengatur kehidupan sosial dalam keluarga
  - B. Aturan yang ditetapkan oleh negara untuk menciptakan ketertiban
  - C. Aturan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan
  - D. Aturan yang berlaku hanya di masyarakat kecil

**Akses latihan soal  
lainnya di sini yuk!**



## Referensi

- Atmaja, I. K. (2022). *Norma dalam Keluarga: Peran Sosialisasi dalam Pembentukan Karakter Anak*. Pustaka Cendekia.
- Efendi, Y., dkk. (2016). *Sosial dan Budaya dalam Kehidupan Masyarakat*. Yogyakarta: Penerbit Buku Merdeka.
- Hidayat, A., dkk. (2015). *Norma Agama dan Kesusilaan dalam Masyarakat*. Jakarta: Pustaka Abadi.
- Hodriani, L., dkk. (2023). *Penyimpangan Sosial dan Penanggulangannya*. Surabaya: Salemba.
- Kholifah, S., dkk. (2021). *Peran Norma dalam Masyarakat*. Bandung: Bumi Aksara.
- Koentjaraningrat, R. (2010). *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Marzuki, M. (2008). *Norma Agama dan Kewajiban Moral dalam Kehidupan Sehari-hari*. Yogyakarta: Penerbit Karya Ilmiah.
- Pasolong, H. (2021). *Teori Sosial dan Norma dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*. Bandung: Pustaka Latifah.
- Satar, D., & Tamtomo, E. (2021). *Norma Sosial dan Hukum dalam Kehidupan Masyarakat*. Surabaya: Penerbit Ilmu Sosial.
- Subroto, P. (2021). *Etika Sosial dan Perilaku Sopan dalam Kehidupan Sehari-hari*. Malang: UMM Press.
- Wasitanmadja, S., dkk. (2018). *Norma Sosial dan Hukum dalam Kehidupan Berbangsa*. Jakarta: Penerbit Komunitas.



## BAB 4

# KEBERAGAMAN INDONESIA DALAM KERANGKA BHINNEKA TUNGGAL IKA

### Karakter Pelajar Pancasila

**Berkebinekaan global:** Menghargai keberagaman budaya, agama, dan ras dengan sikap inklusif, adil, serta menjaga keharmonisan dalam kehidupan bersama.

**Bergotong royong:** Bekerja sama dengan orang lain tanpa membeda-bedakan latar belakang serta saling membantu untuk menyelesaikan masalah secara damai.

**Bernalar kritis:** Menganalisis informasi dari berbagai sumber tentang keberagaman dan mengajukan pertanyaan yang relevan untuk memahami perbedaan secara bijak.

**Kata Kunci:** Pancasila, Nilai, Norma, Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Permasyarakatan, Keadilan, Identitas Bangsa.

### Tujuan Pembelajaran: Memahami, Menganalisis, dan Menghadapi Keberagaman

#### 1. Memahami Pentingnya Persatuan dalam Keberagaman

- ▷ Mengembangkan pemahaman tentang nilai pentingnya persatuan dalam masyarakat yang beragam
- ▷ Mengidentifikasi peran persatuan dalam menjaga keharmonisan sosial dalam masyarakat.

#### 2. Mengidentifikasi Berbagai Bentuk Keberagaman di Indonesia

- ▷ Menyelidiki berbagai bentuk keberagaman yang ada di Indonesia
- ▷ Menyusun hubungan antara bentuk-bentuk keberagaman dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika.

### **3. Menganalisis Faktor-Faktor yang Menyebabkan Perubahan Sosial dan Keberagaman**

- ▷ Menguraikan faktor-faktor yang menyebabkan perubahan sosial dalam masyarakat
- ▷ Mengevaluasi dampak perubahan sosial terhadap keberagaman yang ada di masyarakat

### **4. Menilai Tantangan dan Sikap terhadap Pengaruh Perubahan Sosial Budaya**

- ▷ Menganalisis tantangan yang dihadapi oleh masyarakat dalam menghadapi perubahan sosial dan budaya
- ▷ Mengidentifikasi sikap yang perlu dikembangkan untuk menghadapinya di tingkat lokal, nasional, dan global



**F I T R I**



## 1. Arti Persatuan dalam Keberagaman



*Persatuan dalam keberagaman, kekuatan bangsa Indonesia – Shutterstock.com/ 338973353*

Indonesia adalah negara dengan beragam etnis, agama, ras, dan budaya yang tersebar di berbagai wilayah. Keberagaman ini bukan hanya menjadi ciri khas, tetapi juga tantangan bagi bangsa ini dalam menjaga persatuan. Konsep persatuan dalam keberagaman, yang dikenal dengan semboyan *Bhinneka Tunggal Ika* (Berbeda-beda tetapi tetap satu), menggambarkan upaya Indonesia dalam menyatukan berbagai elemen masyarakat yang sangat beragam. Keberagaman ini mengandung makna mendalam tentang bagaimana berbagai perbedaan dapat bersatu dalam satu kesatuan negara yang utuh dan harmonis.

Untuk memahami bagaimana persatuan itu bisa terwujud dalam keberagaman, penting untuk mengenali faktor-faktor yang mendorong keberagaman tersebut. Faktor-faktor ini, baik yang bersifat alami maupun yang dipengaruhi oleh interaksi sosial dan sejarah panjang Indonesia, memainkan peran penting dalam membentuk masyarakat yang majemuk. Setiap faktor tidak hanya menambah keragaman, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap cara kita merayakan perbedaan yang ada, sekaligus menjaga nilai-nilai persatuan.

Keberagaman Indonesia bukanlah sesuatu yang hadir begitu saja, tetapi merupakan hasil dari berbagai faktor yang saling berhubungan. Dari letak geografis yang strategis, kondisi alam yang beragam, hingga respons masyarakat terhadap perubahan, semua faktor tersebut memiliki pengaruh dalam membentuk sebuah bangsa yang plural. Untuk itu, mari kita telusuri faktor-faktor yang mendorong keberagaman di Indonesia dan bagaimana keberagaman ini mempengaruhi cara kita menjalani hidup sebagai bangsa yang satu.

### **Faktor-Faktor yang Mendorong Keberagaman**

Keberagaman Indonesia bukan hanya sebuah kenyataan sosial, tetapi juga sebuah karakter bangsa yang kaya akan kekayaan budaya, suku, agama, ras, dan golongan. Keberagaman ini berkembang dari berbagai faktor, baik itu yang bersifat geografis, sosial, maupun budaya. Beberapa faktor penting yang mendorong terjadinya keberagaman di Indonesia akan dijelaskan sebagai berikut.

### a. Letak Geografis Indonesia yang Sangat Strategis

Letak geografis Indonesia yang berada di antara dua samudra besar, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, serta dua benua, yaitu Benua Asia dan Benua Australia, menjadikannya sebagai jalur perdagangan penting sejak zaman dahulu. Hal ini memungkinkan Indonesia untuk terpapar oleh berbagai pengaruh dari luar, baik dalam hal budaya, agama, hingga sistem pemerintahan. Selain itu, lokasi yang strategis juga mendorong terjadinya migrasi manusia yang membawa serta kebudayaan dan kepercayaan yang berbeda-beda. Dalam konteks ini, keberagaman di Indonesia muncul sebagai akibat dari interaksi intensif antara masyarakat lokal dengan bangsa-bangsa lain yang datang melalui jalur perdagangan dan eksplorasi.

Keberagaman budaya yang ada di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari posisi geografisnya yang memfasilitasi kontak antar berbagai kelompok manusia dari berbagai belahan dunia. Ini juga menunjukkan betapa pentingnya posisi Indonesia dalam menjaga keseimbangan antara mempertahankan identitas budaya lokal dengan menyerap pengaruh budaya asing yang datang. Keberagaman yang muncul dari interaksi ini pada akhirnya membentuk bangsa Indonesia yang majemuk, di mana perbedaan dihargai sebagai kekuatan yang menyatukan.

### b. Keadaan Indonesia sebagai Negara Kepulauan

Sebagai negara kepulauan yang terdiri dari lebih dari 17.000 pulau, Indonesia menghadapi tantangan geografis yang unik. Isolasi alami antara pulau-pulau sering kali menciptakan perbedaan dalam hal budaya, bahasa, serta adat istiadat. Misalnya, di pulau Jawa yang lebih padat penduduknya, budaya dan kehidupan sosial sangat berbeda dengan yang ada di Papua atau Nusa Tenggara. Perbedaan ini juga menciptakan kekayaan budaya yang luar biasa, dengan tiap pulau atau daerah mengembangkan identitasnya masing-masing.

Keberagaman ini tetap bisa disatukan melalui semangat persatuan, meskipun terpisah oleh laut dan pulau-pulau yang luas. Keberadaan jaringan komunikasi dan transportasi yang semakin berkembang memudahkan masyarakat Indonesia untuk saling mengenal dan berinteraksi. Kesadaran akan pentingnya menjaga persatuan di tengah keragaman pulau ini merupakan bagian dari identitas bangsa Indonesia, yang tercermin dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

### c. Perbedaan Kondisi Alam yang Ada di Tiap Wilayah

Keberagaman alam Indonesia juga menjadi faktor penting dalam terbentuknya keberagaman budaya dan sosial. Dari Sabang hingga Merauke, Indonesia memiliki beragam kondisi alam, seperti pegunungan yang tinggi, dataran rendah, hutan tropis yang lebat, serta pantai dan laut yang subur. Keberagaman ini mempengaruhi cara hidup masyarakat yang tinggal di masing-masing wilayah.

Di daerah-daerah yang kaya akan sumber daya alam seperti Sumatra dan Kalimantan, sebagian besar masyarakat bergantung pada pertanian, perkebunan, dan sektor sumber daya alam lainnya. Sementara itu, daerah yang lebih terisolasi atau memiliki kondisi alam yang lebih keras, seperti Papua, mengembangkan pola hidup yang lebih berfokus pada ketahanan hidup dan pemanfaatan sumber daya alam secara mandiri. Kondisi alam yang berbeda ini menjadi faktor yang memperkaya budaya



#### Jejak Pancasila

##### Keberagaman Budaya yang Luar Biasa

Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnis yang tersebar di lebih dari 17.000 pulau. Keberagaman ini tidak hanya mencakup suku bangsa, tetapi juga berbagai agama, bahasa, dan adat istiadat yang masing-masing berperan dalam memperkaya kekayaan budaya Indonesia.



Luas wilayah Indonesia sekitar 1.904.569 km<sup>2</sup>, menjadikannya negara kepulauan terbesar di dunia – Shutterstock.com/2356023271

dan tradisi masyarakat di setiap wilayah, sekaligus memperkenalkan keberagaman yang mendalam dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia.

**d. Ketersediaan Infrastruktur Transportasi dan Komunikasi yang Bervariasi**

Keberagaman infrastruktur di Indonesia turut mempengaruhi pola interaksi antar daerah. Di beberapa wilayah, akses transportasi dan komunikasi sangat terbatas, yang sering kali memperlambat pertukaran informasi dan budaya antar masyarakat di daerah-daerah yang lebih terpencil. Sebaliknya, di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Bali, perkembangan teknologi informasi dan sistem transportasi modern telah memfasilitasi pertukaran budaya yang lebih cepat dan lebih luas.

Perbedaan ini menciptakan ketimpangan dalam perkembangan sosial dan ekonomi antara daerah yang memiliki akses lebih besar terhadap infrastruktur modern dan daerah yang masih terbatas. Namun, keberagaman ini memberikan peluang bagi setiap daerah untuk mengembangkan potensi mereka sendiri, meskipun dengan tantangan yang berbeda-beda. Infrastruktur yang bervariasi ini juga membentuk cara hidup dan pola pikir masyarakat Indonesia, yang saling terhubung meskipun ada perbedaan signifikan dalam akses dan sumber daya.

**e. Cara Masyarakat Merespon Perubahan yang Berlangsung**

Setiap perubahan, baik itu sosial, politik, ekonomi, maupun budaya, selalu membawa dampak yang berbeda bagi masyarakat di berbagai wilayah Indonesia. Masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan cenderung lebih cepat beradaptasi dengan perubahan global, seperti kemajuan teknologi dan informasi. Mereka lebih terbuka terhadap perubahan sosial, seperti perubahan dalam gaya hidup dan kebiasaan, serta lebih mudah mengakses berbagai perkembangan terkini.

Di sisi lain, masyarakat di daerah pedalaman atau wilayah yang lebih terisolasi sering kali memiliki cara yang lebih konservatif dalam merespons perubahan. Meskipun mereka juga menerima perkembangan teknologi, banyak dari mereka yang tetap mempertahankan nilai-nilai tradisional dan cara hidup yang telah ada selama bertahun-tahun. Respons terhadap perubahan ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia memiliki beragam kelompok masyarakat, semua kelompok tersebut memiliki peran penting dalam membentuk kehidupan sosial yang lebih inklusif dan adaptif terhadap perubahan.

## **Pengaruh Keberagaman terhadap Masyarakat**

Keberagaman yang ada di Indonesia memberikan dampak yang sangat signifikan bagi kehidupan sosial, budaya, dan politik masyarakat. Dampak tersebut dapat berupa pengaruh positif yang memperkaya kehidupan masyarakat, namun juga memiliki dampak negatif jika tidak dikelola dengan baik. Keberagaman memunculkan tantangan dan peluang yang harus dihadapi oleh setiap individu dan kelompok untuk menciptakan keharmonisan sosial dalam masyarakat.

**a. Dampak Positif Keberagaman**

Keberagaman di Indonesia memberikan berbagai dampak positif yang sangat berharga dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa manfaat utama yang diperoleh dari keberagaman antara lain:



*Keberagaman mempererat tali persaudaraan –  
Shutterstock.com/2610131285*

▷ **Melatih Diri untuk Saling Menghormati**

Keberagaman mengajarkan pentingnya saling menghormati perbedaan, baik dalam hal budaya, agama, maupun pandangan hidup. Proses ini mendidik masyarakat untuk lebih terbuka terhadap cara hidup orang lain dan menghindari sikap diskriminatif yang dapat memecah belah persatuan.



**Jejak Pancasila**

**Keberagaman Agama yang Dijaga**

Indonesia adalah rumah bagi enam agama besar yang diakui secara resmi, serta berbagai kepercayaan lokal. Meski berbeda-beda, umat beragama di Indonesia belajar untuk saling menghormati dan mendukung satu sama lain dalam menjalankan keyakinan mereka.



*Toleransi diantara pemuka agama – RRI.co.id*

▷ **Melatih Diri untuk Saling Menghargai Perbedaan dan Bersikap Toleran**

Toleransi adalah salah satu nilai utama yang diajarkan oleh keberagaman. Masyarakat yang mampu hidup berdampingan meskipun memiliki perbedaan, cenderung lebih harmonis dan stabil. Keberagaman mengajarkan untuk bersikap sabar, menerima perbedaan, serta menghargai setiap keberagaman dalam masyarakat.

▷ **Melatih Diri untuk Meneladani Kebiasaan Baik yang Diperkenalkan oleh Berbagai Suku dan Ras**

Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa dan ras memiliki berbagai kebiasaan dan tradisi yang unik dan saling melengkapi. Meneladani kebiasaan baik ini, seperti gotong royong, saling bantu-membantu, dan menjaga keharmonisan, akan memperkaya karakter bangsa.

▷ **Memotivasi Anak Bangsa untuk Tetap Menjaga Persatuan di Tengah Perbedaan**

Keberagaman tidak hanya mendidik masyarakat dewasa, tetapi juga menjadi nilai yang harus ditanamkan pada generasi muda. Melalui pendidikan yang menekankan pentingnya persatuan dalam keberagaman, anak-anak bangsa diajarkan untuk menjaga dan merawat keragaman sebagai kekuatan.

▷ **Menunjukkan Kepada Dunia Bahwa Indonesia Merupakan Negara yang Kaya Akan Keberagaman**

Keberagaman Indonesia adalah aset bangsa yang perlu dipertahankan dan dijaga. Keberagaman ini menjadi cerminan dari kekayaan budaya, ras, agama, dan tradisi yang dimiliki oleh Indonesia. Dunia luar melihat Indonesia sebagai contoh nyata dari kehidupan yang bisa berjalan harmonis dalam perbedaan.

**b. Dampak Negatif Keberagaman**

Namun, keberagaman juga dapat menimbulkan dampak negatif jika tidak dikelola dengan baik. Beberapa dampak negatif yang dapat muncul adalah:

▷ **Perbedaan dapat Menimbulkan Perpecahan**

Meskipun keberagaman itu indah, bagi beberapa kalangan, perbedaan seringkali memunculkan ketegangan yang akhirnya bisa berujung pada perpecahan. Ketidakmampuan untuk menerima perbedaan sering kali memicu konflik horizontal antar kelompok yang berbeda.

▷ **Terjadinya Kekerasan karena Kurangnya Rasa Toleransi dan Sikap Menghargai Perbedaan**

Ketika masyarakat kehilangan rasa toleransi, kekerasan sering kali menjadi jalan keluar yang tidak sehat dalam menyelesaikan perbedaan. Kekerasan ini bisa berwujud dalam bentuk fisik, diskriminasi,

atau bahkan merusak terhadap kelompok yang dianggap berbeda. Ini jelas bertentangan dengan nilai persatuan yang seharusnya dijunjung tinggi dalam masyarakat.

▷ **Terjadi Persaingan yang Tidak Sehat**

Keberagaman dapat memicu persaingan yang tidak sehat antar kelompok, terutama dalam hal ekonomi, pendidikan, dan pekerjaan. Ketika kelompok tertentu merasa terancam oleh kelompok lain, hal ini dapat memicu ketegangan dan menciptakan jarak sosial yang semakin lebar.

▷ **Munculnya Rasisme**

Salah satu dampak buruk dari keberagaman adalah munculnya sikap rasisme. Stereotip terhadap kelompok tertentu, baik berdasarkan ras maupun etnis, sering kali merusak persatuan dan menciptakan ketidakadilan dalam masyarakat. Rasisme ini bisa menyebar dan memperburuk ketegangan antar kelompok di dalam negeri.

▷ **Terjadinya Permusuhan Antarsuku karena Perbedaan atau Pertentangan Budaya**

Perbedaan budaya, meskipun menjadi sumber kekayaan bangsa, juga bisa menimbulkan konflik jika tidak ada upaya untuk saling menghargai. Permusuhan antar suku bangsa seringkali terjadi akibat ketidakpahaman tentang kebiasaan dan tradisi masing-masing kelompok, yang pada akhirnya dapat mengancam persatuan.

▷ **Munculnya Tindak Anarkis dari Oknum Fanatik yang Mengatasnamakan Suku, Ras, maupun Agama**

Keberagaman yang tidak dikelola dengan bijak dapat mendorong munculnya tindakan ekstrem dan radikal dari kelompok tertentu. Tindak kekerasan ini sering kali dilakukan oleh oknum fanatik yang menganggap perbedaan sebagai ancaman bagi identitas mereka. Hal ini dapat merusak kerukunan dan menciptakan ketidakstabilan sosial.

**c. Menghadapi Dampak Negatif**

Keberagaman membawa tantangan tersendiri, terutama dalam menghadapi dampak negatif yang dapat merusak keharmonisan dan tatanan sosial masyarakat. Agar dampak negatif ini tidak mengganggu persatuan, ada beberapa langkah yang harus diambil untuk mengelola keberagaman dengan bijak.

▷ **Pendidikan yang Menekankan Toleransi**



*Belajar bertoleransi di bangku sekolah – Shutterstock.com/ 717494854*

Pendidikan merupakan alat utama dalam membentuk karakter dan sikap seseorang. Untuk menghindari dampak negatif dari keberagaman, sangat penting bagi sistem pendidikan Indonesia untuk menanamkan nilai-nilai toleransi sejak dini. Toleransi mengajarkan kita untuk menghormati perbedaan, menerima keragaman dalam masyarakat, dan tidak menganggap perbedaan sebagai ancaman, melainkan sebagai kekayaan.

Toleransi akan meminimalisir ketegangan yang mungkin timbul akibat perbedaan ras, agama, atau budaya. Pendidikan toleransi yang baik akan membantu generasi muda tumbuh dengan pemahaman yang lebih terbuka terhadap keberagaman di sekitar mereka.

▷ **Dialog Antar Budaya**

Dialog antar budaya sangat penting untuk mengurangi kesalahpahaman dan mempererat hubungan antara kelompok yang berbeda. Melalui komunikasi yang terbuka dan konstruktif, berbagai kelompok dapat memahami perspektif masing-masing dan menemukan titik temu dalam menjalani kehidupan bersama.

Dialog ini bisa dilaksanakan dalam berbagai forum, baik itu diskusi antar suku, antar agama, maupun antar kelompok masyarakat. Hal ini bertujuan untuk saling mengenal lebih dalam dan mengatasi stereotip yang mungkin ada. Dengan demikian, ketegangan yang dapat menyebabkan konflik dapat diminimalkan.

▷ **Penghargaan Terhadap Perbedaan**

Penghargaan terhadap perbedaan adalah salah satu cara efektif dalam menghadapi dampak negatif keberagaman. Ketika masyarakat mampu menghargai perbedaan, baik dalam hal budaya, agama, maupun latar belakang sosial, mereka akan lebih mudah hidup berdampingan secara damai.

Penghargaan terhadap perbedaan juga memperkuat identitas nasional Indonesia sebagai negara yang plural. Ketika perbedaan dihargai, masyarakat akan lebih mampu beradaptasi, bekerja sama, dan menghindari perpecahan yang disebabkan oleh perbedaan tersebut.

▷ **Mengelola Keberagaman dengan Baik**

Keberagaman yang dikelola dengan baik akan memberikan dampak positif yang luar biasa bagi negara. Mengelola keberagaman bukan hanya soal merayakan perbedaan, tetapi juga tentang bagaimana menciptakan ruang di mana semua kelompok dapat saling bekerja sama untuk kemajuan bersama.

Pengelolaan yang baik mencakup penyediaan fasilitas yang setara, kebijakan pemerintah yang adil, dan perlakuan yang sama terhadap semua warga negara tanpa memandang suku, agama, atau golongan. Dengan pengelolaan yang adil dan bijak, keberagaman dapat menjadi kekuatan yang memperkuat persatuan bangsa.

▷ **Menjaga Semangat *Bhinneka Tunggal Ika***

Semangat *Bhinneka Tunggal Ika* atau "Berbeda-beda tetapi tetap satu" adalah landasan penting yang harus dijaga oleh seluruh rakyat Indonesia. Semangat ini mengajarkan kita untuk hidup berdampingan dalam perbedaan dan memperkuat persatuan nasional.

Semangat ini tidak hanya sekedar semboyan, tetapi harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Semua kelompok dalam masyarakat harus memahami bahwa meskipun memiliki perbedaan, kita tetap satu dalam identitas nasional Indonesia. Dengan semangat ini, bangsa Indonesia akan lebih mudah mencapai cita-cita bersama untuk mewujudkan negara yang adil, makmur, dan damai.

### Contoh Soal

Bagaimana keberagaman alam Indonesia mempengaruhi kehidupan sosial dan budaya masyarakat?

- A. Masyarakat di seluruh Indonesia memiliki kebiasaan dan budaya yang seragam
- B. Keberagaman alam mengarah pada perbedaan cara hidup, tetapi tetap menjaga keharmonisan
- C. Keberagaman alam menyebabkan terjadinya perpecahan antar kelompok
- D. Masyarakat tidak terpengaruh oleh kondisi alam dalam kehidupan sosial dan budaya

Jawaban: B. Keberagaman alam mengarah pada perbedaan cara hidup, tetapi tetap menjaga keharmonisan

Pembahasan:

Keberagaman alam di Indonesia, seperti adanya pegunungan, hutan tropis, dan laut, mempengaruhi cara hidup masyarakat di tiap daerah. Misalnya, masyarakat di daerah pesisir lebih bergantung pada perikanan, sementara masyarakat di daerah pegunungan lebih bergantung pada pertanian. Meski cara hidup berbeda, masyarakat tetap menjaga keharmonisan dalam kerangka persatuan.





## 2. Persatuan dalam Keberagaman Suku, Agama, Ras, dan Golongan di Masyarakat



*Keberagaman budaya Indonesia, kekuatan dalam persatuan - goodstats.id*

Sila Persatuan Indonesia yang ada dalam Pancasila mengandung makna bahwa ada usaha yang besar dari bangsa Indonesia untuk membangun rasa persatuan dan kebulatan tekad untuk menyatukan berbagai suku, agama, ras, dan golongan. Melalui nilai persatuan ini, masyarakat diharapkan bisa menjunjung tinggi keberagaman yang ada, menghormati perbedaan, serta berusaha untuk menciptakan kehidupan bersama yang harmonis.

Persatuan yang dimaksud dalam konteks ini bukan hanya tentang kesatuan wilayah, tetapi juga tentang kesatuan sosial dan budaya yang terbangun di tengah keberagaman. Keberagaman suku, agama, ras, dan golongan, apabila dikelola dengan baik, dapat menjadi kekuatan untuk memperkuat persatuan bangsa. Sebaliknya, jika tidak dikelola dengan bijaksana, keberagaman ini dapat menjadi sumber ketegangan yang memecah belah kehidupan masyarakat.

Dengan semangat *Bhinneka Tunggal Ika*, kita bisa menjadikan keberagaman sebagai kekuatan untuk saling menghormati dan mempererat ikatan kebangsaan. Semboyan ini menggambarkan bahwa meskipun ada perbedaan, kita tetap satu dalam semangat persatuan untuk menciptakan Indonesia yang adil, makmur, dan damai. Persatuan dalam keberagaman masyarakat Indonesia meliputi beberapa hal berikut.

### **Persatuan dalam Keberagaman Suku**

Indonesia memiliki lebih dari 1.300 suku bangsa yang tersebar di berbagai pulau dan daerah. Setiap suku bangsa memiliki bahasa, adat, dan kebudayaan yang unik, yang berperan besar dalam pembentukan identitas bangsa. Keberagaman ini bisa menjadi kekuatan yang memperkaya kehidupan sosial dan budaya di Indonesia. Suku bangsa yang berbeda di Indonesia dapat bekerja sama untuk membangun negara, dengan saling menghormati budaya, adat istiadat, dan tradisi masing-masing.

Keberagaman suku ini bukanlah penghalang bagi persatuan, melainkan memperkaya budaya Indonesia. Hal ini tercermin dalam berbagai acara adat yang sering kali diselenggarakan di seluruh wilayah Indonesia. Walaupun berasal dari berbagai suku, masyarakat Indonesia tetap mampu hidup berdampingan dengan penuh toleransi dan rasa saling menghargai.

Salah satu contoh dari keberagaman suku yang memperkaya Indonesia adalah acara pawai budaya yang sering kali digelar untuk mengenalkan berbagai budaya daerah, seperti yang terlihat pada gambar pawai dengan pakaian adat di berbagai daerah di Indonesia. Pawai ini menjadi salah satu cara untuk mempererat semangat persatuan dalam keberagaman. Contoh keberagaman suku bangsa di Indonesia dapat dilihat secara lebih jelas melalui tabel berikut:

**Tabel Keberagaman Suku Indonesia**

No	Wilayah/Pulau	Suku Bangsa
1.	<b>Sumatera</b>	Aceh, Alas, Gayo, Simalungun, Singkil, Tamiang, Batak Angkola, Batak Mandailing Batak Pakpak Dairi, Batak Toba, Nias, Melayu, Minangkabau, Jambi, Kerinci Anak Dalam, Palembang, Daya, Enim, Gumai, Kayu Agung, Lampung, Penghulu, Abung Laut, dan Mentawai
2.	<b>Kalimantan</b>	Dayak Abai, Dayak Batu Payung, Dayak Bahau, Dayak Deah, Dayak Bukat, Dayak Ensalat Dayak Kayong, Dayak Mahap, Dayak Madi, Dayak Manyan, Dayak Naju, Dayak Ngaju Dayak Pampang, Dayak Ot Danum, Banjar, dan Tidung
3.	<b>Sulawesi</b>	Makassar, Bugis, Bantik, Minahasa, Rataan, Ponosakan, Tombulu, Tonsawang Tontemboan, Tonsea, Totembuan, Toulour, Gorontalo, Atinggola, Suwawa, Mandar Babonteh, Armaota, Bajao, Bancea, Banggai, Bolaang Mongondow, Buton, Luwu Mamasa, Mamuju, Toraja, Sangir, dan Talaud
4.	<b>Maluku</b>	Alifuru, Ambon, Aputai, Aru, Banda, Kei, Tanimbar, Bacan, Ternate, Tidore Tobaru, dan Tobelo
5.	<b>Papua</b>	Abau, Asmat, Amungme, Dani, Nimboran, Arandai, Arguni, Kamoro, Biak-Numfor Komba, Ayamaru, Mee, Mandobo, dan Moi
6.	<b>Jawa Bali</b>	Betawi, Banten, Badui, Sunda, Jawa, Osing, Tengger, Samin, Bawean, Cirebon Madura, dan Bali
7.	<b>Nusa Tenggara</b>	Sasak, Bima, Dompu, Sumbawa, Donggo, Mojo, Abui, Alor, Bajawa, Kemang, Lamholot Ngada, Riung, Rote, dan Sikka

## Persatuan dalam Keberagaman Agama dan Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa



*Keberagaman Agama di Indonesia – ilmupengetahuan.com*

Keberagaman agama dan kepercayaan di Indonesia adalah salah satu aspek penting yang menunjukkan betapa kaya dan pluralistiknya bangsa ini. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta tata kaidah yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan sesama manusia. Keberagaman ini bukan hanya menjadi kekuatan, tetapi juga tantangan dalam menjaga persatuan.

### a. Keberagaman Agama di Indonesia

Indonesia diakui sebagai negara dengan beragam agama yang diakui oleh pemerintah, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, serta berbagai kepercayaan lokal yang mengakui Tuhan Yang Maha Esa. Keberagaman ini tercermin dalam kehidupan sehari-hari masyarakat yang mampu hidup berdampingan meskipun memiliki keyakinan yang berbeda. Hal ini juga didukung oleh prinsip negara yang memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk memeluk agama dan kepercayaannya sesuai dengan keyakinan masing-masing.

Sila pertama Pancasila, yaitu "Ketuhanan yang Maha Esa", menunjukkan bahwa bangsa Indonesia mengakui adanya Tuhan yang satu, yang menjadi sumber dari segala kehidupan. Dalam konstitusi Indonesia, Pasal 29 Ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu." Hal ini menunjukkan bahwa negara Indonesia menghargai dan menjamin kebebasan beragama bagi seluruh rakyatnya.

### b. Toleransi Beragama di Indonesia

Toleransi beragama menjadi hal yang sangat penting di Indonesia. Dengan berbagai agama yang ada, sikap saling menghormati antar umat beragama menjadi kunci untuk menciptakan kehidupan yang damai dan harmonis. Setiap individu dan kelompok agama di Indonesia diberikan kebebasan untuk menjalankan ajaran agamanya tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pihak manapun.

Sikap saling menghormati ini tercermin dalam banyak kegiatan sosial, di mana umat beragama yang berbeda seringkali saling mengunjungi dan mengikuti perayaan agama satu sama lain. Misalnya, umat Muslim menghormati perayaan Natal umat Kristen, sementara umat Kristen juga turut menghormati Idul Fitri umat Muslim. Toleransi beragama ini bukan hanya di tingkat individu, tetapi juga telah menjadi bagian dari sistem sosial yang ada di Indonesia.

### c. Agama sebagai Pedoman Hidup

Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebagaimana tercantum dalam Pancasila, merupakan pedoman utama dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Keberagaman agama yang ada seharusnya tidak memecah belah, melainkan menjadi landasan untuk membangun rasa persatuan dan kebersamaan. Masyarakat Indonesia diajarkan untuk saling menghormati keyakinan orang lain, sehingga meskipun ada perbedaan dalam hal agama dan kepercayaan, semua tetap memiliki tujuan yang sama yaitu untuk hidup sesuai dengan ajaran Tuhan.

Hal ini sejalan dengan prinsip dalam UUD 1945 yang mengatur kebebasan beragama. Setiap individu berhak untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianut tanpa rasa takut atau diskriminasi. Toleransi dan kebebasan beragama adalah hak yang dijamin oleh negara dan harus dihargai oleh setiap warga negara.

### d. Tantangan dalam Menjaga Persatuan dalam Keberagaman Agama

Meski sudah ada banyak upaya untuk menjaga toleransi antar agama, tantangan tetap ada, seperti munculnya paham ekstremisme atau radikalisme yang dapat mengancam persatuan. Namun, dengan memperkuat pendidikan toleransi, pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat dapat bekerja sama untuk menanggulangi isu-isu intoleransi dan radikalisme yang muncul.

Penting juga untuk memastikan bahwa keberagaman agama tidak digunakan sebagai alat politik yang dapat memperburuk situasi atau memecah belah masyarakat. Keberagaman agama di Indonesia seharusnya menjadi sumber kekuatan, bukan sumber konflik. Oleh karena itu, penting untuk selalu mengingatkan masyarakat tentang pentingnya menjaga persatuan dalam kerangka keberagaman ini.

### e. Peran Pemerintah dalam Menjaga Keberagaman Agama

Pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga dan memelihara keberagaman agama yang ada di negara ini. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan memastikan bahwa setiap agama mendapatkan perlakuan yang adil dan setara di mata hukum. Pemerintah juga berperan dalam memfasilitasi dialog antar umat beragama agar tercipta saling pengertian dan penghargaan.

Melalui berbagai kebijakan yang mendukung kebebasan beragama, serta pendidikan yang menekankan nilai toleransi, Indonesia bisa menjaga keberagaman agama sebagai bagian dari identitas bangsa yang kuat. Kerjasama antar agama sangat diperlukan untuk menciptakan iklim yang harmonis dan damai, di mana setiap individu bebas untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.



### Jejak Pancasila

#### Persatuan dalam Keberagaman Agama

Indonesia adalah negara dengan enam agama resmi yang diakui, yaitu Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Meskipun demikian, agama-agama ini hidup berdampingan dengan penuh toleransi berkat ajaran-ajaran yang mengedepankan rasa saling menghormati.



*Persatuan dalam keragaman agama yang ada di Indonesia - Pinterest.com*

## Persatuan dalam Keberagaman Ras

Indonesia adalah negara yang sangat kaya akan keberagaman ras. Keberagaman ini bukan hanya terbatas pada suku bangsa dan agama, tetapi juga mencakup perbedaan ras yang membentuk identitas sosial dan budaya bangsa. Meskipun ada berbagai kelompok ras yang mendiami Indonesia, negara ini

mampu menjaga persatuan dengan menjunjung tinggi semangat Bhinneka Tunggal Ika – beragam suku, agama, ras, dan golongan, namun tetap satu. Persatuan dalam keberagaman ras di Indonesia sangat penting untuk menjaga keharmonisan sosial dan menghindari terjadinya diskriminasi antar kelompok ras yang berbeda.

Indonesia memiliki empat kelompok ras utama, yang masing-masing memiliki ciri fisik dan budaya yang khas. Berikut adalah penjelasan mengenai ras-ras tersebut:

**b. Ras Malayan Mongoloid**

Ras Malayan Mongoloid merupakan kelompok ras yang paling dominan di Indonesia, mencakup mayoritas penduduk di Jawa, Sumatra, Bali, Madura, dan daerah lainnya. Ciri fisiknya antara lain kulit kuning hingga cokelat muda, rambut lurus hitam, dan mata sipit. Kelompok ini memiliki budaya yang sangat beragam, dipengaruhi oleh sejarah dan kepercayaan setempat. Di Jawa, budaya dipengaruhi kerajaan Hindu-Buddha dan Islam, sementara di Bali dipengaruhi kuat oleh agama Hindu. Meski beragam, mereka tetap saling menghormati dan menjaga persatuan bangsa.

**c. Ras Melanesoid**

Ras Melanesoid banyak terdapat di Papua dan sebagian Maluku, dengan ciri fisik seperti kulit gelap, rambut keriting, wajah lebar, dan hidung pesek. Mereka memiliki kekayaan budaya yang khas, seperti sistem kekerabatan yang kuat dan seni tradisional yang beragam. Suku-suku seperti Asmat dan Dani hidup selaras dengan alam. Meski budayanya berbeda, masyarakat Melanesoid tetap hidup harmonis dan saling menghormati dengan ras lain di Indonesia.

**d. Ras Asiatik-Mongoloid**

Ras Asiatik-Mongoloid umumnya berada di wilayah utara Indonesia seperti Kalimantan dan Sulawesi, dengan ciri fisik kulit kuning hingga cokelat muda, mata sipit, dan rambut lurus. Suku-suku seperti Dayak dan Toraja memiliki budaya yang kaya dan beragam, serta menjunjung tinggi tradisi gotong royong. Keberagaman adat, seni, dan tradisi dalam kelompok ini memperkaya budaya nasional, dengan semangat saling menghormati demi menjaga persatuan.

**e. Ras Kaukasoid**

Ras Kaukasoid di Indonesia, meskipun jumlahnya lebih sedikit, terdiri dari keturunan Eropa, Arab, dan India. Ciri fisiknya meliputi kulit terang, rambut lurus atau ikal, dan mata berwarna biru atau hijau. Kelompok ini berperan penting dalam sejarah, terutama pada masa kolonial, dan tetap berkontribusi dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. Kehadiran mereka memperkaya keberagaman Indonesia dengan pengaruh budaya, sistem pemerintahan, dan adat-istiadat.

**Persatuan dalam Keberagaman Golongan**

Golongan sosial dalam masyarakat Indonesia mengacu pada kelompok-kelompok yang dibedakan berdasarkan status ekonomi, pendidikan, profesi, usia, dan berbagai faktor lainnya yang mempengaruhi kehidupan sosial. Keberagaman golongan ini sangat penting karena memberikan gambaran tentang peran setiap kelompok dalam masyarakat. Meskipun terdapat perbedaan, setiap golongan memiliki kontribusi penting dalam pembangunan negara. Persatuan antar golongan sangat diperlukan untuk menciptakan kerukunan sosial dan menjaga stabilitas negara.



*Berbagi kasih, salah satu wujud nyata persatuan bangsa – Pinterest.com*

### a. Golongan Berdasarkan Status Ekonomi

Golongan masyarakat di Indonesia dapat dikelompokkan berdasarkan status ekonomi, yang biasanya dibagi menjadi tiga kategori: golongan ekonomi lemah (misalnya, golongan miskin), golongan ekonomi menengah, dan golongan ekonomi kuat (golongan kaya). Perbedaan status ekonomi ini terlihat jelas dalam distribusi kekayaan dan pendapatan di masyarakat. Namun, meskipun ada perbedaan dalam hal kekayaan, semua golongan tetap memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pembangunan negara.

Persatuan antar golongan ekonomi sangat penting untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Golongan ekonomi yang lebih kuat diharapkan dapat membantu golongan yang lebih lemah melalui program-program pemberdayaan ekonomi dan bantuan sosial yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi.

### b. Golongan Berdasarkan Pendidikan

Selain berdasarkan status ekonomi, golongan juga dapat dibedakan berdasarkan tingkat pendidikan. Ada golongan yang memiliki tingkat pendidikan dasar, menengah, atau bahkan pendidikan tinggi. Pendidikan memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup individu dan masyarakat secara keseluruhan. Masyarakat yang terdidik cenderung lebih mudah mengakses peluang ekonomi, politik, dan sosial.

Namun, untuk menciptakan persatuan dalam keberagaman pendidikan, penting bagi negara untuk menyediakan akses pendidikan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat, tidak memandang golongan mana pun. Pendidikan yang inklusif akan mengurangi kesenjangan sosial dan memperkuat persatuan.

### c. Golongan Berdasarkan Pekerjaan dan Profesi



#### Jejak Pancasila

Petani dan nelayan, yang sering disebut sebagai golongan ekonomi lemah, menyumbang secara signifikan terhadap ketahanan pangan nasional.



*Petani menyumbang 29% tenaga kerja nasional - freepik.com*

Golongan sosial juga dibedakan berdasarkan pekerjaan atau profesi. Masyarakat Indonesia memiliki berbagai profesi, antara lain petani, nelayan, pedagang, pegawai negeri sipil (PNS), anggota TNI, Polri, guru, dokter, serta pekerja di sektor swasta. Setiap profesi memiliki kontribusi yang sangat penting terhadap perkembangan ekonomi dan sosial negara.

Meskipun golongan berdasarkan pekerjaan ini sangat beragam, yang perlu dijaga adalah penghargaan terhadap setiap profesi. Tanpa adanya golongan tertentu, seperti petani dan nelayan, produksi pangan dan kebutuhan dasar lainnya akan terhambat. Di sisi lain, golongan seperti tenaga pendidik, tenaga medis, dan aparat negara juga sangat berperan dalam mendukung pembangunan pendidikan, kesehatan, dan keamanan negara. Semua golongan ini harus dihormati dan diberi kesempatan yang sama untuk berkembang.

### d. Golongan Berdasarkan Usia

Golongan sosial di Indonesia juga bisa dibedakan berdasarkan usia, yang terdiri dari anak-anak (0-14 tahun), usia produktif (15-64 tahun), dan usia lanjut (65 tahun ke atas). Setiap kelompok usia memiliki peran penting dalam kehidupan sosial. Golongan muda, misalnya, seringkali menjadi agen perubahan dan inovasi. Sementara itu, golongan usia lanjut memiliki pengalaman hidup yang dapat memberikan bimbingan dan arahan dalam berbagai aspek kehidupan.

Pemerintah Indonesia telah memperkenalkan kebijakan yang membedakan golongan berdasarkan usia, seperti kebijakan mengenai pendidikan untuk anak-anak dan kebijakan pensiun bagi golongan usia lanjut. Mengingat peran penting masing-masing golongan dalam pembangunan sosial dan ekonomi, penting bagi negara untuk memastikan hak dan kesejahteraan setiap golongan dihargai dan dijaga.

**e. Golongan Berdasarkan Afiliasi Politik**

Keberagaman golongan juga mencakup perbedaan afiliasi politik. Masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai partai politik, dengan perbedaan pandangan dan ideologi politik. Meskipun perbedaan ini seringkali menonjol, persatuan antar golongan politik sangat penting untuk menjaga stabilitas negara. Dalam demokrasi, setiap golongan politik memiliki hak untuk menyuarakan pendapatnya, namun harus tetap mengutamakan kepentingan bersama dan menjaga keharmonisan nasional.

Penting untuk menjaga agar perbedaan politik tidak mengarah pada perpecahan atau kekerasan. Indonesia perlu menegakkan sistem politik yang sehat, di mana semua golongan politik dapat bekerja sama untuk kepentingan negara tanpa mengesampingkan perbedaan pandangan mereka.

**f. Peran Pemerintah dalam Menjaga Persatuan Antar Golongan**

Pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga persatuan antar golongan. Salah satu langkah penting yang dilakukan adalah melalui kebijakan yang menjamin hak-hak semua golongan untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik, sosial, dan ekonomi negara. Salah satu contohnya adalah UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang membedakan golongan penduduk di Indonesia menjadi warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

Keberagaman golongan ini, meskipun bisa menjadi tantangan dalam menjaga persatuan, bukanlah halangan untuk bekerja sama dalam mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Dengan saling menghormati dan hidup rukun dalam keberagaman ini, persatuan antar golongan akan terjaga dengan baik.



**Contoh Soal**

Bagaimana cara mengatasi tantangan yang muncul akibat perbedaan golongan dalam masyarakat?

- A. Dengan membiarkan perbedaan golongan memperburuk keadaan
- B. Dengan menciptakan kebijakan yang tidak memihak satu golongan
- C. Dengan memperkuat pemahaman tentang kesetaraan hak dan kesempatan bagi setiap golongan
- D. Dengan memisahkan golongan berdasarkan status sosial

Jawaban: C. Dengan memperkuat pemahaman tentang kesetaraan hak dan kesempatan bagi setiap golongan

Pembahasan:

Tantangan dalam perbedaan golongan dapat diatasi dengan cara memperkuat pemahaman tentang kesetaraan hak dan kesempatan. Dengan memastikan bahwa setiap golongan memiliki akses yang sama terhadap pendidikan, pekerjaan, dan layanan sosial, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan harmonis.



### 3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perubahan Sosial dan Keberagaman



*Teknologi salah satu pengaruh perubahan sosial – Shutterstock.com/ 2503261815*

Perubahan sosial adalah fenomena yang tidak dapat dihindari dalam masyarakat yang berkembang. Faktor-faktor yang menyebabkan perubahan sosial dapat dibedakan menjadi dua kelompok utama, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor-faktor ini berperan besar dalam mengubah struktur sosial dan dinamika keberagaman masyarakat.

#### **Faktor Internal**

Faktor internal yang menyebabkan perubahan sosial adalah faktor yang bersumber dari dalam masyarakat itu sendiri. Beberapa faktor internal yang dapat mempengaruhi perubahan sosial dan keberagaman di Indonesia adalah:

##### **a. Perubahan Jumlah Penduduk**

Perubahan dalam jumlah penduduk yang bertambah atau berkurang dapat mempengaruhi struktur sosial masyarakat. Misalnya, bertambahnya jumlah penduduk dapat menyebabkan peningkatan permintaan terhadap kebutuhan dasar, seperti makanan, tempat tinggal, dan layanan publik lainnya. Hal ini juga bisa menyebabkan terjadinya perubahan dalam pola hidup dan distribusi kekayaan di dalam masyarakat. Sebaliknya, berkurangnya jumlah penduduk dapat mengurangi tekanan terhadap sumber daya dan layanan sosial.

Contoh:

- ▷ Peningkatan jumlah penduduk di kota-kota besar dapat mengubah pola permukiman dan pekerjaan di perkotaan.
- ▷ Berkurangnya jumlah penduduk di daerah pedesaan dapat menyebabkan perubahan dalam cara bertani dan mata pencaharian lainnya.

##### **b. Penemuan-Penemuan Baru**

Penemuan baru atau inovasi dalam berbagai bidang, baik itu dalam teknologi, ilmu pengetahuan, maupun seni, dapat mendorong perubahan sosial yang signifikan. Penemuan baru ini sering kali membawa ide-ide baru yang dapat memengaruhi cara hidup dan kebiasaan masyarakat.

Contoh:

- ▷ Penemuan teknologi baru seperti aplikasi belanja online mempermudah transaksi perdagangan dan mendorong perubahan dalam pola konsumsi masyarakat.
- ▷ Penemuan dalam bidang kesehatan juga dapat mengubah gaya hidup masyarakat, misalnya penemuan vaksin atau metode pengobatan baru.

### c. Perkembangan Teknologi

Perkembangan teknologi sangat mempengaruhi pola pikir dan perilaku manusia. Inovasi dalam teknologi, seperti internet dan media sosial, tidak hanya mengubah cara berkomunikasi, tetapi juga mempercepat arus informasi dan memengaruhi hubungan antar individu maupun antar kelompok dalam masyarakat.

Contoh:

Teknologi digital memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi dengan cepat, yang berkontribusi pada perubahan pola pikir dan budaya masyarakat, serta memperluas interaksi sosial yang melintasi batas-batas geografis.

### d. Pertentangan atau Konflik

Perubahan sosial juga dapat dipengaruhi oleh pertentangan atau konflik antar kelompok dalam masyarakat. Konflik yang terjadi bisa memengaruhi cara kelompok-kelompok tersebut berinteraksi satu sama lain dan berkontribusi pada terciptanya perubahan sosial.

Contoh:

Konflik antar kelompok yang berbeda latar belakang sosial, budaya, atau agama dapat memicu perubahan dalam kebijakan sosial atau bahkan dalam struktur pemerintahan yang lebih inklusif dan menghargai keberagaman.

### e. Keterbukaan Masyarakat

Masyarakat yang terbuka terhadap perubahan akan lebih mudah menerima pengaruh positif dari luar, seperti teknologi atau budaya asing. Keterbukaan ini memungkinkan masyarakat untuk belajar dari pengalaman dan perkembangan di luar komunitas mereka, yang pada akhirnya mendorong perubahan sosial yang lebih dinamis.

Contoh:

Masyarakat yang terbuka terhadap keberagaman budaya akan lebih mudah menerima perbedaan, yang memperkaya budaya lokal dan menciptakan iklim sosial yang lebih inklusif.

### f. Pemberontakan atau Revolusi

Revolusi atau pemberontakan seringkali memicu perubahan sosial yang besar. Perubahan yang radikal ini biasanya disebabkan oleh ketidakpuasan masyarakat terhadap sistem atau struktur yang ada, dan menginginkan perubahan besar untuk mencapai keadilan sosial.

Contoh:

Revolusi yang terjadi pada masa kemerdekaan Indonesia menunjukkan perubahan besar dalam struktur sosial dan politik, yang mengarah pada pembentukan negara yang merdeka dan berdaulat.

## Faktor Eksternal

Faktor eksternal yang menyebabkan perubahan sosial adalah faktor yang berasal dari luar masyarakat atau negara, yang memengaruhi cara hidup, budaya, atau kebijakan dalam suatu negara. Beberapa faktor eksternal yang dapat mempengaruhi perubahan sosial dan keberagaman adalah:

**a. Lingkungan Alam (Lingkungan Fisik)**



*Banjir merupakan salah satu faktor eksternal perubahan – kompaspedia.kompas.id*

Perubahan lingkungan alam atau bencana alam seperti gempa bumi, banjir, atau tsunami dapat mempengaruhi struktur sosial suatu masyarakat. Bencana alam dapat menyebabkan perpindahan penduduk, perubahan pekerjaan, dan bahkan perubahan pola hidup masyarakat.

Contoh:

Tsunami yang terjadi di Aceh pada tahun 2004 menyebabkan perubahan besar dalam struktur sosial dan ekonomi masyarakat Aceh. Beberapa penduduk yang tinggal di pesisir terpaksa pindah ke daerah yang lebih aman dan mengubah mata pencaharian mereka, seperti yang terjadi pada nelayan yang beralih menjadi petani setelah tsunami.

**b. Peperangan**

Perang dan konflik bersenjata dapat menyebabkan perubahan sosial yang signifikan dalam masyarakat. Biasanya, pihak yang menang dalam peperangan berusaha untuk mendominasi dan menerapkan sistem, nilai, serta norma mereka pada kelompok yang kalah.

Contoh:

Perang kemerdekaan Indonesia melawan penjajah Belanda memunculkan perubahan sosial dalam hal struktur pemerintahan dan sistem politik, yang kemudian mengarah pada pendirian negara Indonesia yang merdeka.

**c. Kontak Kebudayaan dengan Masyarakat Lain**

Perubahan sosial juga dapat dipengaruhi oleh kontak kebudayaan antar negara atau masyarakat. Interaksi dengan budaya asing dapat memperkenalkan ide-ide baru yang mempengaruhi pola hidup, nilai, dan norma dalam masyarakat.

Contoh:

Pengaruh kebudayaan Barat, melalui media massa dan internet, membawa nilai-nilai baru tentang individualisme, teknologi, dan cara hidup yang lebih modern. Hal ini juga memengaruhi budaya lokal dan menciptakan perubahan dalam pola konsumsi, cara berpakaian, dan bahkan pola pikir generasi muda.



## Jejak Pancasila

- ▷ **Pertumbuhan e-commerce di Indonesia** mencapai nilai triliunan rupiah per tahun, mengubah perilaku belanja masyarakat dalam waktu singkat.
- ▷ **Revolusi industri digital** memungkinkan UMKM (usaha mikro kecil menengah) di pelosok desa memasarkan produk ke luar negeri.



*Berbelanja online, wujud perubahan sosial modern – freepik.com*

### Contoh Soal

Salah satu tantangan terbesar dalam menjaga persatuan dalam keberagaman agama adalah...

- A. Kesulitan bahasa antar umat beragama
- B. Perbedaan cara berpakaian antar agama
- C. Radikalisasi dan ekstremisme agama
- D. Kekurangan fasilitas ibadah

Jawaban: C. Radikalisasi dan ekstremisme agama

Pembahasan:

Radikalisasi dan ekstremisme agama adalah tantangan besar dalam menjaga persatuan antar umat beragama. Ketika ideologi yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai toleransi dan saling menghormati muncul, dapat menyebabkan konflik. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat nilai-nilai toleransi dan keberagaman dalam masyarakat.



## 4. Tantangan Menghadapi Perubahan Sosial Budaya di Berbagai Level



*Teknologi menjangkau hingga seluruh penjuru Indonesia – Shutterstock.com/1505143484*

Perubahan sosial budaya yang terjadi di tingkat lokal, nasional, dan global dapat membawa dampak positif dan negatif bagi masyarakat. Dalam konteks Indonesia, yang kaya akan keberagaman suku, agama, ras, dan golongan, perubahan ini membawa tantangan yang perlu dihadapi dengan bijak. Sikap yang tepat terhadap pengaruh perubahan sosial budaya sangat penting untuk menjaga persatuan dan keharmonisan di tengah keberagaman.

### **Dampak Positif Perubahan Sosial Budaya**

Perubahan sosial budaya membawa banyak dampak positif, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Di tingkat lokal, misalnya, perubahan dalam pola pikir dan perilaku masyarakat dapat menghasilkan integrasi sosial yang lebih baik. Masyarakat yang lebih terbuka terhadap perbedaan akan lebih mudah menerima ide-ide baru yang dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. Selain itu, perkembangan teknologi juga mendorong masyarakat untuk lebih efisien dalam berinteraksi dan beraktivitas.

Di tingkat nasional, perubahan sosial budaya memberikan peluang bagi pembangunan yang lebih merata, dengan semakin berkembangnya lembaga-lembaga sosial dan kemajuan teknologi. Perubahan ini juga membantu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keberagaman dan toleransi, yang menjadi dasar bagi persatuan bangsa Indonesia.

Di tingkat global, perkembangan sosial budaya yang terjadi dapat mempererat hubungan antarnegara dan membuka peluang kerjasama internasional dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan.

Contoh Dampak Positif:

- ▷ Perkembangan teknologi yang memudahkan komunikasi antar wilayah, bahkan antar negara, mempercepat proses informasi dan memperluas kesempatan kerjasama.
- ▷ Integrasi sosial yang tercipta karena masyarakat semakin terbuka terhadap keberagaman agama, suku, dan ras.

## Dampak Negatif Perubahan Sosial Budaya

Tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan sosial budaya juga dapat membawa dampak negatif. Di tingkat lokal, perubahan ini bisa menyebabkan disintegrasi sosial, terutama jika tidak ada upaya untuk menjaga keberagaman budaya secara seimbang. Ketidakseimbangan antara adopsi budaya luar dengan pelestarian budaya lokal dapat mengarah pada hilangnya identitas budaya daerah.

Di tingkat nasional, ketegangan antar kelompok masyarakat yang berbeda latar belakang bisa meningkat jika tidak ada kebijakan yang inklusif dan adil. Misalnya, ketimpangan dalam akses pendidikan atau pekerjaan dapat memperburuk kesenjangan sosial. Di sisi lain, perubahan dalam nilai-nilai sosial budaya juga dapat menyebabkan kemunculan gaya hidup konsumtif yang tidak sejalan dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, seperti gotong royong dan solidaritas sosial.

Di tingkat global, dampak negatif lainnya adalah penyebaran ekstremisme budaya atau bahkan radikalisme yang dapat merusak perdamaian dunia. Kontak antarbudaya yang tidak dikelola dengan bijak dapat menimbulkan ketegangan, diskriminasi, dan intoleransi.

Contoh Dampak Negatif:

- ▷ Penyebaran gaya hidup konsumtif yang berfokus pada materi, yang mengarah pada penurunan nilai-nilai kekeluargaan dan gotong royong.
- ▷ Munculnya demonstrasi dan aksi protes sosial sebagai reaksi terhadap ketidakpuasan terhadap perubahan yang terjadi dalam masyarakat.

## Sikap terhadap Pengaruh Perubahan Sosial Budaya



*Mempelajari tari tradisional merupakan sikap pemikiran terbuka – freepik.com*

Untuk menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh perubahan sosial budaya, dibutuhkan sikap yang bijak, terbuka, dan kritis dari masyarakat. Berikut adalah beberapa sikap yang perlu dimiliki dalam menghadapi perubahan sosial budaya:

### a. Pemikiran Terbuka (*Open Minded*)

Pemikiran terbuka sangat penting dalam menghadapi perubahan sosial budaya. Masyarakat yang memiliki sikap terbuka akan lebih mudah menerima ide-ide baru dan dapat menilai perubahan secara objektif. Sikap ini memungkinkan individu dan kelompok untuk mengadaptasi diri dengan perkembangan zaman tanpa harus meninggalkan nilai-nilai yang telah ada.

Contoh:

Masyarakat yang terbuka terhadap perbedaan agama dan budaya akan lebih mudah menerima keragaman sebagai kekuatan yang memperkaya bangsa.

**b. Sikap Antisipatif**

Sikap antisipatif adalah kemampuan untuk merespons dengan cepat dan tepat terhadap perubahan yang sedang atau akan terjadi. Masyarakat yang antisipatif akan lebih siap menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang muncul dari perubahan sosial budaya.

Contoh:

Mengantisipasi dampak perubahan teknologi seperti penggunaan media sosial yang dapat mempengaruhi pola komunikasi dan budaya masyarakat.

**c. Selektif terhadap Perubahan**

Perubahan tidak selalu membawa dampak positif. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk bersikap selektif dalam menerima perubahan. Masyarakat harus mampu memilih perubahan yang memberikan manfaat bagi kemajuan sosial dan budaya mereka, sambil tetap mempertahankan nilai-nilai budaya asli yang penting.

Contoh:

Memilih untuk mengadopsi teknologi yang meningkatkan kualitas hidup, seperti aplikasi edukasi, tetapi tetap mempertahankan nilai-nilai kekeluargaan dalam kehidupan sehari-hari.

**d. Sikap Adaptif**

Proses seleksi terhadap perubahan sosial budaya juga membutuhkan sikap adaptif, yaitu kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada. Jika perubahan tersebut memiliki dampak positif, maka masyarakat harus siap untuk mengikuti perubahan tersebut dengan bijaksana.

Contoh:

Menyesuaikan pola hidup dengan perkembangan teknologi yang mempermudah komunikasi dan kerja jarak jauh tanpa mengabaikan aspek sosial dalam kehidupan.

**e. Tidak Meninggalkan Kebudayaan Asli**

Walaupun perubahan sosial budaya membawa inovasi dan kemajuan, masyarakat tidak boleh melupakan kebudayaan asli yang menjadi identitas bangsa. Masyarakat harus menjaga nilai-nilai budaya luhur yang terkandung dalam budaya Indonesia, seperti gotong royong, kekeluargaan, dan saling menghormati.

Contoh:

Tetap melestarikan kebudayaan lokal, seperti tarian tradisional dan upacara adat, meskipun menerima pengaruh budaya global.



## Jejak Pancasila

- ▷ Sekitar 77% masyarakat Indonesia kini menggunakan internet, sehingga perubahan sosial akibat teknologi makin cepat terasa di berbagai pelosok.
- ▷ Indonesia memiliki lebih dari 718 bahasa daerah, dan sebagian mulai terancam punah karena pengaruh globalisasi jika tidak dilestarikan.
- ▷ Media sosial di Indonesia bukan hanya jadi tempat hiburan, tetapi juga alat penyebaran budaya lokal, seperti tari, kuliner, dan bahasa daerah.



Wayang Orang Sriwedari, budaya hadir di live TikTok. – detik.com

### Contoh Soal

Apa yang menjadi tantangan utama di tingkat nasional terkait perubahan sosial budaya di Indonesia?

- A. Meningkatnya jumlah penduduk di kota besar
- B. Ketimpangan antara perkembangan kota dan desa
- C. Perbedaan agama antar daerah
- D. Peningkatan jumlah suku bangsa

Jawaban: B. Ketimpangan antara perkembangan kota dan desa

Pembahasan:

Ketimpangan antara kota dan desa adalah salah satu tantangan utama dalam perubahan sosial budaya di tingkat nasional. Perkembangan kota-kota besar yang cepat tidak selalu sebanding dengan perkembangan desa-desa yang seringkali tertinggal, baik dari segi ekonomi, pendidikan, maupun infrastruktur. Hal ini menciptakan kesenjangan sosial yang berpotensi menimbulkan ketegangan antar golongan dan wilayah.

## Kegiatan Kelompok 1

**Judul: Sikap Bijak Terhadap Perubahan Sosial Akibat Internet**

**Tujuan: Memahami perubahan sosial karena internet di sekitar kita dan menentukan sikap sesuai nilai-nilai Pancasila.**

Internet memudahkan belajar dan berkomunikasi, namun juga menghadirkan tantangan seperti hoaks, perundungan siber, dan kebocoran data. Agar tetap bijak, lakukan kegiatan berikut secara berkelompok (4–5 siswa).

### Langkah Kegiatan

1. Bentuk kelompok dan bagi peran sederhana: ketua, pencatat, penyaji.
2. Diskusikan arti internet bagi pelajar. Catat tiga perubahan yang kalian rasakan di sekolah/rumah/lingkungan.
3. Untuk tiap perubahan, tentukan satu dampak positif dan satu dampak negatif.
4. Rumuskan tiga butir “Etika Digital Pancasila” (sikap/aturan yang harus dilakukan) dan tulis sila yang mendukungnya.
5. Buat poster atau slide 1 halaman dan presentasikan 2–3 menit. Kelompok lain memberi 1 apresiasi dan 1 saran.
6. Refleksi individu 2–3 kalimat: tindakan Pancasila yang akan kamu lakukan besok.

Aspek yang Dikaji	Contoh Kejadian (Sekolah/Rumah)	Dampak Positif	Dampak Negatif	Sila Pancasila Terkait	Sikap/Tindakan yang Disarankan
Media Sosial					
Belajar Daring					
Keamanan Data Pribadi					
Komunikasi dan Etika Digital					
Konten Hiburan/Game					



## 5. Keberagaman dalam Perspektif Bhinneka Tunggal Ika



*Simbol persatuan Indonesia - istockphoto.com*

Pada UU RI No. 24 Tahun 2009 yang mengatur tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, disebutkan bahwa lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Garuda Pancasila. Garuda ini digambarkan dengan kepala yang menoleh ke kanan, perisai yang digantung dengan rantai pada lehernya, dan semboyan "Bhinneka Tunggal Ika" tertulis di atas pita yang dicengkeram oleh Garuda. Ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat banyak perbedaan di Indonesia, semangat persatuan tetap harus dijaga.

Semboyan Bhinneka Tunggal Ika berasal dari bahasa Jawa Kuno, yang secara harfiah memiliki arti "Berbeda-beda tetapi tetap satu". Semboyan ini menunjukkan bagaimana Indonesia yang kaya akan keberagaman suku, agama, ras, dan budaya tetap harus bersatu sebagai satu bangsa. Hal ini tertuang dalam karya monumental dari Mpu Tantular yang berjudul Kakawin Sutasoma yang ditulis pada abad ke-14 Masehi di Kerajaan Majapahit.

### Analisis Makna Bhinneka Tunggal Ika

Semboyan Bhinneka Tunggal Ika memiliki makna yang mendalam dan esensial bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Berdasarkan analisis kata, semboyan ini terdiri dari tiga kata utama, yaitu: *bhinneka*, *tunggal*, dan *ika*. Setiap kata memiliki makna yang sangat penting, yang jika dipahami dengan baik akan menggambarkan semangat persatuan dalam keberagaman yang ada di Indonesia.

#### a. *Bhinneka*

Kata *bhinneka* berasal dari kata *bhina*, yang berarti "berbeda-beda" atau "beragam". Secara harfiah, kata ini mengandung pengertian bahwa ada banyak perbedaan yang terjadi dalam suatu kelompok atau masyarakat. Dalam konteks Indonesia, *bhinneka* merujuk pada beragamnya aspek yang ada dalam bangsa ini, mulai dari suku bangsa, agama, ras, bahasa, hingga budaya. *Bhinneka* menggambarkan kenyataan yang tak terbantahkan bahwa Indonesia adalah negara yang sangat plural. Masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai elemen yang memiliki perbedaan yang sangat banyak, dan perbedaan itu bukanlah hal yang perlu dihindari atau disembunyikan, melainkan harus diterima dan dihargai.

## b. Tunggal

Kata tunggal berarti "satu". Dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika, tunggal mengandung pesan bahwa meskipun terdapat banyak perbedaan, semuanya terikat dalam satu kesatuan yang utuh. Satu kesatuan itu adalah Bangsa Indonesia. Kata tunggal menegaskan bahwa meskipun masyarakat Indonesia sangat beragam dalam hal suku, agama, budaya, dan lainnya, mereka tetap menjadi satu bangsa yang memiliki tujuan bersama. Konsep tunggal ini menyiratkan pentingnya rasa persatuan, solidaritas, dan kebersamaan dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global.

## c. Ika

Kata ika berarti "itu", yang menunjukkan bahwa perbedaan-perbedaan yang ada itu adalah bagian dari satu kesatuan. Ika mengandung pesan bahwa keberagaman yang terlihat tidak menghalangi persatuan, tetapi justru menjadi elemen yang memperkaya dan menguatkan bangsa Indonesia. Melalui kata ika, semboyan ini menegaskan bahwa meskipun perbedaan itu tampak jelas di permukaan, dalam kenyataannya, perbedaan-perbedaan itu bersatu dalam satu tujuan yang sama, yaitu untuk membangun bangsa Indonesia yang harmonis dan maju.

## Makna Mendalam Semboyan Bhinneka Tunggal Ika



*Merayakan keberagaman budaya Indonesia melalui pawai adat – istockphoto.com*

Secara keseluruhan, Bhinneka Tunggal Ika dapat dipahami sebagai ajakan untuk menerima keberagaman dan sekaligus menghargai persatuan yang ada di tengah perbedaan. "Yang berbeda-beda itu adalah satu" bukan berarti perbedaan harus disamakan atau dihapuskan, tetapi perbedaan-perbedaan tersebut tetap diakui dan dihargai, serta disatukan dalam satu kesatuan yang utuh sebagai bangsa Indonesia.

Dalam kehidupan sehari-hari, semboyan ini mengajarkan kita untuk:

- a. Menerima perbedaan: Kita hidup dalam masyarakat yang plural, sehingga menerima perbedaan adalah kunci untuk menciptakan keharmonisan sosial. Perbedaan dalam budaya, agama, suku, dan bahasa adalah hal yang wajar dan merupakan kekayaan bangsa Indonesia.
- b. Menjaga persatuan: Walaupun kita berbeda-beda, kita tetap satu sebagai bangsa Indonesia. Semua perbedaan ini harus disatukan dengan semangat persatuan dan kesatuan untuk mencapai tujuan bersama, yaitu kemajuan dan kesejahteraan bersama.

- c. Menghargai keberagaman: Setiap elemen dalam masyarakat Indonesia, meskipun berbeda-beda, memiliki peran yang saling melengkapi. Keberagaman menjadi kekuatan yang membawa warna dan dinamika kehidupan berbangsa.

### Peranan Bhinneka Tunggal Ika dalam Kehidupan Bermasyarakat

Sebagai negara dengan berbagai suku, agama, ras, dan golongan, Indonesia dihadapkan pada tantangan untuk menjaga kesatuan di tengah keberagaman. Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebuah semboyan semata, tetapi harus menjadi landasan dalam kehidupan sosial dan politik masyarakat Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam semboyan ini harus diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan:

- a. Tingkat keluarga: Di dalam keluarga, setiap individu dengan latar belakang yang berbeda—baik dalam agama, suku, atau pandangan hidup—dapat hidup berdampingan dengan penuh rasa saling menghormati dan kasih sayang. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang dapat menjadi contoh nyata dalam mengamalkan nilai Bhinneka Tunggal Ika.
- b. Tingkat masyarakat: Di tengah masyarakat, Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan kita untuk hidup berdampingan dengan penuh toleransi, menghargai kebudayaan lain, serta menghindari diskriminasi atas dasar apa pun. Setiap kelompok harus merasa diterima dan dihargai.
- c. Tingkat negara: Dalam konteks negara, semboyan ini menjadi dasar bagi kebijakan pemerintah yang inklusif dan melibatkan berbagai elemen masyarakat dalam proses pembangunan. Kebijakan yang mengutamakan keberagaman akan memastikan bahwa tidak ada kelompok yang terpinggirkan, dan semua memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa.

### Sejarah dan Asal Mula Bhinneka Tunggal Ika

Semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang kini menjadi salah satu simbol kebangsaan Indonesia, pertama kali ditemukan dalam karya monumental Kakawin Sutasoma yang ditulis oleh Mpu Tantular pada abad ke-14. Karya ini tidak hanya memiliki nilai sastra yang tinggi, tetapi juga mengandung pesan moral yang sangat relevan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam hal menghargai perbedaan dan membangun toleransi antar kelompok masyarakat.

Pada masa itu, Kerajaan Majapahit adalah kerajaan yang sangat plural, dengan berbagai suku, budaya, dan agama yang hidup berdampingan. Salah satu ajaran penting yang disampaikan oleh Mpu Tantular melalui Kakawin Sutasoma adalah bahwa perbedaan agama, suku, dan budaya adalah kenyataan yang harus diterima dan dihargai. Bhinneka Tunggal Ika dalam konteks ini bukan hanya sekadar semboyan, tetapi juga suatu ajakan untuk menjunjung tinggi keberagaman sebagai kekuatan yang bisa memperkaya bangsa dan negara.

Mpu Tantular mengajarkan bahwa meskipun masyarakat Majapahit pada waktu itu terdiri dari berbagai kelompok agama, seperti Hindu dan Buddha, keduanya bisa hidup berdampingan dengan damai. Dalam karyanya, Mpu Tantular tidak membedakan mana agama yang lebih tinggi atau lebih rendah. Yang



#### Jejak Pancasila

**Lambang Garuda Pancasila resmi ditetapkan pada 11 Februari 1950**, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditempatkan di pita yang dicengkeram Garuda sebagai penegasan persatuan bangsa.



*Tugu Benteng Pancasila ada di Subang Jawa Barat – Shutterstock.com/2506714003*

terpenting adalah saling menghormati dan hidup dalam damai meskipun ada perbedaan keyakinan. Sikap ini sangat relevan dalam konteks keberagaman Indonesia yang memiliki berbagai agama, ras, suku, dan budaya. Bhinneka Tunggal Ika mengajak masyarakat Indonesia untuk tidak mengutamakan perbedaan tersebut sebagai alasan untuk bertikai, melainkan untuk mencari titik temu dalam persatuan.

Secara lebih mendalam, Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan bahwa keberagaman tidak seharusnya dilihat sebagai hambatan bagi persatuan, tetapi sebagai kekuatan yang dapat memperkaya bangsa. Keberagaman yang ada di Indonesia, baik dalam hal suku, agama, budaya, maupun bahasa, adalah anugerah yang harus diterima dengan rasa syukur. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Mpu Tantular, perbedaan seharusnya tidak menjadi sumber perpecahan, melainkan sebuah kekuatan untuk menciptakan masyarakat yang lebih kuat dan lebih kaya akan kebudayaan.

## Prinsip-Prinsip dalam Bhinneka Tunggal Ika

Ada beberapa prinsip penting yang terkandung dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika:

### a. Ketunggalan dalam Keberagaman

Semboyan ini tidak menciptakan konsep baru yang bertentangan dengan kebudayaan yang sudah ada, melainkan mencari persamaan di tengah perbedaan. Artinya, keberagaman harus diterima sebagai suatu kenyataan dan ditemukan titik temu dalam perbedaan tersebut.

Contoh: Bhinneka Tunggal Ika tidak hanya mengakui keberagaman agama, tetapi juga mengajak untuk mencari persamaan dalam perbedaan tersebut, dengan tetap menjaga kerukunan antar umat beragama.

### b. Inklusivitas

Semboyan ini mengajarkan bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara tidak mengarah pada eksklusivitas. Sebaliknya, Bhinneka Tunggal Ika bersifat inklusif, yang berarti pengakuan terhadap keberagaman sebagai bagian dari identitas bangsa. Sikap inklusif ini mengarah pada sikap toleransi dan kerjasama antar golongan, ras, agama, dan suku.

Contoh: Penerimaan terhadap perbedaan ras dan suku di Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pemerintahan dan kehidupan sosial.

### c. Formalisme

Bhinneka Tunggal Ika tidak mengedepankan formalitas, melainkan diterjemahkan melalui sikap saling menghormati, memercayai, dan mencintai dalam kehidupan yang rukun dan damai. Keberagaman yang ada dirangkai dalam persatuan kebangsaan Indonesia.

Contoh: Dalam perayaan hari besar agama, seperti Idul Fitri, Natal, dan Nyepi, masyarakat Indonesia yang berbeda agama tetap dapat merayakan kebersamaan tanpa mengabaikan perbedaan agama masing-masing.

### d. Konvergensi, Bukan Divergensi

Bhinneka Tunggal Ika mendorong perbedaan yang ada untuk tidak dibesar-besarkan, tetapi mencari titik temu dalam bentuk kesepakatan bersama.

Contoh: Meskipun ada perbedaan dalam cara berpikir, Bhinneka Tunggal Ika mendorong masyarakat untuk fokus pada kesatuan tujuan, yaitu hidup bersama dalam kedamaian.



#### e. Tidak Meninggalkan Kebudayaan Asli

Meskipun mengajak untuk membuka diri terhadap perbedaan, Bhinneka Tunggal Ika juga menekankan pentingnya menjaga kebudayaan asli Indonesia. Ini bertujuan untuk melestarikan nilai-nilai luhur yang telah ada dan menjaga identitas bangsa Indonesia.

Contoh: Melestarikan kebudayaan lokal seperti tarian tradisional dan upacara adat di setiap daerah, meskipun ada banyak pengaruh budaya luar.



#### Jejak Pancasila

- ▷ **Bhinneka Tunggal Ika sudah berusia lebih dari 600 tahun**, ungkapan ini pertama kali muncul di Kakawin Sutasoma karya Mpu Tantular pada abad ke-14, jauh sebelum Indonesia merdeka.
- ▷ **Kerajaan Majapahit, asal muasal semboyan ini, dikenal sebagai kerajaan pluralis** yang mampu mempersatukan berbagai budaya, agama, dan wilayah di Nusantara.



*Candi Brahu, peninggalan Kerajaan Majapahit di Mojokerto – Kompas.com*

#### Contoh Soal

Prinsip dalam Bhinneka Tunggal Ika yang mendorong untuk menghargai keberagaman dan menghindari pemaksaan terhadap satu pandangan atau kelompok adalah:

- A. Formalisme
- B. Ketunggalan dalam keberagaman
- C. Inklusivitas
- D. Konvergensi

Jawaban: C. Inklusivitas

Pembahasan:

Prinsip inklusivitas dalam Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan bahwa keberagaman tidak mengarah pada eksklusivitas, melainkan pengakuan terhadap keberagaman sebagai suatu kenyataan dalam hidup bermasyarakat. Inklusivitas mengarah pada sikap toleransi dan kerjasama antar golongan, agama, suku, dan ras, serta menciptakan kehidupan sosial yang harmonis dan bersatu.

## Rangkuman

Indonesia, sebagai negara yang kaya akan keberagaman, menghadapi tantangan besar dalam menjaga persatuan di tengah berbagai perbedaan yang ada. Keberagaman ini mencakup perbedaan suku, agama, ras, budaya, dan golongan, yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Meskipun perbedaan ini dapat menjadi tantangan, Indonesia mengadopsi semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti "Berbeda-beda tetapi tetap satu". Semboyan ini mencerminkan semangat persatuan bangsa, di mana setiap perbedaan harus diterima dan dihargai, serta disatukan dalam satu kesatuan bangsa Indonesia. Keberagaman ini tumbuh dan berkembang dari berbagai faktor, termasuk faktor geografis, sosial, dan sejarah yang telah membentuk masyarakat Indonesia yang plural.

Keberagaman Indonesia tidak hanya terbentuk oleh faktor geografis yang strategis, seperti letak Indonesia di antara dua samudra dan dua benua, yang memfasilitasi interaksi antar budaya dan agama, tetapi juga karena status Indonesia sebagai negara kepulauan yang terdiri dari lebih dari 17.000 pulau. Keberagaman ini semakin diperkuat oleh kondisi alam yang berbeda di tiap wilayah, yang mempengaruhi cara hidup masyarakat, serta infrastruktur transportasi dan komunikasi yang bervariasi antar daerah. Setiap wilayah Indonesia mengembangkan identitas budaya dan sosial yang unik, namun keberagaman ini tetap bisa disatukan melalui semangat persatuan yang terkandung dalam Bhinneka Tunggal Ika. Semangat ini mengajarkan kita untuk hidup berdampingan dalam perbedaan dan saling menghormati satu sama lain.

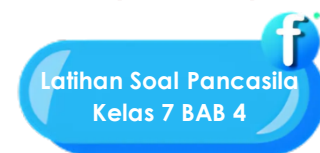
Keberagaman Indonesia memberikan banyak dampak positif, seperti memperkaya budaya, mengajarkan toleransi, dan memotivasi anak bangsa untuk menjaga persatuan. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, keberagaman juga dapat menimbulkan dampak negatif, seperti perpecahan sosial, ketegangan antar kelompok, dan radikalisme. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat Indonesia untuk mengembangkan sikap terbuka, antisipatif, selektif, adaptif, dan selalu menghargai kebudayaan asli. Melalui pendidikan yang menekankan nilai-nilai toleransi, dialog antar budaya, dan kebijakan yang inklusif, Indonesia dapat menjaga persatuan dalam keberagaman dan menjadikan perbedaan sebagai kekuatan untuk memperkuat bangsa.

## Latihan Soal

1. Apa arti dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika?
  - A. Semua orang di Indonesia harus sama
  - B. Berbeda-beda tetapi tetap satu
  - C. Semua perbedaan harus dihapuskan
  - D. Hanya satu budaya yang diterima
  
2. Faktor apa yang mendorong terjadinya keberagaman budaya di Indonesia?
  - A. Keberagaman bahasa
  - B. Letak geografis Indonesia yang strategis
  - C. Pemerintahan yang tidak stabil
  - D. Hanya pengaruh dari luar negeri
  
3. Bagaimana peran keberagaman alam Indonesia dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat?
  - A. Masyarakat di seluruh Indonesia memiliki kebiasaan dan budaya yang seragam
  - B. Keberagaman alam mengarah pada perbedaan cara hidup, tetapi tetap menjaga keharmonisan
  - C. Keberagaman alam menyebabkan terjadinya perpecahan antar kelompok
  - D. Masyarakat tidak terpengaruh oleh kondisi alam dalam kehidupan sosial dan budaya
  
4. Keberagaman Indonesia dapat menimbulkan dampak positif berupa:
  - A. Perpecahan antar kelompok
  - B. Terjadinya kekerasan
  - C. Meningkatkan rasa saling menghormati dan toleransi
  - D. Munculnya ketegangan sosial
  
5. Apa yang menjadi tantangan utama dalam menjaga persatuan dalam keberagaman agama di Indonesia?
  - A. Radikalisasi dan ekstremisme agama
  - B. Perbedaan cara berpakaian antar agama
  - C. Kesulitan bahasa antar umat beragama
  - D. Kekurangan fasilitas ibadah

6. Apa prinsip yang terkandung dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang mengajarkan untuk menerima keberagaman sebagai bagian dari identitas bangsa?
- A. Konvergensi
  - B. Inklusivitas
  - C. Ketunggalan dalam keberagaman
  - D. Formalisme
7. Menurut semboyan Bhinneka Tunggal Ika, bagaimana seharusnya masyarakat Indonesia hidup di tengah perbedaan?
- A. Semua perbedaan harus disamakan
  - B. Perbedaan tidak boleh ada
  - C. Perbedaan harus diterima dan dihargai, tetapi tetap bersatu
  - D. Masing-masing kelompok harus hidup terpisah

**Akses latihan soal  
lainnya di sini yuk!**



## Referensi

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (2021). Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Pancasila. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Mpu Tantular. (14th Century). Kakawin Sutasoma. Majapahit Kingdom.

National Development Planning Agency (BAPPENAS). (2013). Keberagaman dan Pembangunan Sosial Budaya di Indonesia. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Suharto, H. (2004). Keberagaman Suku Bangsa dan Budaya Indonesia. Pustaka Sinar Harapan.

World Bank. (2016). Indonesia: Country Diversity and Social Development. World Bank Group.

## BAB 5

# RUANG GEOGRAFIS NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

### Karakter Pelajar Pancasila

**Mandiri:** Mengelola pikiran, perasaan, dan tindakan secara bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan NKRI.

**beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia:** Bersyukur atas anugerah alam dan budaya Indonesia serta melaksanakan kewajiban menjaga kelestarian demi persatuan bangsa.

**Bergotong royong:** Bekerja sama dengan masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya secara bijak untuk menjaga persatuan dan keberlanjutan lingkungan.

**Kata Kunci:** NKRI, Persatuan, Keutuhan, Tanggung Jawab, Lingkungan, Warga Negara.

**Tujuan Pembelajaran: Memahami konsep negara dan elemen-elemen pembentuknya**

### 1. Memahami Pengertian Negara dan Elemen-Elemen Pembentuknya

- ▷ Menjelaskan definisi negara sebagai entitas yang memiliki kewenangan tertinggi di wilayahnya.
- ▷ Mengidentifikasi komponen utama yang menyusun sebuah negara, termasuk rakyat, wilayah, dan pemerintah yang berdaulat.

### 2. Mengidentifikasi Batas Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

- ▷ Menetapkan batasan wilayah Indonesia secara keseluruhan, termasuk daratan, perairan, dan ruang udara.
- ▷ Menggali keunikan wilayah Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau dan memiliki kekayaan alam yang melimpah.

### **3. Menganalisis Landasan Pembentukan Indonesia sebagai Negara Kesatuan**

- ▷ Menganalisis pentingnya perjuangan sejarah dan kemerdekaan dalam membentuk Indonesia sebagai negara kesatuan.
- ▷ Menyadari pentingnya sistem negara kesatuan bagi kelangsungan negara Indonesia.

### **4. Menjelaskan Langkah-Langkah Menjaga Keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia**

- ▷ Mengidentifikasi tindakan pemerintah dalam menjaga kesatuan wilayah negara.
- ▷ Menilai pentingnya kesadaran nasional dan peran serta masyarakat dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).



**F I T R I**



## 1. Pengertian Negara dan Unsur-Unsur Penyusunnya



*Prambanan Warisan budaya, unsur pembentuk jati negara – Shutterstock.com/ 426074680*

Negara merupakan sebuah entitas yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam suatu wilayah tertentu, dengan tujuan untuk mengatur kehidupan sosial, politik, dan ekonomi masyarakatnya. Pengertian negara tidak hanya merujuk pada wilayah atau pemerintahannya saja, namun mencakup elemen-elemen yang lebih mendalam seperti rakyat dan pengakuan internasional. Negara dibentuk oleh beberapa unsur yang saling terkait satu sama lain untuk memastikan eksistensinya dalam kerangka hukum dan kedaulatan internasional.

Istilah "negara" berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu "nagari", yang artinya wilayah, kota, atau pusat pemerintahan. Kata ini mulai digunakan untuk merujuk pada struktur negara sekitar abad ke-14 di Indonesia, terutama dalam kitab *Negarakertagama* yang menceritakan pemerintahan Majapahit (Haryono, 2022). Selain itu, dalam bahasa Inggris, negara dikenal dengan istilah "state", dalam bahasa Jerman disebut "staat", dan dalam bahasa Prancis dikenal dengan "etat" (Mikhael, dkk., 2022). Kesemua istilah ini mengandung makna yang merujuk pada suatu wilayah yang dikelola oleh pemerintah dengan kekuasaan penuh.

Menurut Otto Bauer, negara adalah sebuah kelompok manusia yang memiliki kesamaan nasib. Pemikiran ini mengarah pada pandangan bahwa negara terbentuk oleh kumpulan individu yang terikat oleh berbagai faktor, seperti sejarah, budaya, dan politik, yang membentuk identitas mereka sebagai satu kesatuan. Dalam pandangan Hans Kohn, bangsa juga merupakan hasil dari kesatuan sosial manusia yang berasal dari faktor geografis dan budaya yang berbeda, namun terhubung oleh rasa solidaritas dan identitas bersama (Putra dan Wajid, 2021).

Dalam pemikiran Ernest Renan, negara lebih dari sekedar wilayah atau pemerintahan namun ia adalah suatu kehendak untuk hidup bersama yang ditandai oleh persatuan dan kesetiaan antar anggota masyarakat. Renan menegaskan bahwa negara dibangun atas dasar kesepakatan bersama antara rakyat yang memiliki kehendak untuk berjuang dan hidup dalam satu kesatuan, meskipun mereka memiliki perbedaan ras, agama, atau budaya (Renan, 1882). Gagasan ini juga muncul dalam pidato Sukarno pada tanggal 1 Juni 1945, yang mengajak rakyat Indonesia untuk bersatu dalam sebuah negara yang merdeka, dengan semangat *Bhinneka Tunggal Ika* atau "berbeda-beda tetapi tetap satu" (Kusuma, 2004).

## Definisi Negara Menurut Tokoh Dunia

Berbagai tokoh ilmuwan dan pemikir telah memberikan definisi mengenai negara, masing-masing dengan pendekatan dan sudut pandang yang berbeda. Beberapa definisi penting mengenai negara dari tokoh-tokoh tersebut adalah sebagai berikut:

### a. Aristoteles

Negara adalah hasil perpaduan dari beberapa komunitas yang lebih kecil, seperti desa dan keluarga, yang secara bertahap berkembang menjadi entitas yang lebih besar dan mandiri. Tujuan utama dari negara adalah untuk mencapai kebahagiaan bersama, di mana setiap individu dapat hidup harmonis dan saling menghormati satu sama lain.

### b. Georg Jellinek

Negara dilihat sebagai organisasi kekuasaan yang dibentuk oleh kelompok manusia yang tinggal di dalam wilayah tertentu, di mana kekuasaan negara berlaku secara penuh di wilayah tersebut.

### c. G. W. F. Hegel

Menurut Hegel, negara merupakan sebuah organisasi moral yang muncul sebagai hasil sintesis antara kebebasan individu dengan kebutuhan untuk mencapai kebebasan yang lebih besar dalam skala sosial dan universal. Negara bagi Hegel tidak hanya berfungsi untuk mengatur masyarakat, tetapi juga sebagai wahana untuk mencapai kemerdekaan sejati bagi seluruh warganya.

### d. Roelof Kranenburg

Negara dapat dipahami sebagai sebuah bentuk organisasi yang memiliki kekuasaan yang diciptakan oleh suatu kelompok manusia yang disebut bangsa. Kekuasaan tersebut tidak hanya untuk mengatur, tetapi juga untuk menciptakan struktur dan tatanan yang berlaku di seluruh wilayah yang diatur oleh negara tersebut.

### e. Robert M. MacIver

Menurut MacIver, negara adalah sebuah asosiasi yang memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan aturan dan kebijakan di wilayah tertentu, dengan menggunakan kekuasaan untuk memaksakan kepatuhan terhadap hukum yang telah disepakati oleh masyarakat.

### f. Roger H. Soltau

Soltau menyatakan bahwa negara berfungsi sebagai sebuah alat atau otoritas yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengendalikan berbagai persoalan yang timbul di dalam masyarakat, sehingga menjamin keberlangsungan hidup bersama.

### g. Johann H. A. Logeman

Negara bagi Logeman adalah organisasi masyarakat yang memiliki kekuasaan untuk mengatur dan menyelenggarakan kehidupan bersama, di mana negara berperan dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan kehidupan sosial, politik, dan ekonomi.



## Jejak Pancasila

### Palestina adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia.

Pada 6 September 1944, bahkan sebelum Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya secara resmi, Mufti Besar Palestina, Syekh Muhammad Amin Al-Husaini, menyampaikan dukungan terhadap kemerdekaan Indonesia. Pengakuan ini disampaikan melalui siaran radio Berlin dalam bahasa Arab. Ini menjadi bukti kuat bahwa Palestina memiliki peran historis dalam mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia.



Indonesia mengecam tindakan Genosida –  
[Shutterstock.com/2379675427](https://www.shutterstock.com/2379675427)

**h. Harold J. Laski**

CFCLaski berpendapat bahwa negara adalah suatu masyarakat yang terintegrasi dengan memiliki kekuasaan yang lebih tinggi daripada individu atau kelompok dalam masyarakat. Kekuasaan ini bersifat memaksa dan bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat.

**i. Djokosoetono**

Djokosoetono mendefinisikan negara sebagai organisasi yang terdiri dari sekelompok atau lebih kelompok manusia yang hidup dalam suatu wilayah tertentu dan berada di bawah satu pemerintahan yang sama. Negara berfungsi untuk mengelola dan mengatur kehidupan bersama sesuai dengan hukum yang berlaku.

**j. Wirjono Prodjodikoro**

Wirjono Prodjodikoro mendefinisikan negara sebagai sebuah organisasi yang terdiri dari beberapa kelompok manusia yang tinggal di suatu wilayah tertentu dan diatur oleh satu pemerintahan yang berperan dalam menjaga ketertiban dan keamanan. Pemerintahannya memiliki otoritas yang sah atas seluruh kegiatan di wilayah tersebut.

**k. Max Weber**

Weber mendefinisikan negara sebagai suatu masyarakat yang memiliki monopoli terhadap penggunaan kekerasan fisik secara sah di dalam batas wilayahnya. Dengan kata lain, negara berhak untuk menggunakan kekuatan atau kekerasan dalam menegakkan hukum dan ketertiban.

**l. Soenarko**

Negara adalah organisasi yang memiliki wilayah tertentu di mana kekuasaan negara berlaku tanpa terkecuali. Soenarko menekankan pentingnya legitimasi atas kekuasaan negara yang bersifat mutlak dan mengatur segala kehidupan dalam wilayah tersebut.

## **Unsur Pembentuk Suatu Negara**

Untuk dapat terbentuk sebagai sebuah negara yang sah, ada beberapa unsur yang harus dipenuhi. Menurut Konvensi Montevideo (Uruguay, 1933), ada dua jenis unsur yang menjadi landasan dasar dalam pembentukan suatu negara, yaitu unsur konstitutif dan deklaratif.

**a. Unsur Konstitutif**



*Rakyat elemen pertama pembentuk negara – Shutterstock.com/ 2424294701*

Unsur konstitutif adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi sejak awal untuk membentuk negara. Terdapat **empat unsur utama** dalam kategori ini:

### 1) Rakyat

Rakyat merupakan unsur utama dalam suatu negara. Tanpa adanya rakyat, sebuah negara tidak akan memiliki tujuan atau arah yang jelas. Rakyat adalah elemen yang menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara, terlibat dalam proses politik, dan menjadi subjek hukum yang berhak atas perlindungan dan kebebasan.

Menurut Aristoteles, negara adalah hasil dari percampuran beberapa komunitas yang lebih kecil, termasuk keluarga dan desa, yang akhirnya bergabung untuk membentuk sebuah negara yang lebih besar. Dalam pandangan ini, rakyat adalah bagian yang menggerakkan dan memberi arah pada negara, karena mereka yang membentuk dan menjaga kestabilan negara tersebut.

Selain itu, Max Weber juga menegaskan pentingnya rakyat dalam konteks pembentukan negara, dengan memberikan definisi bahwa negara adalah sebuah organisasi yang memiliki monopoli atas kekerasan fisik di dalam wilayahnya. Ini berarti, negara, dengan adanya rakyat, harus mampu menegakkan hukum dan mengelola ketertiban sosial untuk kepentingan bersama.

Rakyat, sebagai bagian dari negara, memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Mereka memiliki hak untuk memilih dan dipilih, serta berperan dalam membangun negara melalui kontribusi sosial, ekonomi, dan politik.

### 2) Wilayah

Wilayah negara mencakup area geografis yang menjadi tempat dilaksanakannya kedaulatan dan hukum negara tersebut. Wilayah ini terdiri dari daratan, perairan, dan udara yang berada di atasnya. Setiap negara memiliki hak untuk mengelola dan mengatur wilayahnya, termasuk sumber daya alam yang ada di dalamnya.

Georg Jellinek, dalam pandangannya, menganggap bahwa negara adalah organisasi kekuasaan yang terbentuk oleh sekelompok manusia yang tinggal di wilayah tertentu. Wilayah yang jelas dan diakui oleh negara-negara lain sangat penting karena menentukan batas kekuasaan suatu negara, baik dalam hal penerapan hukum maupun dalam pengelolaan sumber daya alam. Selain itu, Friedrich Ratzel menambahkan bahwa negara tidak hanya terdiri dari rakyat dan pemerintahan, tetapi juga wilayah yang memberikan ruang bagi bangsa untuk berkembang. Menurutnya, wilayah ini menjadi salah satu faktor penting dalam pembentukan identitas dan eksistensi negara. Wilayah negara adalah elemen yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan suatu negara. Negara yang memiliki wilayah yang jelas akan mendapatkan pengakuan internasional dan bisa menjaga kedaulatannya dari ancaman luar.

### 3) Pemerintah yang Berdaulat

Pemerintah yang berdaulat adalah bagian penting dari negara yang memiliki wewenang penuh untuk mengelola dan mengatur semua aspek kehidupan negara, mulai dari hukum, ekonomi,



#### Jejak Pancasila

##### Indonesia sebagai Negara Kesatuan

Salah satu tantangan terbesar Indonesia adalah menjaga kesatuan dari ribuan pulau yang tersebar dan keberagaman budaya yang luar biasa. Namun, dengan konsep Bhinneka Tunggal Ika atau "Berbeda-beda tetapi tetap satu," Indonesia berhasil menunjukkan bahwa keberagaman bukanlah penghalang, melainkan kekuatan yang dapat menjaga keutuhan negara.



Wilayah Indonesia pada Peta Dunia – Freepik.com

hingga keamanan. Pemerintah ini harus memiliki legitimasi dari rakyatnya dan berfungsi sebagai pengatur untuk menjamin hak-hak warga negara dan menciptakan ketertiban dalam masyarakat.

Harold Laski menyatakan bahwa negara adalah organisasi yang terintegrasi karena memiliki kekuasaan yang bersifat memaksa dan lebih tinggi daripada individu atau kelompok dalam masyarakat. Pemerintah yang sah dan berdaulat harus dapat menjalankan kewenangannya untuk melaksanakan keputusan politik yang adil dan bijaksana.

Menurut Robert MacIver, negara adalah asosiasi yang menggunakan sistem hukum untuk memaksakan aturan yang diterapkan oleh pemerintahan yang berdaulat. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjalankan hukum dan menjaga stabilitas negara dengan kekuasaan yang sah. Pemerintah yang berdaulat bukan hanya berfungsi untuk mengelola kebijakan dalam negeri, tetapi juga untuk menjaga hubungan internasional dengan negara-negara lain, serta mengelola sumber daya negara untuk kemakmuran rakyat.

#### 4) Kesanggupan Berhubungan dengan Negara-Negara Lain

Kesanggupan untuk menjalin hubungan dengan negara-negara lain merupakan salah satu unsur penting dalam pembentukan dan keberlangsungan suatu negara. Kemampuan ini menunjukkan bahwa negara tersebut diakui keberadaannya oleh komunitas internasional dan mampu berpartisipasi dalam hubungan diplomatik maupun kerja sama internasional. Kesanggupan ini diwujudkan melalui berbagai aktivitas, seperti membuka dan menerima kedutaan besar, menandatangani perjanjian internasional, bekerja sama dalam organisasi internasional (seperti PBB atau ASEAN), serta melakukan perdagangan dan kerja sama pertahanan.

Negara yang memiliki kesanggupan ini biasanya memiliki sistem pemerintahan yang stabil, diakui secara internasional, dan mampu menjaga kepentingan nasionalnya dalam pergaulan global. Dengan demikian, kesanggupan berhubungan dengan negara-negara lain menunjukkan bahwa negara tersebut benar-benar merdeka, berdaulat, dan dihormati dalam komunitas internasional.

#### b. Unsur Deklaratif

Sementara itu, unsur deklaratif adalah pengakuan dari negara lain yang membuktikan bahwa negara tersebut sah dan dapat berinteraksi di kancah internasional. Pengakuan ini tidak bersifat mutlak pada saat negara pertama kali berdiri, tetapi menjadi elemen penting seiring waktu. Unsur ini menunjukkan bahwa suatu negara harus diakui oleh negara-negara lain agar bisa menjalankan hak dan kewajiban sebagai bagian dari masyarakat internasional. Unsur deklaratif yang paling krusial adalah pengakuan dari negara lain, yang menandakan bahwa negara tersebut diakui sebagai entitas yang sah dan memiliki hak untuk berpartisipasi dalam sistem global.



Indonesia mengikuti Rapat Keamanan PBB – [news.okezone.com](https://news.okezone.com)

Pengakuan internasional adalah unsur penting dalam keabsahan sebuah negara. Meskipun sebuah negara dapat memenuhi semua unsur konstitutif, pengakuan dari negara lain menjadi faktor yang menentukan keberlanjutan dan eksistensi negara tersebut dalam tatanan global. Negara yang diakui oleh komunitas internasional dapat berpartisipasi dalam forum-forum global, seperti PBB, serta melakukan hubungan diplomatik dan perdagangan dengan negara-negara lain.

Hans Kohn menegaskan bahwa negara adalah hasil dari kesatuan sosial manusia yang lahir dari rasa solidaritas dan pengakuan bersama terhadap identitas dan kedaulatan suatu bangsa. Tanpa pengakuan internasional, negara tidak bisa berfungsi secara penuh dalam menjalankan kebijakan luar negeri dan menjalin hubungan diplomatik yang sah.

Selain itu, Ernest Renan berpendapat bahwa negara terbentuk dari kehendak bersama rakyat untuk hidup dalam satu kesatuan, yang dalam konteks pengakuan internasional, artinya adalah pengakuan dari negara-negara lain terhadap kedaulatan negara tersebut.

Pengakuan ini juga berkaitan dengan keberlangsungan suatu negara di dunia internasional, terutama dalam hal hubungan diplomatik, perdagangan, dan partisipasi dalam organisasi internasional.

### Contoh Soal

Apa saja unsur-unsur yang harus ada untuk membentuk sebuah negara yang sah menurut Konvensi Montevideo (Uruguay, 1933)?

- A. Rakyat, wilayah, kekuasaan tertinggi, hubungan internasional
- B. Pemerintah, wilayah, pengakuan internasional
- C. Sumber daya alam, wilayah, kebijakan pemerintah
- D. Rakyat, pemerintah, sumber daya alam, pengakuan internasional

Jawaban: A. Rakyat, wilayah, kekuasaan tertinggi, hubungan internasional

Pembahasan:

Menurut Konvensi Montevideo 1933, ada dua jenis unsur yang menjadi landasan dasar dalam pembentukan suatu negara: unsur konstitutif dan unsur deklaratif. Unsur konstitutif mencakup empat elemen utama yang harus ada untuk membentuk negara yang sah, yaitu:

1. Rakyat: Kelompok manusia yang menjadi warga negara dan menetap di wilayah tertentu.
2. Wilayah: Batas teritorial yang jelas, termasuk daratan, perairan, dan ruang udara.
3. Kekuasaan tertinggi (berdaulat): Negara yang memiliki otoritas penuh atas semua aspek yang ada di dalam wilayahnya, termasuk pemerintahan yang berdaulat.
4. Hubungan internasional: Kemampuan negara untuk berinteraksi dan menjalin hubungan dengan negara-negara lain.

Sedangkan unsur deklaratif adalah pengakuan internasional dari negara lain, yang menunjukkan bahwa negara tersebut diakui secara sah di dunia internasional.



## 2. Konsep Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia



*Wilayah hijau subur, kekayaan alam Indonesia – Shutterstock.com/ 2443409623*

Wilayah negara adalah ruang yang mencakup daratan, perairan, dan ruang udara yang di atasnya, yang menjadi tempat bagi sebuah negara untuk melaksanakan hak kedaulatan dan kewajibannya. Wilayah juga menunjukkan eksistensi negara sebagai entitas yang memiliki kontrol penuh terhadap ruang tersebut. Oleh karena itu, wilayah negara bukan hanya merupakan tempat fisik untuk kehidupan rakyat, tetapi juga meliputi sumber daya alam dan hak untuk menjalankan kebijakan pemerintahan serta hukum negara.

Menurut I Wayan Parthiana, wilayah bukan sekadar tempat tinggal bagi rakyat, tetapi merupakan ruang di mana negara melakukan tindakan yang sah untuk memastikan kesejahteraan, stabilitas, dan keamanan sosial-politik negara tersebut (Kusumaningrum, 2018). Wilayah ini menjadi atribut yang tak terpisahkan dari kedaulatan negara, yang harus dijaga dengan ketat untuk memastikan keutuhan bangsa dan negara.

Rebecca M. Walase menyatakan bahwa wilayah tidak hanya sebatas daratan atau ruang udara, melainkan juga mencakup sumber daya alam yang terdapat di dalamnya. Negara berhak untuk mengelola, mengatur, dan melindungi sumber daya ini untuk kepentingan rakyatnya. Wilayah yang dikelola secara efektif akan memberikan keuntungan dalam hal pengelolaan ekonomi, pengembangan sosial, dan perlindungan terhadap kebudayaan lokal serta alam sekitar.

### **Konsep Kedaulatan (Sovereignty)**

*Sovereignty* (Kedaulatan), yang berasal dari kata Latin *superanus* yang berarti "yang tertinggi", menggambarkan bahwa negara memiliki kekuasaan tertinggi atas wilayahnya. Dalam hal ini, negara berdaulat di atas wilayah yang telah diakui, dan kewenangannya hanya terbatas oleh perjanjian internasional atau hukum internasional yang telah disepakati oleh negara-negara yang terlibat. Indonesia sebagai negara kepulauan, memiliki keunikan dalam penerapan prinsip kedaulatan wilayah, mengingat kompleksitas wilayah perairan yang sangat luas.

Indonesia, dengan lebih dari 17.000 pulau yang tersebar, termasuk di dalamnya pulau-pulau besar seperti Sumatra, Java, Kalimantan, dan Sulawesi, serta pulau-pulau kecil yang tidak berpenghuni, memiliki tantangan besar dalam pengelolaan wilayahnya. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia harus memastikan bahwa semua wilayahnya, baik yang terletak di daratan maupun di laut, dikelola dengan efektif dan efisien.

Dalam Undang-Undang No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, Indonesia menegaskan bahwa negara ini adalah negara kepulauan, dengan wilayahnya yang terdiri dari daratan, perairan laut, dan ruang udara yang berada di atasnya. Peraturan ini memperjelas bahwa Indonesia memiliki hak penuh atas wilayah yang mencakup seluruh area daratan, laut, serta sumber daya alam yang ada di dalamnya. Kebijakan ini bukan hanya berlaku untuk wilayah daratan, tetapi juga berlaku untuk wilayah perairan Indonesia, yang mencakup laut teritorial, zona ekonomi eksklusif (ZEE), dan landas kontinen.

### **Pengelolaan Wilayah Laut dan Sumber Daya Alam**

Wilayah perairan Indonesia sangat luas dan mengandung potensi sumber daya alam yang sangat besar. Menurut Buana (2019), negara berdaulat memiliki kewenangan penuh untuk melaksanakan dan menegakkan hukum di wilayahnya. Di dalam konteks Indonesia, hal ini berarti bahwa negara memiliki hak penuh untuk mengelola sumber daya alam yang terkandung dalam laut, seperti ikan, gas alam, minyak, dan bahan tambang lainnya. Selain itu, Indonesia juga berhak untuk melindungi lingkungan hidup dan memanfaatkan laut sebagai jalur perdagangan dan transportasi internasional yang vital.

Dengan jumlah pulau yang sangat banyak, Indonesia memiliki tantangan besar dalam mengelola perbatasan dan batas wilayah dengan negara-negara tetangga. Perjanjian internasional sangat penting untuk menghindari terjadinya sengketa wilayah yang dapat mengganggu hubungan baik antarnegara. Perjanjian-perjanjian ini termasuk dalam Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS), yang menetapkan hak-hak negara atas wilayah laut dan sumber daya alam yang ada di dalamnya.

Selain daratan dan laut, wilayah Indonesia juga mencakup ruang udara yang berada di atasnya. Kedaulatan atas ruang udara Indonesia berarti bahwa negara memiliki otoritas penuh untuk mengatur jalur penerbangan internasional dan domestik, serta melaksanakan pengawasan terhadap aktivitas penerbangan di wilayah udaranya. Hal ini juga meliputi pemberian izin penerbangan kepada maskapai, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi di udara.



### **Kedaulatan Nasional dalam Konteks Geopolitik**

Indonesia memiliki posisi strategis di dunia, berada di antara dua samudra besar dan banyak negara. Oleh karena itu, pengelolaan wilayah Indonesia bukan hanya soal menjaga keberlanjutan sumber daya alam, tetapi juga menjaga kedaulatan politik dan geopolitik Indonesia. Dalam konteks ini, Indonesia juga harus mengatur hubungan dengan negara-negara tetangga yang berbatasan langsung dengannya, seperti Malaysia, Papua New Guinea, Timor Leste, dan Australia.

Menurut Syamsumardian (2022), meskipun Indonesia memiliki kekuasaan tertinggi atas wilayahnya, negara ini tetap harus mematuhi perjanjian internasional yang ada dan melakukan pengaturan batas-batas wilayah dengan negara tetangga. Hal ini sangat penting agar Indonesia tetap memiliki posisi yang kuat dalam kancah internasional dan menjaga stabilitas keamanan nasional.

### **Penetapan Batas Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia**

Penetapan batas wilayah suatu negara merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga kedaulatan dan integritasnya. Batas wilayah yang jelas tidak hanya mencegah sengketa antara negara, tetapi juga memastikan bahwa setiap negara dapat mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam serta menjalankan kebijakan hukum di wilayahnya dengan efektif. Penetapan batas wilayah Indonesia

mencakup batas daratan, batas laut, dan ruang udara di atasnya. Berikut adalah perjalanan Indonesia dalam menetapkan batas wilayah berdasarkan beberapa perjanjian.



*Batas Wilayah Resmi Indonesia–Malaysia di Pulau Sebatik.*

#### a. Perjanjian Internasional dalam Penetapan Batas Wilayah

Penetapan batas wilayah NKRI dilakukan melalui berbagai perjanjian internasional yang melibatkan Indonesia dan negara-negara tetangganya. Salah satu contoh penting adalah Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS), yang mengatur tentang pembagian dan pengelolaan wilayah laut, zona ekonomi eksklusif (ZEE), serta hak negara terhadap landas kontinen.

Selain itu, Indonesia juga telah menandatangani perjanjian bilateral dengan negara-negara tetangga untuk menetapkan batas wilayah daratan dan laut yang jelas. Perjanjian ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah perbatasan yang dapat menimbulkan ketegangan atau sengketa di masa depan.

Sebagai contoh, perjanjian perbatasan dengan Timor Leste yang mengatur batas daratan dan laut di wilayah Timor, serta perjanjian dengan Papua New Guinea untuk memastikan pengelolaan batas wilayah daratan di Pulau Papua. Dalam hal ini, perjanjian internasional sangat penting untuk menjaga stabilitas dan perdamaian di kawasan tersebut.

#### b. Perjanjian Internasional dalam Penetapan Batas Wilayah

Penetapan batas wilayah Indonesia, baik daratan, laut, maupun udara, sering kali melibatkan perjanjian internasional dengan negara-negara tetangga. Sebagai contoh, Malaysia dan Indonesia telah melakukan beberapa perjanjian terkait batas daratan di Pulau Kalimantan, sedangkan dengan Papua New Guinea, Indonesia juga telah menyepakati pembagian batas wilayah daratan di Pulau Papua.

Perjanjian ini sangat penting untuk menghindari sengketa perbatasan yang bisa merusak hubungan bilateral dan menimbulkan ketegangan politik. Perjanjian yang melibatkan batas laut, seperti yang dilakukan dengan Timor Leste, juga penting dalam memastikan pengelolaan sumber daya laut di wilayah perbatasan yang kaya akan potensi alam.

Salah satu contoh paling penting adalah Deklarasi Djuanda pada tahun 1957 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara kepulauan dengan klaim atas seluruh laut yang ada di antara pulau-pulau Indonesia. Deklarasi ini mengubah persepsi dunia internasional tentang batas wilayah Indonesia, dan menjadi dasar hukum bagi pengaturan wilayah laut Indonesia.

#### c. Batas Wilayah Indonesia Secara Geografis

Berdasarkan data dari Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia terletak di antara 6° 04' 30" Lintang Utara hingga 11° 00' 36" Lintang Selatan, serta antara 94° 58' 21" Bujur Timur hingga 141° 01' 10" Bujur Timur. Dengan luas wilayah 3.257.483 km<sup>2</sup> dan panjang garis pantai sekitar 95.181 km, Indonesia menjadi negara dengan wilayah laut terluas di dunia, yang meliputi lebih dari 17.000 pulau.

Kardiman et al. (2017) menjelaskan bahwa batas wilayah Indonesia di bagian timur, selatan, barat, dan utara telah ditetapkan dengan sangat rinci. Indonesia berbatasan dengan negara-negara Papua New

Guinea, Australia, Malaysia, dan beberapa negara lainnya yang berbatasan langsung dengan wilayah laut Indonesia.

- 1) Timur: Di perairan Samudra Pasifik, Indonesia berbatasan dengan Negara Republik Palau, sementara di daratan berbatasan dengan Papua New Guinea.
- 2) Selatan: Di perairan, Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia dan Timor Leste, sementara di daratan berbatasan dengan Timor Leste.
- 3) Barat: Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia dan Negara India (di Laut Andaman).
- 4) Utara: Di daratan, Indonesia berbatasan dengan Malaysia, sedangkan di perairan, berbatasan dengan Singapura, Thailand, Vietnam, dan Filipina.

#### d. Tantangan dalam Penetapan Batas Wilayah

Meskipun Indonesia telah menetapkan batas wilayahnya dengan jelas melalui berbagai perjanjian internasional, tantangan tetap ada, terutama dalam hal pengelolaan dan pengawasan wilayah perairan yang sangat luas. Kekayaan sumber daya alam di perairan Indonesia, baik yang berada di laut teritorial maupun ZEE, sering kali menjadi sumber konflik dengan negara-negara tetangga. Oleh karena itu, Indonesia perlu terus memperkuat diplomasi internasional dan mempertahankan hubungan baik dengan negara-negara tetangga untuk menghindari potensi sengketa.

Selain itu, perbedaan interpretasi mengenai batas wilayah antara Indonesia dan negara-negara tetangga, seperti yang terjadi di Laut Cina Selatan, memerlukan penyelesaian yang bijaksana melalui jalur diplomatik dan hukum internasional.

### Lingkup Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan



*Penegasan Zona Maritim Indonesia di Laut Natuna - dw.com*

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki lingkup wilayah yang sangat luas dan beragam. Wilayah ini bukan hanya mencakup daratan saja, tetapi juga perairan dan ruang udara di atasnya. Ketiga unsur ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Untuk memastikan kesatuan dan kedaulatan negara, semua wilayah ini dikelola oleh pemerintah pusat, dengan tetap memperhatikan hukum nasional dan hukum internasional yang berlaku.

## a. Wilayah Daratan

Wilayah daratan Indonesia mencakup seluruh permukaan tanah dalam batas teritorial negara dan berperan penting secara geografis, ekonomi, sosial, dan politik. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki berbagai bentang alam dan pulau. Daratan tidak hanya sebagai tempat tinggal, tetapi juga pusat kebudayaan, ekonomi, dan pemerintahan. Menurut Arifin (2014), wilayah daratan merupakan ruang eksplorasi dan pemanfaatan sumber daya alam yang harus dikelola secara berkelanjutan. Penetapan batas daratan sangat penting dan biasanya dilakukan melalui perjanjian internasional untuk mencegah sengketa, terutama dengan negara tetangga yang berbatasan langsung.

Seperti yang dijelaskan oleh Suastika dan Sukadi (2017), batas wilayah daratan dapat berupa:

- 1) Batas alamiah, yang mencakup batas alami yang ditentukan oleh fitur-fitur geografis seperti sungai, gunung, atau hutan.
- 2) Batas buatan, yang merupakan batas yang dibuat oleh manusia, misalnya berupa tembok, pagar, atau jalur jalan tertentu.
- 3) Batas geografis, yang menetapkan garis batas berdasarkan garis lintang dan bujur yang diukur secara ilmiah dan disepakati dalam perjanjian internasional.

Batas wilayah tidak hanya menentukan kepemilikan, tetapi juga memengaruhi hubungan diplomatik antarnegara. Indonesia aktif dalam perjanjian multilateral untuk menjaga keamanan dan perdamaian dengan negara tetangga. Contohnya, batas daratan Indonesia dengan Malaysia dan Timor Leste memerlukan perjanjian resmi meskipun sudah jelas secara topografi, guna memastikan saling pengakuan dan penghormatan kedaulatan.

## b. Wilayah Perairan

Wilayah perairan Indonesia mencakup semua laut yang ada di sekitar negara ini, termasuk laut teritorial, perairan kepulauan, zona ekonomi eksklusif (ZEE), dan landas kontinen. Wilayah perairan Indonesia diatur melalui **perjanjian internasional**, seperti yang tercantum dalam **UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea)**, yang memberikan batasan dan hak negara atas wilayah laut dan sumber daya yang ada di dalamnya. Indonesia, sebagai negara kepulauan, memiliki kedudukan penting dalam UNCLOS dan terus memperjuangkan **hak-hak wilayah laut** dalam diplomasi internasionalnya. Wilayah perairan Indonesia tidak hanya penting dalam hal menjaga kelestarian sumber daya alam, tetapi juga berperan dalam kebijakan geopolitik negara. Menurut **Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan**, laut merupakan ruang vital yang menghubungkan daratan dengan daratan lainnya, serta memberikan kesempatan bagi negara untuk mengelola dan mengatur sumber daya yang ada di dalamnya. Berdasarkan **UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan**, wilayah perairan Indonesia terdiri dari:

### 1) Perairan Pedalaman

Perairan pedalaman adalah perairan di sisi daratan seperti sungai, teluk, dan pelabuhan. Indonesia memiliki kedaulatan penuh atas wilayah ini, termasuk ruang udara, dasar laut, tanah di bawahnya, dan semua sumber daya alam di dalamnya. Semua hukum Indonesia berlaku sepenuhnya di wilayah ini.

### 2) Perairan Kepulauan

Perairan yang terletak di antara pulau-pulau Indonesia, termasuk selat dan laut antar pulau. Pemerintah memiliki hak penuh untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya di wilayah ini, termasuk untuk perikanan dan pariwisata, dengan tetap memperhatikan hukum internasional.



*Pulau Pianemo Raja Ampat Indonesia – Shutterstock.com/ 630463553*

### **3) Laut Teritorial**

Laut teritorial adalah wilayah laut sejauh 12 mil laut dari garis pangkal kepulauan. Indonesia memiliki kedaulatan penuh atas laut ini, termasuk udara di atasnya dan tanah di bawahnya, serta sumber dayanya. Pelaksanaan hukumnya harus memperhatikan ketentuan hukum internasional.

### **4) Zona Tambahan**

Zona tambahan berada di luar laut teritorial sejauh 24 mil laut dari garis pangkal. Indonesia tidak memiliki kedaulatan penuh, tetapi berwenang mencegah pelanggaran hukum seperti penyelundupan dan pelanggaran bea cukai.

### **5) Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)**

Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) adalah wilayah laut sejauh 200 mil dari garis pangkal laut teritorial, di mana Indonesia memiliki hak berdaulat untuk mengeksplorasi, mengeksploitasi, mengelola, dan melestarikan sumber daya alam, baik hayati maupun nonhayati. Kewenangannya mencakup pemanfaatan energi dari air, arus, dan angin, serta yurisdiksi atas pembangunan pulau buatan, instalasi, riset ilmiah kelautan, dan perlindungan lingkungan laut.

### **6) Landas Kontinen**

Landas kontinen Indonesia mencakup dasar laut dan tanah di bawahnya yang terletak di luar laut teritorial, hingga 200 mil dari daratan, atau maksimal 350 mil laut dari garis pangkal. Negara memiliki hak berdaulat untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya alam di wilayah ini. Selain itu, negara juga memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin dan mengatur aktivitas eksplorasi maupun eksploitasi sumber daya alam di wilayah tersebut.

## **c. Wilayah Udara**

Wilayah udara adalah ruang di atas wilayah daratan dan perairan yang merupakan bagian dari negara, di mana negara memiliki kekuasaan penuh untuk mengatur dan melaksanakan kewenangannya. Sebagaimana diatur dalam berbagai perjanjian internasional, seperti Konvensi Paris 1919 dan Konvensi Chicago 1944, negara berdaulat memiliki hak atas wilayah udaranya dan memiliki kewenangan untuk mengontrol penerbangan yang berlangsung di wilayah tersebut.

Perjanjian internasional yang disepakati menunjukkan bahwa ruang udara suatu negara harus dianggap sebagai ruang yang eksklusif. Setiap negara memiliki hak untuk melaksanakan aktivitas penerbangan di ruang udaranya tanpa perlu izin dari negara lain, kecuali dalam hal-hal yang berkaitan dengan keselamatan internasional atau peraturan global yang sudah disepakati. Ada dua teori penting dalam hal wilayah udara yang perlu dipahami:

## 1) Teori Udara Bebas (*Air Freedom Theory*)

- ▷ Aliran Kebebasan Ruang Udara Tanpa Batas: Konsep ini berpendapat bahwa ruang udara di atas suatu negara seharusnya bebas untuk digunakan oleh siapa saja, tanpa batasan negara. Menurut teori ini, tidak ada satu negara pun yang memiliki hak mutlak atas ruang udara, sehingga semua negara dapat mengaksesnya untuk kepentingan bersama seperti penerbangan internasional.
- ▷ Aliran Kebebasan Udara Terbatas: Meskipun ruang udara dipandang bebas, negara tetap mempertahankan haknya untuk mengontrol bagian-bagian tertentu demi menjaga keamanan dan keselamatan wilayahnya. Oleh karena itu, setiap negara berhak untuk mengambil tindakan yang diperlukan demi melindungi wilayah udaranya, seperti pembatasan penerbangan atau kontrol udara di area sensitif.

## 2) Teori Negara Berdaulat di Udara (*The Air Sovereignty Theory*)

Negara memiliki hak penuh atas ruang udaranya, dengan batas yang diakui secara internasional. Kewenangan ini mencakup pengaturan penerbangan dan aktivitas lain di wilayah udara, di mana tidak ada pihak yang boleh memasukinya tanpa izin, kecuali dalam keadaan tertentu yang telah diatur melalui perjanjian internasional. Selain wilayah darat, laut, dan udara, terdapat pula wilayah ekstrateritorial yang meskipun berada di luar batas geografis langsung, tetap dianggap sebagai bagian dari kedaulatan negara. Contohnya adalah kedutaan besar atau konsulat yang berada di negara lain, serta kapal yang berlayar di bawah bendera negara tertentu. Meskipun secara fisik berada di wilayah asing, kedutaan dan kapal tersebut tetap berada dalam yurisdiksi hukum negara asalnya. Teori Negara Berdaulat di Udara dibedakan menjadi beberapa yaitu:

### ▷ Teori Pengawasan oleh Negara (*Cooper's Control Theory*)

Dalam pandangan ini, kontrol negara atas wilayah udara ditentukan oleh kemampuan negara untuk mengontrol dan memantau wilayah udaranya secara fisik. Pengawasan ini melibatkan pengendalian penuh terhadap penerbangan yang melewati atau berada di dalam wilayah udara negara, serta memastikan bahwa aktivitas penerbangan tersebut sesuai dengan kebijakan negara.

### ▷ Teori Ruang Udara oleh Schachter (*Schachter Airspace Theory*)

Dalam teori ini, disebutkan bahwa negara berdaulat atas ruang udara yang berada di atas wilayahnya sampai ke ketinggian tertentu, yang mencakup kegiatan di lapisan atmosfer atas. Negara berhak untuk mengendalikan semua aktivitas yang terjadi di ruang udara tersebut, termasuk pengawasan terhadap satelit atau pesawat terbang yang melintas.

### ▷ Teori Keamanan

Teori Keamanan berpendapat bahwa sebuah negara memiliki hak penuh atas wilayah udaranya hingga batas yang diperlukan untuk menjaga dan melindungi keamanan negara tersebut.





## Jejak Pancasila

### Keamanan dan Pengaturan Wilayah Udara

Wilayah udara Indonesia mencakup ruang yang luas di atas daratan dan lautnya. Setiap negara memiliki kedaulatan penuh atas ruang udara di atas wilayahnya, termasuk pengaturan penerbangan internasional. Indonesia mengatur jalur penerbangan yang melintas di ruang udara negara ini untuk memastikan keselamatan penerbangan dan perlindungan terhadap ancaman eksternal.



TNI AU berdiri 9 April 1946, menjaga wilayah udara –  
Shutterstock.com/ 2187968381

### Contoh Soal

Wilayah Indonesia terdiri dari daratan, perairan, dan ruang udara. Salah satu perjanjian internasional yang mengatur batas wilayah laut Indonesia adalah...

- A. Deklarasi Djuanda
- B. Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS)
- C. Perjanjian Hukum Laut 1982
- D. Perjanjian Paris 1919

Jawaban: B. Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS)

Pembahasan:

UNCLOS adalah perjanjian internasional yang mengatur hak dan kewajiban negara-negara mengenai wilayah laut, termasuk pengaturan mengenai zona ekonomi eksklusif (ZEE), landas kontinen, dan hak negara kepulauan seperti Indonesia.



### 3. Indonesia sebagai Negara Kesatuan



*Cinta tanah air wujud negara kesatuan – freepik.com*

Indonesia adalah negara kesatuan dengan sistem pemerintahan yang terpusat. Meskipun negara ini terdiri dari ribuan pulau yang memiliki keberagaman budaya, bahasa, dan etnis, kebijakan politik serta hukum diatur oleh satu otoritas pemerintah pusat di Jakarta. Sistem ini memastikan bahwa seluruh wilayah Indonesia dikelola oleh satu pemerintahan yang mengatur negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

#### **Ciri-Ciri Negara Indonesia sebagai Negara Kesatuan**

Ciri-ciri negara kesatuan mencerminkan dasar-dasar yang membentuk struktur dan sistem pemerintahan yang ada di negara ini. Sebagai negara yang luas dan terdiri dari berbagai suku, agama, budaya, dan bahasa, Indonesia mengedepankan persatuan dalam keberagaman melalui penerapan prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan, seluruh wilayah negara dikelola di bawah satu pemerintahan pusat yang memiliki kewenangan penuh untuk membuat dan melaksanakan kebijakan. Meskipun Indonesia mengakui pentingnya keberagaman daerah, negara tetap menegakkan prinsip kesatuan yang menjaga keselarasan dan stabilitas politik serta sosial. Penerapan prinsip ini terlihat jelas dalam pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, yang diatur sedemikian rupa untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan yang diambil dapat diterima dan dilaksanakan dengan adil di seluruh wilayah Indonesia. Berikut merupakan ciri-ciri negara kesatuan:

#### **a. Pemerintahan Terpusat**

Indonesia menerapkan sistem pemerintahan terpusat. Semua keputusan penting yang menyangkut kepentingan nasional ditentukan oleh pemerintah pusat, sementara pemerintah daerah memiliki kewenangan terbatas untuk mengelola urusan lokal, namun tetap dalam batasan yang ditentukan oleh pusat.

#### **b. Satu Konstitusi**

Sebagai negara kesatuan, Indonesia hanya memiliki satu konstitusi yaitu UUD 1945, yang mengatur seluruh aspek kehidupan bernegara. Ini memastikan adanya keseragaman hukum di seluruh wilayah Indonesia, berbeda dengan negara federal yang memiliki konstitusi terpisah di tiap wilayah.

### **c. Desentralisasi Terbatas**

Indonesia menerapkan sistem desentralisasi terbatas, di mana beberapa urusan pemerintahan dilimpahkan kepada pemerintah daerah untuk dikelola secara mandiri, namun kebijakan utama dan pengawasan tetap berada di tangan pemerintah pusat.

### **d. Kesatuan Wilayah**

Indonesia menjaga kesatuan wilayahnya, yang terdiri dari lebih dari 17.000 pulau. Negara bertanggung jawab untuk melindungi dan mengelola batas-batas wilayah Indonesia, baik di daratan, perairan, maupun udara, agar tetap utuh dan tidak terpecah.

## **Sejarah Pembentukan Negara Kesatuan Indonesia**

Sejak awal kemerdekaan, Indonesia dihadapkan pada pilihan bentuk negara yang harus diterapkan. Proses ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kondisi sosial, politik, dan budaya yang sangat beragam. Setelah meraih kemerdekaan, para pemimpin Indonesia mulai merumuskan struktur negara yang dapat mencerminkan keberagaman masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai etnis, agama, dan budaya.

Pada saat itu, beberapa tokoh penting Indonesia, seperti Mohammad Hatta, mengusulkan bentuk negara federal. Hatta berpendapat bahwa mengingat luasnya wilayah Indonesia dan keberagaman etnis serta budaya yang sangat besar, negara federal akan lebih cocok untuk mengakomodasi perbedaan-perbedaan tersebut. Negara bagian yang memiliki otonomi lebih besar dianggap dapat lebih fleksibel dalam mengatur urusan lokal, sekaligus menjaga keseimbangan antara pusat dan daerah.

Namun, Soekarno, yang juga merupakan salah satu pendiri bangsa, memiliki pandangan yang berbeda. Soekarno lebih memilih untuk membentuk negara kesatuan. Ia menganggap bahwa kesatuan bangsa lebih penting daripada pembagian kekuasaan dalam bentuk negara federal. Soekarno berargumen bahwa negara kesatuan akan lebih mampu menjaga persatuan dan integritas Indonesia, mengingat Indonesia yang baru merdeka memiliki tantangan besar untuk mengatasi perbedaan dan menciptakan rasa kebersamaan di antara seluruh elemen bangsa.

### **a. Pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS)**

Pada Konferensi Meja Bundar (KMB) pada tahun 1949, setelah perjuangan diplomatik panjang dengan Belanda, Indonesia akhirnya memutuskan untuk membentuk Republik Indonesia Serikat (RIS). RIS adalah bentuk negara serikat yang terdiri dari beberapa negara bagian yang memiliki otonomi lebih besar, termasuk negara bagian Jawa, Sumatra, dan negara-negara bagian lainnya yang sebelumnya merupakan bagian dari Hindia Belanda.

Meskipun negara serikat ini dimaksudkan untuk memberikan lebih banyak otonomi kepada daerah-daerah, konsep ini tidak berlangsung lama. Salah satu alasan utamanya adalah adanya ketidakcocokan antara bentuk negara federal dengan semangat kesatuan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Banyak kalangan yang merasa bahwa negara federal tidak mencerminkan kesatuan yang diinginkan oleh rakyat Indonesia.

### **b. Kembalinya ke Negara Kesatuan**

Pada tahun 1950, Indonesia memutuskan untuk kembali ke bentuk negara kesatuan yang lebih sesuai dengan semangat persatuan dan kesatuan yang ingin diwujudkan. UUD 1945, yang sebelumnya menjadi dasar negara, kembali diterapkan sebagai konstitusi negara. Pemulihan negara kesatuan ini dianggap sebagai langkah yang tepat untuk memperkuat persatuan bangsa Indonesia, yang saat itu masih dalam proses menyatukan berbagai wilayah dan masyarakat yang memiliki perbedaan besar.

Keputusan untuk kembali ke negara kesatuan juga mempertegas prinsip "Bhinneka Tunggal Ika" atau "Berbeda-beda tetapi tetap satu" yang menjadi semangat nasional Indonesia. Indonesia sebagai

negara kesatuan berarti bahwa seluruh wilayah, dari Sabang sampai Merauke, adalah bagian dari satu negara yang utuh, dengan satu pemerintahan pusat yang mengatur kebijakan nasional yang berlaku di seluruh daerah.

## Tantangan Negara Kesatuan Indonesia

Sebagai negara kesatuan yang besar dan beragam, Indonesia menghadapi sejumlah tantangan yang signifikan dalam menjaga integritas dan persatuan di tengah keragaman sosial, budaya, serta kondisi geografis yang luas. Keberagaman etnis, agama, bahasa, serta perbedaan sosial dan budaya menjadi tantangan utama dalam menjaga stabilitas sosial dan politik, sementara tantangan geografis yang melibatkan ribuan pulau yang terpisah juga menguji kemampuan negara untuk memastikan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah. Berikut ini merupakan sejumlah tantangan yang dihadapi dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia:

### a. Keberagaman Etnis, Agama, dan Budaya



*Keberagaman di Indonesia – Freepik.com*

Indonesia adalah negara dengan lebih dari 300 kelompok etnis dan lebih dari 700 bahasa daerah. Keberagaman ini menciptakan tantangan tersendiri dalam menjaga harmoni sosial, di mana perbedaan tersebut sering kali menjadi sumber ketegangan. Konflik etnis dan agama yang pernah terjadi di berbagai daerah menunjukkan bahwa meskipun Indonesia memiliki potensi untuk berkembang dalam keberagaman, tantangan untuk menciptakan kesetaraan dan persatuan tetap besar.

Solusi:

Pemerintah pusat perlu merumuskan kebijakan yang inklusif dan adil, memastikan bahwa seluruh kelompok masyarakat dihargai dan diikutsertakan dalam proses pembangunan negara. Ini termasuk kebijakan afirmatif untuk memperkuat kelompok-kelompok yang terpinggirkan dan memastikan tidak ada diskriminasi berdasarkan etnis atau agama. Program-program pendidikan yang mengajarkan toleransi, kebhinekaan, serta pentingnya persatuan dalam keberagaman juga sangat penting untuk membangun rasa nasionalisme yang kuat di kalangan seluruh rakyat Indonesia.

### b. Tantangan Geografis yang Luas

Dengan lebih dari 17.000 pulau yang tersebar di berbagai samudra, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam hal konektivitas dan pemerataan pembangunan. Wilayah yang luas dan tersebar sering kali menyebabkan ketimpangan antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta antara wilayah yang lebih maju dan wilayah yang tertinggal. Daerah-daerah terpencil, khususnya di wilayah timur Indonesia, sering kali merasa terisolasi dan tertinggal dalam hal akses terhadap layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.

Solusi:

Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah pusat harus memastikan bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya terfokus pada daerah pusat, seperti Pulau Jawa, tetapi juga merata ke seluruh wilayah Indonesia. Pembangunan transportasi, seperti jalan raya, pelabuhan, dan bandara, sangat penting untuk menghubungkan daerah-daerah terpencil dengan pusat ekonomi dan pemerintahan. Selain itu, pemerintah perlu memperkuat konektivitas digital agar daerah-daerah terpencil dapat mengakses

informasi dan layanan online yang sama dengan daerah lainnya. Hal ini akan memastikan pemerataan pelayanan publik yang lebih adil dan merata.

**c. Kesenjangan Sosial dan Ekonomi**

Meskipun Indonesia telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan, kesenjangan antara kaya dan miskin masih menjadi masalah besar. Ketimpangan ekonomi ini tidak hanya terjadi antara kota dan desa, tetapi juga antara wilayah yang lebih maju seperti Jawa dan wilayah yang kurang berkembang seperti Papua dan Maluku. Kesenjangan ini dapat menambah ketegangan sosial, terutama jika tidak ada kebijakan yang menjamin kesejahteraan rakyat secara merata.

Solusi:

Pemerintah pusat harus menerapkan kebijakan pembangunan ekonomi yang berfokus pada pemerataan, dengan memperhatikan potensi setiap daerah. Program pembangunan yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat, seperti pengembangan sektor pertanian, perikanan, dan industri kreatif di daerah-daerah yang belum berkembang, akan memberikan dampak positif dalam mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi. Pemberdayaan ekonomi daerah juga harus disertai dengan penguatan akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

**d. Penguatan Pemerintahan Daerah**

Indonesia menerapkan sistem desentralisasi yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan lokal. Meskipun demikian, pengawasan yang efektif dari pemerintah pusat tetap diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan daerah tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Salah satu tantangan terbesar dalam sistem desentralisasi adalah memastikan bahwa pemerintah daerah memiliki kapasitas dan sumber daya yang cukup untuk mengelola urusan lokal dengan efektif.

Solusi:

Pemerintah pusat harus memperkuat kapasitas pemerintah daerah, baik dari sisi anggaran, pelatihan pegawai, maupun sistem administrasi pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dengan meningkatkan kapasitas dan kinerja pemerintah daerah, pemerintahan di tingkat lokal akan lebih efisien dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mengelola potensi lokal sesuai dengan kebijakan nasional yang lebih besar.

**e. Mempertahankan Stabilitas Sosial dan Keamanan**

Indonesia tidak hanya menghadapi tantangan dari dalam, tetapi juga ancaman dari luar yang dapat mengganggu keutuhan wilayah. Ancaman separatisme di beberapa daerah, seperti yang terjadi di Aceh dan Papua, menunjukkan bahwa meskipun negara kesatuan sudah terbentuk, tantangan untuk mempertahankan integritas nasional tetap ada. Selain itu, ketegangan sosial yang dipicu oleh perbedaan politik, ekonomi, atau agama bisa menjadi pemicu perpecahan.

Solusi:

Pemerintah pusat harus memperkuat keamanan nasional dan menjaga stabilitas sosial dengan menerapkan kebijakan yang berpihak pada keadilan sosial. Penegakan hukum yang adil, peningkatan kerjasama antar lembaga pemerintahan, serta dialog terbuka dengan masyarakat untuk meredakan ketegangan sosial merupakan langkah penting untuk mencegah terjadinya perpecahan. Selain itu, memperkuat kehadiran negara di wilayah-wilayah yang rawan konflik juga penting untuk memastikan bahwa negara tidak kehilangan kendali atas daerah-daerah tersebut

## Pentingnya Persatuan dalam Negara Kesatuan



*Kerukunan antar umat beragama – Shutterstock.com/ 2450222547*

Indonesia sebagai negara kesatuan menghadapi berbagai tantangan yang harus diatasi untuk mempertahankan kesatuan dan persatuan di tengah keberagaman yang luar biasa. Sebagai negara yang memiliki lebih dari 17.000 pulau, Indonesia memiliki keragaman etnis, agama, budaya, dan bahasa yang sangat besar, yang sering kali menjadi sumber tantangan dalam menjaga keutuhan negara. Berikut adalah beberapa tantangan utama yang dihadapi Indonesia dalam menjaga kesatuan negara:

### a. Keberagaman Etnis, Agama, dan Budaya

Keberagaman adalah kekuatan sekaligus tantangan terbesar bagi Indonesia. Dengan lebih dari 300 kelompok etnis dan ratusan bahasa yang digunakan di seluruh Indonesia, persatuan sering kali diuji oleh perbedaan ini. Setiap kelompok etnis dan agama memiliki kebudayaan dan tradisi yang khas, yang bisa menimbulkan ketegangan apabila tidak dikelola dengan baik. Selain itu, perbedaan pandangan dalam beragama dan dalam cara hidup seringkali berpotensi menimbulkan konflik sosial, terutama jika tidak ada kebijakan yang inklusif yang bisa merangkul semua kelompok masyarakat.

Solusi:

Untuk mengatasi tantangan ini, Indonesia membutuhkan kebijakan yang memperkuat kerukunan antarumat beragama dan antar-etnis. Kebijakan inklusif yang menghargai keberagaman serta melibatkan semua kelompok masyarakat dalam pembangunan sosial dan ekonomi adalah kunci untuk menjaga kesatuan. Pendidikan yang mengajarkan toleransi dan pemahaman antarbudaya serta dialog antaragama sangat penting untuk memperkuat rasa persatuan. Selain itu, setiap kebijakan pembangunan nasional harus memperhatikan kebutuhan dan aspirasi berbagai kelompok yang ada di Indonesia.

### b. Tantangan Geografis yang Luas

Indonesia terdiri dari ribuan pulau yang tersebar luas, yang membuat pengelolaan pemerintahan dan pembangunan menjadi lebih sulit. Isu geografis ini sering kali menciptakan ketimpangan antara daerah pusat dan daerah terpencil, yang mungkin sulit dijangkau oleh infrastruktur dan layanan publik. Keterbatasan dalam transportasi dan komunikasi antar wilayah, terutama di daerah-daerah terpencil atau pulau-pulau kecil, sering menjadi hambatan dalam pemerataan pembangunan.

Solusi:

Untuk mengatasi tantangan ini, pembangunan infrastruktur yang merata menjadi sangat penting. Pemerintah pusat harus memastikan adanya konektivitas yang baik antar daerah dengan membangun transportasi yang efisien dan meningkatkan kualitas infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah terpencil. Pembangunan jalur transportasi, pelabuhan, bandara, serta jaringan komunikasi yang terintegrasi akan memudahkan aliran barang, jasa, dan informasi ke seluruh pelosok negeri. Di samping itu, pemerataan pembangunan ekonomi dan fasilitas sosial, seperti pendidikan dan kesehatan, juga harus diperhatikan untuk memastikan tidak ada daerah yang tertinggal dalam pembangunan.

### c. Ketimpangan Pembangunan Antara Pusat dan Daerah

Pembangunan Indonesia yang lebih terfokus di daerah pusat, terutama di Pulau Jawa, sering kali meninggalkan ketimpangan di luar pulau tersebut. Ketimpangan pembangunan antar daerah ini tidak hanya berdampak pada kesejahteraan ekonomi, tetapi juga dapat menimbulkan perasaan ketidakadilan dan marginalisasi di antara daerah-daerah luar Jawa. Ketidakmerataan ini dapat mengancam persatuan jika daerah-daerah merasa terabaikan dan tidak mendapatkan perhatian yang layak.

Solusi:

Pemerintah perlu memastikan bahwa program pembangunan dan kebijakan ekonomi dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Salah satu cara untuk mengatasi ketimpangan ini adalah dengan mempercepat pembangunan di daerah-daerah luar Jawa melalui program-program yang berbasis pada kebutuhan lokal. Pemberdayaan daerah dengan meningkatkan kapasitas pemerintah daerah untuk mengelola urusan lokal menjadi sangat penting. Selain itu, pengembangan sektor ekonomi daerah, seperti pertanian, perikanan, dan industri kreatif, akan membantu mengurangi ketimpangan ekonomi antar wilayah.

### d. Penguatan Pemerintahan Daerah

Dalam rangka menjaga kesatuan negara, Indonesia menerapkan sistem desentralisasi terbatas, di mana pemerintah daerah memiliki kewenangan tertentu untuk mengatur urusan lokal. Meskipun demikian, pemerintah pusat tetap memiliki kontrol utama atas kebijakan nasional. Penguatan pemerintah daerah sangat penting agar mereka dapat mengelola urusan lokal secara efektif, namun tetap dalam kerangka negara kesatuan.

Solusi:

Peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia di pemerintah daerah merupakan langkah yang krusial untuk memperkuat otonomi daerah. Pendidikan dan pelatihan bagi pejabat daerah agar lebih kompeten dalam mengelola urusan lokal, serta penerapan sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel, akan membantu dalam meningkatkan kualitas pemerintahan daerah. Selain itu, pemberian dana yang cukup dan tepat sasaran untuk daerah-daerah yang membutuhkan akan mempermudah pemerintah daerah dalam melaksanakan program-program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan lokal.

### e. Mempertahankan Identitas Nasional di Tengah Globalisasi

Globalisasi yang berkembang pesat memengaruhi banyak aspek kehidupan di Indonesia, mulai dari ekonomi, budaya, hingga politik. Di satu sisi, globalisasi membawa peluang untuk kemajuan dan kemakmuran, namun di sisi lain, ia juga membawa tantangan dalam mempertahankan identitas nasional Indonesia. Pengaruh budaya asing yang masuk dengan begitu cepat dapat menggerus nilai-nilai lokal dan kebudayaan asli Indonesia, yang berpotensi menurunkan rasa nasionalisme.



*Mempelajari Budaya untuk mempertahankan identitas nasional –  
Shutterstock.com/ 1636751851*

Solusi:

Untuk menghadapi tantangan globalisasi, Indonesia harus memperkuat rasa identitas nasional yang berlandaskan pada Pancasila dan nilai-nilai kebudayaan yang telah menjadi ciri khas bangsa. Pendidikan yang mengajarkan pentingnya kebudayaan lokal serta sejarah perjuangan bangsa dapat membantu memperkuat jati diri bangsa Indonesia. Di samping itu, Indonesia harus mengelola globalisasi dengan bijak, memanfaatkan peluang yang ada untuk kemajuan, tetapi tetap menjaga dan melestarikan budaya dan nilai-nilai luhur bangsa.

#### f. Stabilitas Sosial dan Keamanan

Keamanan nasional dan sosial merupakan hal penting dalam menjaga kesatuan negara. Ketegangan sosial yang terjadi akibat perbedaan politik, ekonomi, atau sosial dapat memecah belah masyarakat dan mengancam stabilitas negara. Terlebih lagi, ancaman dari luar negeri atau kelompok separatis yang mencoba menggoyahkan kesatuan negara harus dihadapi dengan tegas.

Solusi:

Penting bagi pemerintah untuk menjaga stabilitas sosial melalui pendekatan yang inklusif dan adil. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses politik, meningkatkan pendidikan politik dan demokrasi, serta memperkuat penegakan hukum yang adil dan tegas adalah langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya ketegangan sosial. Selain itu, penguatan aparat keamanan untuk menjaga wilayah negara juga penting untuk memastikan bahwa negara tetap utuh dan stabil.

### Peran Pemerintah Pusat dalam Menjaga Negara Kesatuan



*Upaya pemerintah dalam menjaga kesatuan – kompas.com*

Pemerintah pusat memegang peranan yang sangat penting dalam menjaga keutuhan dan stabilitas negara kesatuan Indonesia. Sebagai otoritas tertinggi, pemerintah pusat bertanggung jawab merumuskan kebijakan nasional yang mencakup seluruh aspek kehidupan bernegara, mulai dari politik, ekonomi, sosial, hingga budaya. Melalui kebijakan ini, pemerintah pusat memastikan bahwa seluruh wilayah Indonesia bergerak menuju tujuan yang sama, yakni menciptakan kesejahteraan rakyat dan menjaga kesatuan negara.

#### a. Kebijakan Nasional yang Merata

Pemerintah pusat harus memastikan kebijakan yang diterapkan di setiap daerah dapat menyentuh semua lapisan masyarakat dengan adil dan merata. Kebijakan-kebijakan ini mencakup pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta kebijakan ekonomi yang mendorong pertumbuhan dan

pemerataan pembangunan di seluruh wilayah. Meskipun Indonesia memiliki keberagaman dan kondisi geografis yang berbeda, kebijakan yang terpusat memungkinkan terciptanya kesetaraan di berbagai sektor.

#### **b. Pengawasan dan Koordinasi dengan Pemerintah Daerah**

Meskipun Indonesia menerapkan sistem desentralisasi dengan memberi otonomi daerah, kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah tetap berada dalam pengawasan pemerintah pusat. Ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan daerah tidak bertentangan dengan kebijakan nasional yang lebih besar dan tujuan negara kesatuan. Pemerintah pusat bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan daerah agar tetap selaras dengan prinsip negara kesatuan.

#### **c. Penegakan Hukum dan Keamanan Nasional**

Sebagai pengatur utama, pemerintah pusat juga berperan dalam memastikan penegakan hukum yang konsisten di seluruh wilayah negara. Melalui aparat penegak hukum, pemerintah pusat bertugas menjaga ketertiban dan keamanan, serta menangani segala bentuk ancaman terhadap integritas wilayah, baik dari ancaman luar maupun dalam negeri. Keberhasilan pemerintah pusat dalam menegakkan hukum dan memastikan stabilitas politik akan sangat berpengaruh pada kesatuan negara Indonesia.

#### **d. Penguatan Identitas Nasional**

Pemerintah pusat juga berperan dalam memperkuat identitas nasional Indonesia. Dengan keberagaman budaya, suku, dan agama, penting bagi pemerintah pusat untuk menanamkan rasa persatuan yang berbasis pada nilai-nilai Pancasila. Melalui kebijakan pendidikan, budaya, dan media, pemerintah pusat mengedepankan nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa untuk mencegah perpecahan yang disebabkan oleh perbedaan.

#### **e. Fasilitas Pembangunan yang Merata**

Kebijakan pemerintah pusat harus mampu menjamin pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Membangun infrastruktur yang menghubungkan daerah-daerah terpencil dengan pusat ekonomi dan pemerintahan, seperti jalan raya, pelabuhan, dan jaringan komunikasi, adalah salah satu cara untuk mewujudkan negara yang satu. Pembangunan yang merata akan mengurangi kesenjangan antar daerah dan meningkatkan rasa kebersamaan di seluruh wilayah Indonesia.



### **Jejak Pancasila**

#### **Desentralisasi Terbatas di Indonesia**

Indonesia menerapkan desentralisasi terbatas, yang memberikan otonomi kepada daerah-daerah untuk mengelola urusan lokalnya, namun tetap dalam pengawasan dan kendali pemerintah pusat. Sistem ini memastikan bahwa meskipun daerah memiliki kewenangan untuk mengatur urusan lokal, keputusan penting terkait kepentingan nasional tetap ditentukan oleh pemerintah pusat di Jakarta.



*Wujud desentralisasi adalah adanya kantor pemerintahan daerah – shutterstock.com/ 2585853679*

### Contoh Soal

Apa prinsip dasar yang mengikat seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara?

- A. Pancasila
- B. Bhinneka Tunggal Ika
- C. UUD 1945
- D. Negara Kesatuan

Jawaban: A. Pancasila

Pembahasan:

Pancasila adalah dasar negara dan ideologi nasional Indonesia yang menjadi prinsip dasar yang mengikat seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila memuat nilai-nilai fundamental yang menjadi pedoman dalam bersikap, bertindak, serta dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara.

Pilihan lain:

- Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan bangsa Indonesia, yang berarti "Berbeda-beda tetapi tetap satu".
- UUD 1945 adalah konstitusi atau hukum dasar negara.
- Negara Kesatuan adalah bentuk negara Indonesia, tetapi bukan prinsip dasar yang mengikat rakyat secara ideologis.

Jadi, prinsip dasar yang mengikat seluruh rakyat Indonesia adalah Pancasila.

### Kegiatan Kelompok 1

**Judul: Desentralisasi dan Pelayanan Publik di Daerahku**

**Tujuan: Mengenal sistem desentralisasi serta menilai manfaatnya bagi warga di daerah.**

Untuk mewujudkan demokrasi yang lebih merata, sebagian urusan pemerintahan diserahkan kepada pemerintah daerah. Tujuannya agar layanan publik lebih dekat, cepat, dan sesuai kebutuhan setempat. Agar lebih memahami hal ini, lakukan kegiatan berikut.

1. Bentuk kelompok diskusi beranggotakan 4–5 peserta didik.
2. Cari informasi tentang contoh urusan/layanan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah di tempatmu (misalnya pendidikan dasar, puskesmas, administrasi kependudukan, kebersihan, jalan lingkungan). Tuliskan minimal empat urusan beserta contohnya.
3. Diskusikan apakah desentralisasi membantu pemenuhan kebutuhan daerah. Catat tiga manfaat dan dua tantangan yang kalian temui, lalu beri satu usulan perbaikan berdasarkan nilai Pancasila (adil, gotong royong, musyawarah).
4. Pilih satu anggota untuk mempresentasikan hasil kelompok di depan kelas. Boleh membawa lembar ringkas/poster berisi daftar urusan, manfaat–tantangan, dan usulan perbaikan.



## 4. Upaya Mempertahankan Keutuhan Wilayah Negara



*Gotongroyong salah satu sikap menjaga keutuhan NKRI – Shutterstock.com/ 2614883407*

Mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan tugas bersama yang harus dihadapi oleh seluruh elemen bangsa. Keberagaman yang dimiliki Indonesia, meskipun menjadi kekuatan besar, memiliki potensi untuk memecah belah jika tidak dikelola dengan bijaksana. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami sikap-sikap yang dapat mengancam keutuhan wilayah NKRI serta cara-cara untuk mengatasi dan mencegahnya. Selain itu, perlu adanya kesadaran bersama tentang pentingnya menjaga integritas negara yang terbentang dari Sabang sampai Merauke.

### **Tindakan dan Perilaku yang Membahayakan Keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia**

Beberapa sikap atau paham yang berkembang dalam masyarakat dapat mengancam keutuhan wilayah Indonesia. Sikap-sikap ini dapat menyebabkan perpecahan, ketegangan sosial, dan merusak rasa kebersamaan yang menjadi pondasi persatuan bangsa. Berikut adalah beberapa sikap yang dapat mengancam keutuhan wilayah NKRI:

#### **a. Individualisme**

Individualisme adalah pandangan hidup yang menempatkan kepentingan pribadi di atas kepentingan bersama. Dalam konteks suatu negara, terutama Indonesia yang kaya akan keberagaman, sikap ini berpotensi mengancam persatuan dan kesatuan. Ketika individu atau kelompok hanya fokus pada kepentingan diri sendiri tanpa memperhatikan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, maka rasa kebersamaan dan solidaritas antar warga negara dapat terkikis.

#### **▷ Dampak pada Keutuhan Wilayah**

- **Melemahkan Kohesi Sosial:** Individualisme mengarah pada pengutamaan kepentingan pribadi yang dapat menurunkan tingkat solidaritas sosial. Ketika setiap individu atau kelompok lebih mementingkan kepentingan pribadi, maka komunikasi, kolaborasi, dan gotong royong antar warga negara akan berkurang. Hal ini dapat memperburuk ketegangan sosial yang ada, terutama di masyarakat yang sangat beragam seperti Indonesia.
- **Ketidakpedulian terhadap Kesejahteraan Bersama:** Ketika setiap individu hanya fokus pada kepentingan diri sendiri, maka kesadaran untuk bekerja sama demi kesejahteraan bersama akan menurun. Dalam konteks NKRI, hal ini bisa mengarah pada kurangnya perhatian terhadap

isu-isu nasional yang lebih besar, seperti kemiskinan, pendidikan, dan masalah sosial lainnya yang memerlukan perhatian kolektif.

#### ▷ **Upaya Pencegahan**

- **Pendidikan Karakter:** Penting untuk menanamkan nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong dalam pendidikan sejak usia dini. Melalui pendidikan yang mengajarkan tentang pentingnya kepentingan kolektif, rasa tanggung jawab sosial dapat ditumbuhkan. Di sekolah, masyarakat dapat diberikan pemahaman mengenai sejarah perjuangan bangsa, di mana kebersamaan dan solidaritas antar warga negara menjadi kunci dalam meraih kemerdekaan dan membangun Indonesia.
- **Program Sosial yang Melibatkan Masyarakat:** Untuk mengatasi individualisme, perlu ada program yang melibatkan masyarakat dalam kegiatan sosial yang bermanfaat bagi orang banyak, seperti kerja bakti, penggalangan dana untuk korban bencana, dan program pemberdayaan masyarakat. Melalui kegiatan ini, masyarakat dapat merasakan manfaat dari kerja sama dan dapat melihat langsung bagaimana kontribusi mereka dapat membantu memecahkan masalah bersama.

#### **b. Sukuisme**

Sukuisme adalah sikap yang mengutamakan kelompok suku tertentu sebagai yang lebih utama atau superior dibandingkan dengan kelompok suku lainnya. Indonesia sebagai negara yang terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya, memiliki tantangan besar untuk menjaga kerukunan antar kelompok. Jika dibiarkan berkembang, sukuisme dapat memicu konflik horizontal yang mengancam persatuan dan keutuhan wilayah NKRI.

#### ▷ **Dampak pada Keutuhan Wilayah**

- **Permusuhan antar Suku:** Sukuisme dapat menyebabkan ketegangan antar suku, yang pada akhirnya bisa menumbuhkan permusuhan. Ketika satu suku merasa superior atau lebih berhak daripada suku lain, hal ini dapat menciptakan rasa tidak adil dan ketidaksetaraan. Konflik antar suku berpotensi menciptakan ketidakstabilan di beberapa wilayah dan mengganggu hubungan antar kelompok yang berbeda.
- **Mengancam Integrasi Nasional:** Indonesia sebagai negara kesatuan mengedepankan prinsip persatuan dalam keberagaman. Namun, jika sikap sukuisme dibiarkan, hal ini bisa memperburuk integrasi nasional dan mengancam persatuan bangsa. Sukuisme akan mengarah pada perpecahan yang dapat merusak kohesi sosial dan menghambat pembangunan nasional yang merata.

#### ▷ **Upaya Pencegahan**

- **Pendidikan Multikultural:** Salah satu langkah penting untuk mencegah sukuisme adalah melalui pendidikan multikultural yang mengajarkan nilai-nilai keberagaman. Dalam pendidikan ini, siswa diajarkan untuk saling menghargai, menerima perbedaan, dan hidup berdampingan dalam harmoni meskipun berasal dari latar belakang yang berbeda. Melalui pendidikan yang inklusif dan mengedepankan keberagaman, generasi muda dapat memahami betapa pentingnya toleransi antar suku dan budaya di Indonesia.
- **Penguatan Hukum untuk Perlindungan Minoritas:** Pemerintah perlu menguatkan hukum yang melindungi hak-hak setiap kelompok, terutama kelompok minoritas. Tidak ada satu pun suku yang lebih berhak atas hak-hak tertentu. Penguatan sistem hukum ini akan membantu mencegah diskriminasi berbasis suku dan menjaga keseimbangan antar kelompok dalam masyarakat. Selain itu, penting untuk memperkenalkan kebijakan yang memastikan pemerataan dalam hal peluang dan akses bagi semua kelompok suku di Indonesia.

### c. Etnosentrisme



*Merusak kebersamaan yang berujung perusakan fasilitas  
Bersama – Kompas.com*

Etnosentrisme adalah pandangan atau sikap yang menilai budaya atau kelompok etnis sendiri sebagai yang paling baik atau superior dibandingkan dengan kelompok lain. Di Indonesia, yang terdiri dari lebih dari 300 kelompok etnis, etnosentrisme bisa memperburuk perpecahan antar kelompok dan menghambat terciptanya masyarakat yang harmonis dan inklusif. Sikap ini dapat mengganggu rasa saling menghormati dan memengaruhi stabilitas sosial.

#### ▷ Dampak pada Keutuhan Wilayah

- Menumbuhkan Permusuhan dan Diskriminasi: Etnosentrisme mengarah pada rasa superioritas terhadap kelompok etnis tertentu. Hal ini dapat menimbulkan permusuhan antar kelompok yang merasa diperlakukan tidak adil atau terpinggirkan. Diskriminasi berbasis etnis dapat memperburuk ketegangan sosial, menciptakan ketidakadilan, dan mengarah pada marginalisasi kelompok etnis tertentu.
- Merusak Kebersamaan antar Etnis: Sikap etnosentrisme memperburuk hubungan antar etnis yang berbeda. Ketika suatu kelompok merasa bahwa budaya atau adat istiadat mereka lebih tinggi atau lebih berharga daripada budaya kelompok lain, hal ini akan merusak rasa kebersamaan yang dibangun atas dasar saling menghargai dan menghormati.

#### ▷ Upaya Pencegahan

- Pendidikan tentang Nilai-Nilai Pluralisme: Untuk mencegah berkembangnya etnosentrisme, penting untuk mengajarkan nilai-nilai pluralisme sejak dini. Pendidikan yang mengedepankan penghargaan terhadap keberagaman budaya dan adat istiadat yang berbeda akan membantu menciptakan generasi yang menghormati dan menerima perbedaan. Pembelajaran ini harus mencakup sejarah Indonesia yang kaya akan keberagaman etnis, serta pentingnya menghargai perbedaan untuk menjaga persatuan bangsa.
- Kebijakan yang Inklusif: Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan yang diambil melibatkan semua kelompok etnis dalam proses pembuatan keputusan dan pembangunan. Kebijakan yang adil dan setara akan mengurangi ketimpangan dan ketidakadilan antar kelompok etnis, serta mencegah perasaan ketidaksetaraan yang bisa menumbuhkan konflik. Memastikan bahwa semua kelompok memiliki akses yang setara terhadap peluang politik, sosial, dan ekonomi juga penting untuk menciptakan integrasi sosial yang lebih baik.

### d. Fanatisme

Fanatisme adalah sikap yang mengutamakan keyakinan atau pandangan tertentu secara berlebihan, yang sering kali berujung pada penolakan terhadap keyakinan atau pandangan lain. Fanatisme bisa berkembang dalam berbagai aspek kehidupan, seperti agama, politik, atau sosial.

#### ▷ Dampak pada Keutuhan Wilayah

- Menimbulkan Intoleransi dan Konflik Sosial: Sikap fanatisme dapat menyebabkan intoleransi terhadap orang atau kelompok yang memiliki pandangan berbeda. Hal ini bisa berkembang

menjadi konflik sosial yang merusak persatuan dan stabilitas negara. Dalam kasus yang lebih ekstrem, fanatisme dapat mendorong tindakan kekerasan dan diskriminasi terhadap kelompok yang dianggap "berbeda."

- Mengancam Persatuan Nasional: Fanatisme berpotensi merusak persatuan nasional. Ketika kelompok-kelompok dalam masyarakat lebih mementingkan keyakinan atau ideologi mereka sendiri tanpa menghargai pandangan orang lain, maka perbedaan ini bisa menyebabkan polarisasi yang mengancam kesatuan bangsa. Sikap ini menghalangi terciptanya dialog dan kerjasama antar berbagai elemen masyarakat, yang pada akhirnya mengganggu integrasi sosial.

#### ▷ **Upaya Pencegahan**

- Mengedepankan Sikap Toleransi: Pendidikan yang mengedepankan sikap toleransi sangat penting untuk mencegah berkembangnya fanatisme. Melalui pendidikan dan dialog lintas agama, pandangan yang mengutamakan saling pengertian dan penghargaan terhadap perbedaan dapat ditumbuhkan. Pemahaman tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan yang dilindungi oleh hukum akan memperkuat sikap toleransi di masyarakat.
- Penguatan Hukum yang Melindungi Kebebasan Beragama: Negara harus memperkuat sistem hukum yang menjamin kebebasan beragama dan melindungi masyarakat dari tindak kekerasan yang disebabkan oleh fanatisme. Hukum yang tegas terhadap tindakan diskriminasi, kekerasan, dan ekstremisme sangat penting untuk menjaga ketertiban dan memastikan bahwa semua warga negara dapat hidup berdampingan dengan aman tanpa takut akan diskriminasi berbasis keyakinan atau pandangan pribadi.
- Dialog Lintas Agama dan Pandangan: Mengadakan forum-forum diskusi dan dialog antar kelompok dengan pandangan berbeda dapat membantu memperlancar hubungan antar kelompok yang sebelumnya mungkin merasa terisolasi atau terancam. Dengan berkomunikasi secara terbuka, masyarakat dapat saling memahami perbedaan dan menemukan solusi untuk hidup berdampingan secara damai.

#### **e. Ekstremisme**

Ekstremisme adalah paham atau sikap yang mengutamakan pandangan atau tindakan yang sangat radikal, seringkali menuntut perubahan besar yang bertentangan dengan norma sosial yang berlaku. Ekstremisme tidak hanya muncul dalam bentuk tindakan yang melanggar hukum, tetapi juga dalam sikap yang mengancam persatuan dan kesatuan negara. Paham ini dapat berkembang dalam berbagai bentuk, seperti ekstremisme agama, politik, atau sosial. Dalam konteks ini, ekstremisme seringkali muncul sebagai respons terhadap ketidakpuasan sosial, ketidaksetaraan ekonomi, atau bahkan pengaruh eksternal yang membawa ideologi radikal.

#### ▷ **Dampak pada Keutuhan Wilayah**

- Memicu Kekerasan dan Terorisme: Ekstremisme sering kali mengarah pada penggunaan kekerasan untuk mencapai tujuan tertentu. Tindakan kekerasan yang didorong oleh pandangan ekstrem bisa berwujud dalam terorisme, serangan terhadap individu atau kelompok, serta penghancuran infrastruktur yang mendukung kehidupan sosial dan ekonomi. Hal ini dapat merusak stabilitas negara dan menciptakan ketakutan di masyarakat.
- Mengancam Integritas Negara: Paham ekstrem yang mengancam norma sosial dan hukum dapat memecah belah masyarakat. Ketika kelompok tertentu berusaha untuk menggulingkan tatanan sosial yang ada demi mencapai tujuan mereka, hal ini berpotensi menyebabkan polarisasi yang tajam di antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Ekstremisme dapat menciptakan ketegangan yang tidak hanya merusak harmoni sosial, tetapi juga menantang keutuhan wilayah NKRI.

- Merusak Tatanan Sosial dan Keharmonisan: Pengaruh ekstremisme yang tidak dikelola dengan baik bisa merusak rasa saling percaya di masyarakat. Masyarakat yang sebelumnya hidup dalam kerukunan bisa terpecah-pecah, terutama ketika paham ekstrem ini menyebar melalui media sosial, kelompok-kelompok kecil, atau individu-individu yang terpengaruh. Hal ini akan mengguncang tatanan sosial yang telah lama dijaga, baik oleh nilai-nilai budaya maupun oleh sistem hukum yang ada.

#### ▷ Upaya Pencegahan

- Pendidikan Kewarganegaraan dan Demokrasi: Salah satu cara efektif untuk mencegah berkembangnya ekstremisme adalah dengan meningkatkan pendidikan kewarganegaraan yang menanamkan nilai-nilai demokrasi, kebangsaan, dan penghormatan terhadap hukum. Dengan memahami prinsip-prinsip dasar demokrasi, kebebasan berpendapat, serta hak-hak dasar manusia, warga negara akan lebih mampu menanggulangi ideologi ekstrem yang bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan. Pendidikan ini juga harus mencakup pemahaman tentang pentingnya toleransi dan kebersamaan dalam kehidupan sosial.



*Mengajarkan nasionalis dan kewarganegaraan sejak dini – freepik.com*

- Penegakan Hukum yang Tegas: Negara harus memiliki sistem penegakan hukum yang kuat dan tegas terhadap tindakan-tindakan ekstrem yang mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat. Setiap tindakan yang mengarah pada kekerasan, perusakan, atau ancaman terhadap keutuhan negara harus segera dihadapi dengan sanksi yang sesuai. Penegakan hukum yang efektif akan memberikan pesan tegas bahwa Indonesia tidak akan mentolerir tindakan yang merusak kedamaian dan persatuan bangsa.
- Program Deradikalisasi: Selain penegakan hukum, upaya deradikalisasi juga sangat penting. Deradikalisasi bertujuan untuk membimbing individu atau kelompok yang telah terpengaruh oleh paham ekstremisme untuk kembali ke jalur yang sesuai dengan norma-norma sosial dan hukum yang berlaku. Program deradikalisasi ini dapat melibatkan berbagai lembaga, mulai dari pendidikan, lembaga sosial, hingga aparat keamanan, yang bekerja sama untuk menangkal paham radikal. Pendidikan berbasis keagamaan yang moderat dan pembangunan karakter juga merupakan bagian penting dari program deradikalisasi ini.
- Perhatian terhadap Wilayah Rawan Ekstremisme: Wilayah tertentu yang memiliki tingkat ketegangan sosial, ekonomi, atau politik yang tinggi harus mendapatkan perhatian lebih dalam pencegahan ekstremisme. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama untuk menciptakan kesejahteraan sosial di daerah-daerah ini melalui pemberdayaan ekonomi, peningkatan kualitas pendidikan, serta memperkuat jaringan sosial yang inklusif. Ini akan mengurangi ketidakpuasan yang bisa dimanfaatkan oleh kelompok ekstrem untuk menyebarkan ideologi mereka.

## Melindungi Kesatuan dan Kedaulatan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memang bukan hal yang mudah. Sebagai negara yang sangat luas, dengan lebih dari 17.000 pulau dan keberagaman suku, agama, budaya, serta bahasa, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menjaga persatuan. Upaya untuk mempertahankan keutuhan wilayah NKRI memerlukan kesadaran dan partisipasi aktif dari seluruh elemen bangsa. Setiap warga negara memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan. Salah satu cara untuk mencapainya adalah dengan menanamkan sikap yang mendukung kesatuan bangsa, di antaranya adalah rasa cinta tanah air, sikap rela berkorban, toleransi, dan kerja sama.

### a. Cinta Tanah Air

Cinta tanah air adalah sikap yang menggambarkan kedalaman rasa kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan terhadap bangsa dan negara. Cinta tanah air bukan sekadar rasa bangga terhadap negara, tetapi juga tindakan nyata untuk menjaga dan mempertahankan negara dari ancaman apapun. Sikap ini tidak hanya terbatas pada penghormatan terhadap simbol-simbol negara, tetapi juga mencakup kesetiaan terhadap bahasa, lingkungan sosial, ekonomi, dan politik bangsa.

#### ▷ Dampak pada Keutuhan Wilayah

- Kesadaran Kolektif: Rasa cinta tanah air membuat setiap warga negara lebih peduli terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi negara. Dengan adanya perhatian ini, masyarakat cenderung memiliki komitmen yang lebih kuat dalam menjaga stabilitas dan keberlangsungan negara, serta lebih sadar akan pentingnya menjaga keutuhan wilayah NKRI.
- Tanggung Jawab Bersama: Dengan cinta tanah air, masyarakat Indonesia memiliki rasa tanggung jawab kolektif untuk melindungi negara dari ancaman internal maupun eksternal. Keberagaman yang ada di Indonesia dapat menjadi kekuatan besar apabila setiap individu memiliki rasa cinta tanah air yang mendalam dan terus mendorong kesatuan dalam keberagaman.

#### ▷ Upaya Pencegahan

- Pendidikan Kebangsaan yang Mendalam: Pendidikan yang menanamkan nilai-nilai kebangsaan sangat penting dalam menumbuhkan rasa cinta tanah air. Melalui mata pelajaran sejarah yang menggali perjuangan bangsa, serta kegiatan ekstrakurikuler yang berbasis pada semangat nasionalisme, rasa cinta tanah air dapat dikuatkan sejak usia dini.
- Kegiatan Sosial yang Memupuk Kebersamaan: Masyarakat perlu dilibatkan dalam berbagai kegiatan yang tidak hanya fokus pada kemajuan pribadi, tetapi juga pada kontribusi untuk negara. Melalui partisipasi dalam kegiatan sosial, seperti bakti sosial, kampanye kebersihan, dan penghargaan terhadap pahlawan, kita bisa memperkuat rasa kebersamaan dan meningkatkan kecintaan terhadap tanah air.
- Peringatan Hari-Hari Nasional: Meningkatkan partisipasi dalam perayaan hari-hari besar nasional, seperti Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, Sumpah Pemuda, atau Hari Pahlawan, juga dapat memperkuat ikatan emosional dan rasa cinta tanah air. Kegiatan-kegiatan seperti upacara, seminar, dan diskusi yang menyoroti perjuangan bangsa dapat meningkatkan kesadaran dan kebanggaan akan tanah air.



## b. Reli Berkorban

Reli berkorban adalah sikap yang menunjukkan kesediaan untuk memberikan segala sesuatu yang dimiliki demi kepentingan bangsa dan negara. Sikap ini mencakup berbagai bentuk pengorbanan, tidak hanya dalam bentuk materi, tetapi juga waktu, tenaga, dan pikiran. Pengorbanan ini mencerminkan semangat patriotisme yang akan memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa, yang sangat penting dalam menghadapi tantangan yang ada.



*Bakti social yang memupuk kebersamaan –  
Shutterstock.com/ 2417919047*

### ▷ Dampak pada Keutuhan Wilayah

- Meningkatkan Semangat Kebersamaan: Sikap rela berkorban membantu meningkatkan semangat kebersamaan di kalangan warga negara. Dengan kesediaan untuk memberikan kontribusi demi negara, setiap individu akan merasa lebih terikat dengan satu sama lain. Kebersamaan yang tumbuh dari sikap ini akan mempermudah pemecahan masalah yang dihadapi negara, baik yang bersifat ekonomi, sosial, maupun politik.
- Memperkokoh Keutuhan Wilayah: Ketika setiap individu siap berkorban demi negara, hal ini akan memperkuat keutuhan wilayah NKRI. Pengorbanan ini tidak hanya terbatas pada menjaga kedaulatan negara, tetapi juga pada upaya-upaya lain yang melibatkan kerjasama antar warga negara untuk membangun dan melindungi bangsa.

### ▷ Upaya Pencegahan

- Pendidikan Kewarganegaraan: Untuk menumbuhkan sikap rela berkorban, pendidikan kewarganegaraan memainkan peran penting. Pendidikan ini harus menanamkan kesadaran tentang pentingnya pengorbanan dalam menjaga stabilitas negara dan bagaimana kontribusi setiap individu dapat memperkuat persatuan bangsa. Dalam hal ini, perlu dilakukan pembelajaran mengenai sejarah perjuangan bangsa, di mana banyak tokoh pejuang yang rela mengorbankan nyawa mereka untuk negara.
- Menghargai Jasa Pahlawan dan Pejuang Kemerdekaan: Salah satu cara untuk menumbuhkan semangat rela berkorban adalah dengan menghargai jasa para pahlawan dan pejuang kemerdekaan. Kegiatan yang menghormati sejarah perjuangan bangsa, seperti upacara peringatan Hari Pahlawan atau acara-acara yang berkaitan dengan sejarah nasional, dapat mengingatkan masyarakat akan pengorbanan yang telah dilakukan oleh generasi sebelumnya. Dengan demikian, sikap rela berkorban akan lebih dihargai dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

## c. Toleransi

Toleransi adalah sikap yang menerima perbedaan dengan lapang dada, tanpa memaksakan pandangan atau keyakinan pribadi pada orang lain. Indonesia, dengan segala keragamannya, baik suku, agama, budaya, dan bahasa, memerlukan sikap toleransi yang tinggi agar keutuhan NKRI dapat terjaga. Melalui toleransi, kita dapat menjaga keharmonisan sosial dan mencegah timbulnya ketegangan antar kelompok.

▷ **Dampak pada Keutuhan Wilayah**

- Menciptakan Stabilitas Sosial dan Politik: Sikap toleransi yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari akan menciptakan stabilitas sosial dan politik. Ketegangan antar kelompok, baik yang berbasis suku, agama, maupun budaya, dapat diminimalkan. Hal ini penting untuk menjaga persatuan bangsa dalam kerangka NKRI, karena ketegangan sosial yang tinggi dapat berisiko pada perpecahan.
- Menghindari Perpecahan: Sikap toleran juga menghindarkan terjadinya perpecahan akibat perbedaan budaya atau agama. Dalam masyarakat yang pluralistik seperti Indonesia, perbedaan ini adalah kekayaan yang harus dihargai dan dijaga. Dengan toleransi, masyarakat Indonesia akan dapat memperkuat integrasi nasional dan menciptakan rasa kebersamaan di tengah keragaman.

▷ **Upaya Pencegahan**

- Pendidikan Keberagaman: Pendidikan yang mengajarkan pentingnya keberagaman, baik budaya maupun agama, perlu diterapkan sejak dini. Materi yang mencakup nilai-nilai pluralisme, saling menghormati, dan penghargaan terhadap perbedaan harus menjadi bagian integral dalam kurikulum pendidikan. Dengan ini, generasi muda akan lebih siap menerima dan menghargai perbedaan yang ada di sekitarnya.
- Dialog Antar Kelompok: Mengadakan dialog antar kelompok yang berbeda, baik melalui program pendidikan maupun forum diskusi, dapat membantu memupuk rasa saling pengertian. Dalam forum ini, individu dari berbagai latar belakang dapat berbagi pandangan, memperdalam pemahaman, dan menyelesaikan masalah yang mungkin timbul karena perbedaan. Dialog semacam ini akan mempererat hubungan antar kelompok, baik di tingkat lokal maupun nasional.

**d. Kerjasama**



*Kerja sama membersihkan lingkungan Bersama – Shutterstock.com/2593003759*

Kerjasama, yang dalam budaya Indonesia dikenal dengan istilah *gotong royong*, merupakan pondasi yang sangat penting dalam menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam masyarakat Indonesia yang sangat luas dan beragam ini, kerjasama antar sesama warga

negara, antara pemerintah pusat dan daerah, serta antar negara menjadi faktor utama untuk mencapai tujuan bersama, seperti pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya. Kerjasama ini harus dijaga dan diperkuat agar negara dapat tetap kokoh dan bersatu.

▷ **Dampak pada Keutuhan Wilayah**

- **Mempercepat Pembangunan dan Pemerataan Kesejahteraan:** Kerjasama antara masyarakat, pemerintah, dan berbagai elemen bangsa dapat mempercepat proses pembangunan nasional. Dengan sinergi yang baik, sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mencapai hasil yang maksimal. Hal ini juga memungkinkan pemerataan kesejahteraan yang lebih merata di seluruh Indonesia, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan. Pembangunan yang merata akan mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi antar daerah, sehingga memperkuat persatuan bangsa.
- **Menjalin Hubungan yang Erat antara Pusat dan Daerah:** Kerjasama yang terjalin antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sangat penting untuk menciptakan kebijakan yang efektif dan dapat diterima oleh semua pihak. Hal ini juga memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak hanya berpihak pada satu wilayah, tetapi memperhatikan kebutuhan seluruh bangsa. Dengan komunikasi yang baik antara pusat dan daerah, akan lebih mudah untuk menyelesaikan masalah bersama, baik yang bersifat lokal maupun nasional.

▷ **Upaya Pencegahan**

- **Mendorong Partisipasi Aktif Masyarakat:** Salah satu cara untuk memperkuat kerjasama adalah dengan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai kegiatan sosial dan pembangunan. Masyarakat harus dilibatkan dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Partisipasi aktif ini akan memperkuat rasa tanggung jawab terhadap negara, sekaligus menciptakan ikatan yang lebih kuat antar sesama warga negara.
- **Memperkuat Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah:** Sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk menciptakan kebijakan yang adil dan merata. Pemerintah pusat dan daerah harus bekerja sama dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan yang tidak hanya mengutamakan kepentingan wilayah tertentu, tetapi mempertimbangkan kebutuhan seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, kebijakan yang diambil akan lebih efektif dalam menciptakan kesejahteraan bersama dan memperkuat integrasi nasional. Selain itu, koordinasi yang baik juga akan menghindarkan adanya kebijakan yang tumpang tindih atau tidak efektif dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

**Tabel Perwujudan Sikap Menjaga Keutuhan NKRI di Berbagai Lingkungan**

Sikap	Lingkungan Keluarga	Lingkungan Sekolah	Lingkungan Masyarakat
<b>Cinta Tanah Air</b>	Menyukai hidangan khas daerah sebagai bentuk cinta terhadap warisan budaya.	Mengikuti upacara bendera dengan khidmat sebagai wujud hormat pada negara.	Menghargai lagu-lagu nasional dan budaya daerah dengan turut serta dalam kegiatan seni lokal
<b>Rela Berkorban</b>	Menyisihkan waktu pribadi untuk membantu orang tua membersihkan rumah.	Mau menyelesaikan tugas kelompok meski harus mengorbankan waktu bermain.	Bergotong royong membantu tetangga yang terkena musibah atau membutuhkan bantuan.

Sikap	Lingkungan Keluarga	Lingkungan Sekolah	Lingkungan Masyarakat
<b>Toleransi</b>	Menghormati waktu ibadah anggota keluarga yang berbeda keyakinan.	Mengajak bermain teman yang berbeda suku atau agama tanpa pilih kasih.	Tidak menyebarkan kebencian atau prasangka terhadap kelompok yang berbeda budaya atau agama.
<b>Bekerjasama</b>	Menyiapkan makanan bersama keluarga di rumah.	Aktif terlibat dalam proyek kelompok kelas untuk menyelesaikan tugas bersama.	Ikut serta dalam kegiatan kerja bakti atau kebersihan lingkungan secara sukarela.



## Jejak Pancasila

- ▶ **Pendidikan Sebagai Alat Memperkuat Persatuan**  
Salah satu upaya penting untuk menjaga keutuhan wilayah adalah melalui pendidikan yang mengajarkan pentingnya toleransi, gotong royong, dan kebersamaan. Melalui kurikulum yang menekankan nilai-nilai kebangsaan dan keberagaman, Indonesia bisa memperkuat semangat persatuan di kalangan generasi muda.
- ▶ **Sekolah Tertua di Indonesia Didirikan Tahun 1589!**  
Sekolah formal pertama di Indonesia adalah **SMA Santa Ursula** di Jakarta, yang awalnya didirikan sebagai sekolah perempuan oleh misionaris Belanda pada tahun **1589**, menjadikannya salah satu sekolah tertua di Asia Tenggara!



Dasi seragam siswa sesuai jenjang pendidikan - [jdih.bengkulukota.go.id](http://jdih.bengkulukota.go.id)

### Contoh Soal

Apa yang menjadi dampak dari etnosentrisme terhadap keutuhan wilayah NKRI?

- Menumbuhkan permusuhan antar kelompok etnis
- Meningkatkan rasa saling menghormati antar etnis
- Mempercepat integrasi nasional
- Mengurangi ketegangan sosial antar etnis

Jawaban: A. Menumbuhkan permusuhan antar kelompok etnis

Pembahasan:

Etnosentrisme adalah pandangan yang menilai kelompok etnis sendiri lebih superior, yang bisa menyebabkan permusuhan antar kelompok etnis yang berbeda. Sikap ini merusak keharmonisan sosial dan mengancam keutuhan wilayah Indonesia yang sangat beragam.

## Rangkuman

Mempertahankan keutuhan wilayah NKRI adalah tanggung jawab seluruh elemen bangsa yang menuntut kesadaran, partisipasi aktif, dan semangat kebersamaan. Ancaman terhadap keutuhan ini bisa datang dari sikap negatif seperti individualisme, sukuisme, etnosentrisme, fanatisme, dan ekstremisme. Sikap-sikap tersebut merusak kohesi sosial dan memicu konflik antar kelompok. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan pendidikan karakter, multikulturalisme, nilai pluralisme, serta penguatan hukum dan program deradikalisasi. Semua langkah ini bertujuan membangun masyarakat yang toleran, inklusif, dan saling menghormati perbedaan.

Selain menghadapi berbagai bentuk sikap destruktif, menjaga keutuhan wilayah NKRI juga membutuhkan penanaman nilai-nilai positif seperti cinta tanah air, sikap rela berkorban, toleransi, dan kerja sama. Nilai-nilai ini menjadi fondasi dalam menciptakan stabilitas sosial, meningkatkan semangat persatuan, dan memperkuat ikatan antar warga negara. Pelaksanaan pendidikan kebangsaan, penghargaan terhadap pahlawan, serta pelibatan masyarakat dalam kegiatan sosial dapat memperkuat semangat nasionalisme dan memperkuat integritas bangsa di tengah keragaman suku, budaya, dan agama.

Pemerintah pusat juga memainkan peran sentral dalam menjaga keutuhan NKRI melalui kebijakan nasional yang adil, pembangunan infrastruktur yang merata, serta penguatan hubungan antara pusat dan daerah. Konektivitas antar wilayah dan pemerataan kesejahteraan menjadi kunci dalam meredam potensi ketimpangan dan konflik sosial. Selain itu, tantangan global seperti radikalisasi dan pengaruh budaya luar harus dihadapi dengan kebijakan yang memperkuat identitas nasional. Dengan pendekatan yang komprehensif dan gotong royong dari semua pihak, Indonesia dapat mempertahankan kesatuan dan kedaulatannya sebagai negara yang beragam namun tetap satu.

## Latihan Soal

1. Apa yang menjadi unsur utama dalam pembentukan negara menurut Konvensi Montevideo?
  - A. Rakyat, wilayah, kekuasaan tertinggi, hubungan internasional
  - B. Rakyat, wilayah, kekuasaan lokal, pengakuan internasional
  - C. Wilayah, pengakuan internasional, rakyat, pemerintahan
  - D. Pemerintahan, hubungan internasional, wilayah, pengakuan
2. Menurut teori Max Weber, negara memiliki monopoli terhadap...
  - A. Kebebasan berpendapat
  - B. Penggunaan kekerasan fisik secara sah
  - C. Penyelesaian sengketa antar individu
  - D. Pengelolaan sumber daya alam
3. Batas wilayah Indonesia di laut teritorial mencakup...
  - A. 12 mil laut dari garis pantai
  - B. 100 mil laut dari garis pantai
  - C. 200 mil laut dari garis pantai
  - D. 24 mil laut dari garis pantai
4. Menurut pemikiran Ernest Renan, negara dibangun atas dasar...
  - A. Pengakuan internasional
  - B. Kehendak untuk hidup bersama
  - C. Pembentukan kesatuan etnis
  - D. Dominasi politik oleh satu kelompok
5. Apa yang dimaksud dengan konsep "Bhinneka Tunggal Ika" dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)?
  - A. Keberagaman adalah kelemahan
  - B. Negara harus dibentuk berdasarkan kesatuan agama
  - C. Berbeda-beda tetapi tetap satu
  - D. Semua suku dan agama harus mengikuti satu aturan

6. Sikap individualisme berpotensi mengancam keutuhan wilayah NKRI dengan cara...
- A. Mengurangi pengaruh internasional
  - B. Menurunkan solidaritas sosial
  - C. Meningkatkan hubungan antar suku
  - D. Mengurangi ketimpangan sosial ekonomi
7. Menurut Otto Bauer, negara terbentuk oleh kelompok manusia yang memiliki...
- A. Kesamaan ekonomi
  - B. Kesamaan nasib
  - C. Kesamaan agama
  - D. Kesamaan politik

**Akses latihan soal  
lainnya di sini yuk!**



## Referensi

- Arifin, Zainal. (2014). Geografi untuk Kelas XI SMA dan MA. Jakarta: Erlangga.
- Buana, R. (2019). Kedaulatan Negara dan Hukum Internasional. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Haryono, T. (2022). Negarakertagama dan Akar Sejarah Negara. Jakarta: Pustaka Indonesia.
- Johan, A. (2018). Geopolitik Indonesia dalam Perspektif Global. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kardiman, dkk. (2017). Geografi Negara-Negara ASEAN. Bandung: Bumi Aksara.
- Kusuma, A.B. (2004). Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945. Jakarta: Badan Penerbit FIB UI.
- Kusumaningrum, N.P. (2018). Studi Wilayah dan Kedaulatan Negara. Surabaya: Genta Group.
- Mikhael, A., dkk. (2022). Pengantar Ilmu Negara dan Pemerintahan. Bandung: CV. Remaja Rosda Karya.
- Parthiana, I. Wayan. (2016). Hukum Internasional. Bandung: Mandar Maju.
- Putra, A.A. & Wajid, M. (2021). Konsep Bangsa dan Negara dalam Perspektif Global. Yogyakarta: Deepublish.
- Renan, E. (1882). *Qu'est-ce qu'une nation?* (What is a Nation?). Paris: Sorbonne Lecture.
- Schachter, O. (1972). *The Rights of States in Airspace*. New York: Columbia Law Review.
- Suastika, I Wayan & Sukadi. (2017). Ilmu Negara dan Pemerintahan. Denpasar: Widya Dharma.
- Syamsumardian, H. (2022). Geopolitik dan Strategi Nasional Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.
- United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), 1982.